



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN
DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 – 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 28 Nopember 2017, diperlukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 1950 No 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 98);

1

24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 99);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 120);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri No. 143);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018-2021.**

Pasal 1

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020, merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri serta pihak yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri.

Pasal 2

Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

Pada Tanggal : 23 April 2018

BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 23 April 2018

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI



SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN
ANGIN TOPAN DI KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2018 – 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN
DI KABUPATEN WONOGIRI – PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018 – 2020

Dalam bulan Nopember 2017, sebagai dampak curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai-sungai di seluruh aliran menuju Waduk Gajah Mungkur Wonogiri menyebabkan banjir dan tanah longsor. Cuaca ekstrem juga menimbulkan terjadinya angin topan yang melanda Kabupaten Wonogiri, tepatnya pada tanggal 28 Nopember 2018 yang berdampak pada kerusakan dan kerugian pada wilayah Kabupaten Wonogiri. Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo ini melintasi Kabupaten Wonogiri dengan hulu sungai yang berada di daerah Pegunungan di wilayah Kecamatan Jatipurno, Slogohimo, Tirtomoyo, Karangtengah, Giriwoyo, Pracimantoro dan Eromoko, Kabupaten Wonogiri. Kejadian banjir, tanah longsor dan angin topan ini dipicu oleh cuaca ekstrem yang mengakibatkan siklon cempaka serta curah hujan yang sangat tinggi yang tak mampu lagi menahan debit air hujan, serta kondisi tanah yang labil sehingga terjadi tanah longsor.

Banjir, tanah longsor dan angin topan di wilayah Kabupaten Wonogiri telah mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Tercatat ratusan rumah rusak dengan kategori rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan, termasuk kerusakan pada areal pertanian serta sarana dan prasarana di wilayah yang terkena bencana.

Kerusakan yang diakibatkan banjir bandang, tanah longsor dan angin topan tersebut telah berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor yang mengakibatkan terganggunya aktivitas dan layanan umum di wilayah terdampak bencana.



Dalam rangka penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, telah dilakukan pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu-Pasna) oleh BBPD Kab. Wonogiri dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdampak dan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Bencana Banjir bandang ini telah mengakibatkan total kerusakan dan kerugian sebesar Rp. 96.299.169.500.

Kerusakan dan kerugian terbesar terjadi pada sektor perumahan sebesar Rp. 41.392.550.000,- (42,73%), sektor ekonomi sebesar Rp. 29.173.284.500,- (30,12%), sektor infrastruktur sebesar Rp. 25.990.335.000,- (26,39%), sektor sosial sebesar Rp. 718.000.000,- (0,74%), dan lintas sektor sebesar Rp. 25.000.000,- (0,03%). Untuk kerusakan dan kerugian yang sedemikian besarnya, telah diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp. 60.597.496.620,-. Kebutuhan pemulihan diperuntukkan bagi pendanaan sektor permukiman sebesar Rp. 22.908.829.620,- (37,80%), sektor infrastruktur sebesar Rp. 27.684.263.000,- (45,69%), sektor sosial sebesar Rp. 1.947.025.000,- (3,21%), sektor ekonomi sebesar Rp. 7.957.379.000,- (13,13%) dan lintas sektor sebesar Rp. 100.000.000,- (0,17%).

Sebagai acuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan penyusunan Rencana Aksi, yang didasarkan kepada hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu-Pasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat, Provinsi, maupun Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya yang sah. Beberapa arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana terkait dengan banjir, tanah longsor dan angin topan di wilayah Kabupaten Wonogiri yang menjadi bagian dalam Rencana Aksi ini adalah sebagai berikut:

1. Pembersihan dan perbaikan infrastruktur publik agar dilaksanakan dengan segera.
2. Perbaikan permukiman menjadi menjadi prioritas pemulihan, dengan menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman.
3. Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo agar ditangani dengan pola relokasi sekaligus merevitalisasi dan normalisasi sungai.
4. Berkaitan dengan relokasi permukiman penduduk, maka penyediaan lahan relokasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.



5. Identifikasi dan inventarisasi segera dukungan yang dapat diberikan Pemerintah untuk pemulihan pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri.
6. Kebijakan pemulihan dan stimulan bantuan pemulihan perumahan dan permukiman agar segera ditetapkan, termasuk sumber dana untuk pembiayaannya.
7. Stimulan perumahan dari anggaran BNPB, pemulihan sektor lainnya menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing. BNPB memberikan dukungan untuk mengisi celah pendanaan yang ada.

Jangka waktu pemulihan yang ditetapkan dalam Rencana Aksi ini adalah selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Prioritas pemulihan di sektor permukiman yaitu Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Untuk relokasi, kebutuhan lahan dan dana untuk pembangunan prasarana lingkungan permukiman disediakan dan/atau dibiayai oleh Pemerintah terkait.

Perencanaan pembangunan di wilayah terdampak bencana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sama halnya dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang berupa kebijakan yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah untuk penyusunan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.

Sumber pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di wilayah Kabupaten Wonogiri berasal dari APBN dan APBD. Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang dimaksud.

Setiap bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten terkait sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatannya masing-masing dan alokasi pendanaan.

Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Kegiatan ini dimulai dari perencanaan kegiatan yang meliputi indentifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan, pelaksanaan kegiatan rehabiitasi dan rekonstruksi, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan termasuk pengawasan baik yang dilaksanakan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan atau pemerintah daerah, sampai kepada langkah pengalihan hasil rehabilitasi dan rekonstruksi kepada program pembangunan yang berkelanjutan pada daerah tersebut.

Pemantauan perlu dilakukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sedangkan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana. Pelaporan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 28 Nopember 2017 telah terjadi banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri dengan wilayah terdampak sebanyak 23 (dua puluh tiga) kecamatan meliputi :

1. Kecamatan Giriwoyo
2. Kecamatan Giritontro
3. Kecamatan Paranggupito
4. Kecamatan Pracimantoro
5. Kecamatan Eromoko
6. Kecamatan Manyaran
7. Kecamatan Wuryantoro
8. Kecamatan Wonogiri
9. Kecamatan Selogiri
10. Kecamatan Ngadirojo
11. Kecamatan Sidoharjo
12. Kecamatan Girimarto
13. Kecamatan Nguntoronadi
14. Kecamatan Tirtomoyo
15. Kecamatan Baturetno
16. Kecamatan Jatipurno
17. Kecamatan Jatisrono
18. Kecamatan Jatiroto
19. Kecamatan Kismantoro
20. Kecamatan Purwantoro
21. Kecamatan Slogohimo
22. Kecamatan Batuwarno
23. Kecamatan Karangtengah

Kejadian ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi sejak tanggal 27 Nopember 2017 dengan intensitas lebat selama 25 jam sehingga menyebabkan debit air pada anak-anak Sungai Bengawan Solo yang menuju Waduk Gajah Mungkur meluap. Selain itu, intensitas hujan yang tinggi menyebabkan tanah mengalami kejenuhan kandungan menyerap air.

Dalam kondisi tersebut dan kondisi tanah yang labil serta kemiringan lereng yang curam sehingga menyebabkan tanah longsor di sejumlah lokasi. Banjir, tanah longsor dan angin topan menyisakan kondisi kerusakan di sejumlah wilayah kecamatan.



Gambar No. 1.1

Tampak Atas Lokasi Longsor Dsn. Bengle, Desa Dlepih, Kec. Tirtomoyo

Sebanyak 557 unit rumah terkena dampak dengan rincian 58 unit rumah roboh, 96 unit rumah rusak berat, 403 unit rumah rusak sedang dan 507 unit rumah terancam tanah longsor akibat tanah labil dan retakan-retakan yang timbul akibat hujan. Selain itu, berbagai fasilitas umum dan sosial, kantor pemerintahan, sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, air bersih serta layanan publik lainnya terganggu. Akses jalan menuju kota kecamatan Karangtengah juga terputus akibat beberapa titik lokasi tertutup material longsor.



Gambar No. 1.2

Foto Lokasi Terdampak Bencana Banjir

h

Terkait dengan data korban banjir, tanah longsor dan angin topan berdasarkan data dari posko BPBD Kabupaten Wonogiri per tanggal 2 Januari 2018, tercatat 4 orang korban meninggal dunia, dan 2 orang mengalami luka berat, serta kurang lebih 2.584 orang mengungsi. Penduduk yang mengungsi tersebut ditempatkan sementara di beberapa lokasi posko pengungsi yang tersebar di 3 kecamatan.



Gambar No. 1.3
Foto Evakuasi dan Posko Pengungsian

Dikarenakan kondisi tersebut di atas, Bupati Wonogiri menetapkan pernyataan status tanggap darurat bencana banjir bandang selama 7 hari yaitu 29 Nopember 2017 sampai dengan 5 Desember 2017 melalui Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 378 Tahun 2017 tanggal : 29 Nopember 2017 tentang Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri. Status tanggap darurat bencana tersebut diperpanjang melalui SK Bupati Wonogiri Nomor 382 Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2017 tentang Perpanjangan Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 yang menetapkan perpanjangan status tanggap darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di wilayah Kabupaten Wonogiri, selama 30 (tiga puluh) hari yaitu sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan 5 Januari 2018.

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 adalah dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara BPBD Kabupaten Wonogiri dengan SKPD terkait penanggulangan bencana serta pemangku kepentingan lainnya yang

1/11

difasilitasi BNPB melalui Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rencana Aksi Rehabilitasi Rekonstruksi ini menetapkan:

1. Kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Rincian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Kebutuhan pendanaan setiap kegiatan;
4. Identifikasi program/ kegiatan dan anggaran pada setiap SKPD yang dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Menetapkan sumber pendanaan (pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat dalam dan luar negeri, negara lain, dan lain-lain yang sah); dan
6. Jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana secara komprehensif dan terpadu, dengan memperhatikan:

1. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana;
2. Penentuan prioritas;
3. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan;
4. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah; dan
5. Dokumen perencanaan pembangunan terkait lainnya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 disusun sebagai rencana program dan kegiatan dalam rangka :

- a. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/ akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, untuk membangun kembali seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Kabupaten Wonogiri;
- b. Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, Tanah Longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri yang disusun oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- c. Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri dengan perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan pemerintah dan pemerintah daerah;
- d. Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber APBN, APBD dan sumber lain yang sah secara efektif, efisien, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2020 bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Keseragaman pemahaman dan persepsi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta unsur-unsur swasta, masyarakat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat berlangsung dengan baik;
- b. Perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. Perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan sesuai dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan daerah;
- d. Perencanaan dan penganggaran yang partisipatif dan konsultatif, yakni program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang telah dikonsultasikan dan memuat masukan dari dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*);
- e. Kemudahan dalam pemantauan dan pengendalian atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- f. Penggunaan dan pengelolaan sumber dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang mematuhi prinsip kehati-hatian dan bertanggung jawab.

1.3 Ruang Lingkup

Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan pascabencana.

Sasaran substansial rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi:

1. Aspek kemanusiaan, antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
2. Aspek perumahan dan permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
3. Aspek infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat;

4. Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan;
5. Aspek sosial, antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; dan
6. Aspek lintas sektor, antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020 terdiri dari 6 (enam) Bab, antara lain:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang perlunya penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, ruang lingkup pembahasan, serta sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum Wilayah

Bab ini menguraikan gambaran singkat karakteristik wilayah sebelum kejadian bencana, yang ditinjau dari kondisi geografi, demografi, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Bab III Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pascabencana

Bab ini menguraikan kronologi kejadian bencana, upaya penanganan darurat, hasil kajian akibat bencana yang terdiri dari penilaian kerusakan dan kerugian, penilaian gangguan akses, gangguan fungsi, dan meningkatnya risiko. Hasil kajian kebutuhan pemulihan yang dianalisis dalam lima sektor, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor.

Bab IV Prinsip, Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan prinsip dasar, kebijakan, ruang lingkup, serta strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Bab V Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Bab ini menguraikan proses perencanaan dan pendanaan, mekanisme pelaksanaan anggaran, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, kelembagaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemantauan dan evaluasi, serta kesinambungan pemulihan berbasis pengurangan risiko bencana.

Bab VI Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Dokumen Rencana Aksi merupakan acuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang masih harus dijabarkan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya oleh setiap pihak pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri.

ke

BAB II

KONDISI UMUM WILAYAH

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Kondisi Fisik

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Wonogiri memiliki letak yang strategis sebagai perbatasan propinsi jawa tengah dan jawa timur. Terletak dengan jarak sekitar 132 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah di Semarang dan sekitar 541 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Wonogiri merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.

2.1.1.2. Letak, Luas dan Batas Wilayah

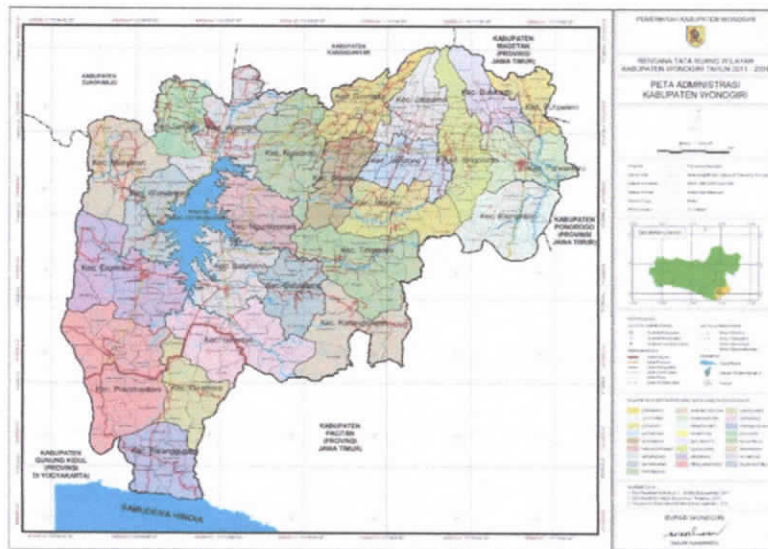
Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah sekitar 182.236,0236 hektar yang terletak diantara 7 32' dan 8 15' Lintang Selatan (LS) serta 110 41' dan 111 8' Bujur Timur (BT). Letak Kabupaten Wonogiri berada berbatasan langsung dengan 2 (dua) wilayah Propinsi, yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Timur. Adapun batas – batas administrasinya secara rinci sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kab. Karanganyar dan Kab. Sukoharjo.

Sebelah Timur : Kab. Magetan (Jawa Timur) dan Kab. Ponorogo (Jawa Timur)

Sebelah Selatan : Kab. Pacitan (Jawa Timur) dan Samudra Indonesia.

Sebelah Barat : Kab. Gunung Kidul (DIY).



Gambar No. 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Wonogiri

2.1.1.3. Kondisi Topografi

Topografi kabupaten Wonogiri sebagian besar tanahnya berupa perbukitan dengan $\pm 20\%$ Bagian wilayah merupakan perbukitan kapur, terutama yang berada di wilayah Wonogiri selatan.

Sebagian topografi tidak rata dengan kemiringan rata-rata 30°, sehingga terdapat perbedaan antara kawasan yang satu dengan kawasan yang lainnya. Secara rinci Kabupaten Wonogiri terbagi dalam 4 wilayah topografi, yaitu :

1. Wilayah dengan topografi datar (kemiringan lahan 0 - 2%) memiliki luas wilayah 432 hektare. Wilayah dengan topografi datar ini umumnya termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo Hulu, DAS Keduwang, DAS Sungai Wiroko, DAS Sungai Temon, DAS Sungai Alang serta DAS Sungai Ngunggahan.
2. Wilayah dengan topografi bergelombang (kemiringan lahan 2% - 15%) memiliki luas wilayah 7.685 hektare. Wilayah dengan topografi bergelombang ini menempati hamper semua wilayah kabupaten Wonogiri.
3. Wilayah dengan topografi curam (kemiringan lahan 15% - 40%) memiliki luas wilayah 237 hektare. Wilayah dengan topografi curam ini menempati wilayah Kecamatan Giriwoyo, Batuwarno, Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Girimarto, Jatipurno, Slogohimo, Bulukerto, Puhpelem, Kismantoro, Eromoko, Manyaran dan Purwantoro.

4. Wilayah dengan topografi sangat curam (kemiringan >40%) memiliki luas wilayah 96 hektare. Wilayah dengan topografi sangat curam ini menempati wilayah kecamatan : Karangtengah, Tirtomoyo, Jatiroto, Jatipurno, Slogohimo, Puhpelem, Purwantoro dan Kismantoro.

Secara administratif sampai dengan akhir tahun 2015 Kabupaten Wonogiri terdiri dari 25 (dua puluh lima) Kecamatan dengan 251 desa dan 43 Kelurahan, serta 2.306 dusun/lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito yang terletak 68 km dari ibukota kabupaten. Kecamatan Puhpelem memiliki luas wilayah 3.162 hektare merupakan kecamatan yang tersempit wilayahnya, sedangkan kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah kecamatan Pracimantoro dengan luas wilayah 14.214,3 hektare. Kecamatan dengan letak tertinggi adalah kecamatan Karangtengah yang berada pada ketinggian ± 600 mdpl, sedangkan kecamatan yang paling rendah adalah kecamatan Selogiri yang berada pada ketinggian ± 106 mdpl.

Tabel No. 2.1
Data administrasi pemerintahan

No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Total	Luas (ha)
1	2	3	4	5	6
1	Pracimantoro	17	1	18	14.214,3245
2	Paranggupito	8	-	8	6.475,4225
3	Giritontro	5	2	7	6.163,2230
4	Giriwoyo	14	2	16	10.060,1306
5	Batuwarno	7	1	8	5.165,0000
6	Karangtengah	5	-	5	8.459,0000
7	Tirtomoyo	12	2	14	9.301,0885
8	Nguntoronadi	9	2	11	8.040,5175
9	Baturetno	13	-	13	8.910,3800
10	Eromoko	13	2	15	12.035,8598
11	Wuryantoro	6	2	8	7.260,77000
12	Manyaran	5	2	7	8.164,4365
13	Selogiri	10	1	11	5.017,9805

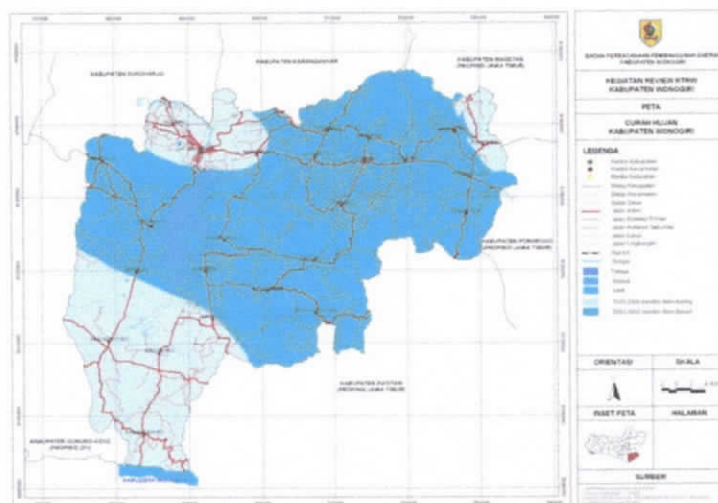
No	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Total	Luas (ha)
1	2	3	4	5	6
14	Wonogiri	9	6	15	8.292,3600
15	Ngadirojo	9	2	11	9.325,5560
16	Sidoharjo	10	2	12	7.719,7045
17	Jatiroto	13	2	15	6.277,3620
18	Kismantoro	8	2	10	9.986,1125
19	Purwantoro	13	2	15	5.925,7837
20	Bulukerto	9	1	10	4.051,8455
21	Puhpelem	5	1	6	3.161,5400
22	Slogohimo	15	2	17	6.414,7955
23	Jatisrono	15	2	17	5.002,7400
24	Jatipurno	9	2	11	5.546,4090
25	Girimarto	12	2	14	6.236,6815
	JUMLAH	251	43	294	182.236,0236

2.1.1.4. Kondisi Klimatologi

Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Wonogiri dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (*humid tropical climate*) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Iklim dan cuaca di Kabupaten Wonogiri dipengaruhi tiga faktor utama, yaitu pola sirkulasi angin musiman (*monsoonal circulation pattern*), topografi regional yang bergunung-gunung dibagian tengah Jawa Tengah.

Curah hujan rata-rata harian di sekitar Wonogiri berkisar antara 13,6 mm - 27,7 mm atau sekitar 2.589 mm curah hujan rata-rata tahunan dengan bulan basah 9 bulan dan bulan kering 3 bulan, sedangkan di sekeliling daerah pegunungan curah hujan rata-rata tahunan mencapai 3.500-4.000 mm. Variasi temperatur bulanan berkisar antara 24°C-27°C. Besaran angka penguap keringatan (evapotranspirasi) adalah 1.572 mm/tahun.

Selama musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di tenggara.



Gambar No. 2.2
Kondisi Curah Hujan Kabupaten Wonogiri

2.1.1.5. Kondisi Geologi

Struktur geologi yang dijumpai umumnya sesar (patahan) yang mempunyai arah umum Baratdaya – Timur laut dan sebagian Baratlaut – Tenggara, dan setempat yaitu di sekitar Baturetno dijumpai sayap-sayap antiklin atau sinklin. Secara umum struktur yang terbentuk di Kabupaten Wonogiri secara langsung di pengaruhi oleh tektonik dan sejarah geologi yang terjadi di P. Jawa.

Di tepi jalan di sebelah barat Waduk Gajah Mungkur banyak dijumpai singkapan seperti di jembatan kecamatan Purwantoro yang memperlihatkan sedimentasi endapan vulkanik (pyroclastys). Salah satunya singkapan tersebut adalah struktur diapir. Di bawah singkapan tersebut terdapat satu lapisan tuff berbutir kasar yang terendapkan di dasar laut sebagai lapisan lapili. Di atas lapisan lapili ini suatu lapisan debu vulkanik diendapkan dan semua ini tertutup oleh satu lapisan lapili lagi. Berat jenis dari lapisan lapili lebih besar daripada debu vulkanik, sehingga ada situasi yang tidak stabil, sehingga lapisan lapili akan menekan lapisan debu ke bawah. Di samping perbedaan berat jenis masing-masing lapisan, ada satu sifat lain yang berbeda, yaitu sifat plastis. Debu yang basah dengan porositas tinggi akan berubah bentuk dengan mudah. Keadaan ini terjadi pada lapisan endapan vulkanik tersebut. Lapisan debu akan berubah menjadi cairan kental yang akan mengalir secara plastis. Aliran plastis tersebut dibantu oleh tekanan dari atas.

Handwritten signature or mark.

Akhirnya terjadi pembengkakan yang dibentuknya seperti jamur, atau membentuk struktur diapir. Jika aliran plastis itu tertekan terus-menerus, maka lapisan lapili yang ada di atasnya dapat tertembus aliran debu vulkanis.

Selain diapir dan penembusan lapisan atas, load casts dapat dilihat juga. Load casts pada ingkapan mi adalah bahan lapili dan lapisan atas yang turun sebagai bola dalam bahan debu, hanya oleh karena perbedaan jenis beratnya. Struktur sedimen mi sering ditemui bila ada lapisan pasir diendapkan di atas lapisan lempung atau lanau yang lembek, dan mudah berubah bentuknya.

Fenomena yang menarik pada singkapan mi adalah pembentukan diapir yang tidak hanya dapat terjadi pada skala kecil, bahkan juga pada skala besar yang ratusan kilometer. Diapir kecil biasanya muncul pada lapisan lempung, sedangkan diapir besar muncul jika batu garam evaporit terkubur di bawah sedimen biasa. Di Jawa, struktur diapir atau sejenisnya dapat ditemukan di kaki gunungapi. Gunungapi mi terletak di atas sedimen Tersier yang relatif plastis. Karena gaya berat gunungapi itu sendiri menyebabkan tekanan yang besar pada lapisan sedimen Tersier tersebut, sehingga terjadi struktur diapir.

Di sebelah barat Waduk Wonogiri (Cakaran), di sepanjang jalan raya, banyak batuan vulkanik tersingkap yang berumur Miosen Bawah. Di lokasi Cakaran kita dapat menemui lapili dengan warna terang; warna abu-abu sampai putih. Ini adalah light coloured acid tuffs and ash dan kadang-kadang juga pumiceous ash yang terutama terdiri atas mineral feldspar dan kuarsa. Di Cakaran dan banyak tempat lain, lapili dan debu vulkanik sudah mengeras sampai tuff, sehingga batuan ini dapat digergaji dan dijual untuk bangunan. Tuff ini dihasilkan selama erupsi yang dinamakan "Peleeen" yang berbeda dan erupsi biasa, karena debu dan lapili, panas maupun dingin, terlempar ke luar dari kawah. Erupsi 'Peleeen' disertai oleh gas vulkanik yang sangat panas dan turbulent. Dalam literatur peristiwa ini sering disebut nuee ardente atau glowing cloud, yaitu debu dan lapili yang bersinar panas dalam awan gas yang turbulen dan panas. Awan ini dapat mencapai kecepatan yang mendekati 100 km/jam ketika turun dari kawah ke kaki gunungapi.

Suhu yang tinggi dan gerakan gas turbulen menyebabkan vegetasi di lereng gunungapi hancur total dan berubah menjadi arang. Pada tuff di Cakaran seringkali sisa arang dapat dilihat yang tampak tercampur dalam awan panas dengan debu dan lapili. Campuran ini menunjukkan betapa turbulen awan gasnya. Semacam erupsi hampir selalu terjadi pada gunungapi yang tertutup dengan lava yang sangat kental (viscous lava dome) seperti di Merapi. Di bawah lava yang kental dalam saluran utama ke bawah, tekanan gas akan naik sampai ada letusan besar atau tubuh gunungapi terbongkar, sehingga gas ini keluar.

Aktivitas ekonomi yang ada berupa pengambilan batu tuff vulkanik. Batu ini terdiri atas dua bentuk, yaitu untuk bahan bangunan dan untuk batu pagar. Dalam kegiatan pengambilan batu seorang tenaga kerja satu hari mendapat 2 batang batu pilar dengan harga Rp 1000,-/pilar, sedangkan bata bangunan setiap rit sekitar 4 atau 5 meter kubik dengan harga tidak menentu. Usaha pengambilan batu tuff mempunyai tujuan ganda, yaitu pertama untuk diambil batunya, kedua untuk meratakan sebagai persiapan lahan pekarangan atau rencana bangunan.

Penggunaan lahan di sebelah kanan jalan menuju Wonogiri berupa areal Waduk Wonogiri, dan sebelah kiri jalan sebagai daerah pertanian dengan tanaman padi dan polowijo. Karena topografi kasar dan sumber air yang terbatas, maka produksi pertanian juga rendah.

Waduk Wonogiri terletak pada formasi batuan yang cukup stabil yang tersusun oleh breksi dan batu pasir. Fungsi waduk adalah untuk pengendali banjir, pengairan, pembangkit tenaga listrik, dan rekreasi. Tipe bendung pada Waduk Wonogiri adalah tipe urug.

Waduk ini kalau ditinjau dan fungsinya sebagai reservoir air kurang tepat karena sedimentasinya sangat cepat. Sedimentasi yang sangat cepat tersebut disebabkan oleh lahan kritis yang sangat luas di daerah hulunya. Sumber air waduk ini berasal dari 8 anak sungai, yaitu S.Keduang, S.Wiroko, S.Temon, Bengawan Solo Hulu, S.Alang, S.Ngrancah (S. Ngrowo), dan S.Wuryantoro. Tinggi muka air tertinggi adalah 127 m, muka air terendah 127 m; volume waduk: 750 x 106 m³ luas genangan 8.000 Ha.

Waduk Wonogiri merupakan waduk serbaguna yang juga sebagai daerah wisata alam air dengan kegiatan naik perahu dan memancing. Di tengah-tengah waduk ini terdapat jalur rute Panglima Besar Jendral Sudirman waktu melakukan gerilya, yang ditandai dengan tugu-tugu di tengah waduk.

Di sebelah utara Kota Wonogiri dijumpai Bengawan Solo yang mengalirkan airnya pada suatu lembah yang lebar. Dan lembah ini ke arah selatan-barat gawir-gawir sesar (fault-scarps) dan zone selatan dapat dilihat. Lembah Bengawan Solo sudah tennasuk Zone Tengah Pulau Jawa. Dengan jelas tampak balok-balok sesar turun secara gravitasi-tektunik (gravity tectonics) melalui sesar turun dengan bidang yang melengkung (concave fault planes). Semua itu adalah reaksi terhadap pengangkatan Plato Wonosari pada kala Plestosen Tengah, yang berkaitan dengan pengangkatan-berkubah (updoming/uparching) Zone Tengah sebelum kegiatan vulkanik regional mulai. Balok-balok sesar yang turun melalui sesar-sesar sering mengalami rotasi terputar balik (backward rotation along curve slip faults).

Dalam lembah ini balok-balok dan zone selatan masih kelihatan sebagai pulau di tengah dataran aluvial. Bukit-bukit ini juga terjadi dari bahan vulkanik berumur Miosen Bawah. Geologinya kelihatan masuk tuff masam (acid tuffs) sampai ignimbrit dengan kristal besar. Tuff kristal ini juga menunjukkan pengendapan dalam keadaan panas. Ada suatu sifat yang menarik, yaitu tuff ini mengandung kalsium karbonat. Tetapi kalsium karbonat harus sekunder, sebab tuff yang masih panas bila jatuh dalam laut tidak akan membentuk kristal. Barangkali sumber kalsium karbonat adalah Formasi Wonosari yang secara stratigrafis terletak di atas tuff-tuff ini. Kalsium karbonat terdapat pula di dalam urat (veins) dan barik-barik (veinlets), mungkin ini sudah membuktikan, bahwa kalsium karbonat adalah sekunder. Di daerah ini terdapat suatu sisa intrusi diorit bukit ini diberi nama Gunung Tenong (Tim Fakultas Geografi UGM, 1996 : 96-101).

2.1.1.6. Kondisi Hidrologi

Keberadaan air di daerah ini sangat dipengaruhi oleh musim. Selain itu kondisi hidrologi Kabupaten Wonogiri juga sangat dipengaruhi oleh bentuk lahan yang ada. Wilayah Kabupaten Wonogiri termasuk dalam wilayah Sub DAS Wuryantoro. Sumber air untuk pertanian sebagian disuplai oleh keberadaan Waduk Gajah Mungkur.

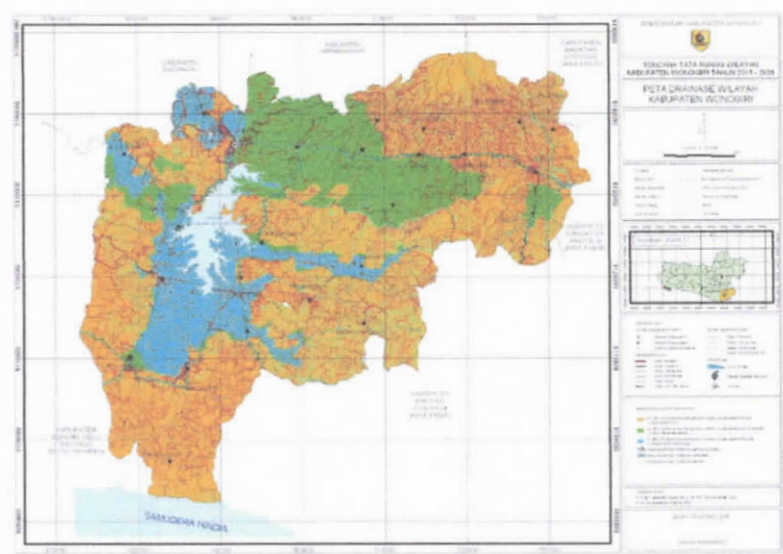
Daerah tangkapan (Catchment area) Waduk Gajah Mungkur antara lain : Sub DAS Keduang, Sub Das Wiroko, Sub Das Solo Hulu, Sub DAS Alang Unggahan, Sub DAS Wuryantoro, dan Sub DAS Temon. Selain itu terdapat sub DAS lain yaitu Sub DAS Madiun, Sub DAS Walikan, Sub DAS Oya, dan Sub DAS Tremes Ponggok.

Jenis Tanah Di Kabupaten Wonogiri terdapat beberapa jenis tanah, yaitu:

- 1) Mediteran, Sifat tanah, warna coklat, tekstur geluh berlempung-lempung, struktur gumpal, konsistensi teguh, permeabilitas sedang-lambat, pH 6,5-7,0, kandungan bahan organik rendah, KTK dan kejenuhan basa tinggi, kesuburan dan potensi tanah untuk pertanian tinggi.
- 2) Litosol, bagian jenis tanah ini terdapat pada lereng-lereng perbukitan pegunungan denudasional. Sifat tanah, warna coklat, jeluk tanah <30 cm, tekstur geluh lempung pasir, struktur remah-gumpal, 60 konsistensi agak teguh, permeabilitas lambat, pH 6,5-7,0, KTK dan kejenuhan basa sedang, kesuburan dan potensi tanah untuk pertanian rendah.
- 3) Grumusol, bagian jenis tanah ini terdapat pada dataran lereng kaki perbukitan struktural. Sifat tanah warna kelabu sangat gelap struktur lempung berat, konsistensi tanah sangat teguh struktur granuler pejal permeabilitas sangat lambat, pH 6,5-7,0 kejenuhan basa, dan KTK sedang-tinggi, kesuburan dan potensi tanah untuk pertanian rendah. Jenis tanah ini didominasi oleh tipe lempung montmorilonit (smectite) yang memiliki sifat bila basah sangat lekat, dan sangat plastik mengembang kuat (cracking shrinking).

Hal ini menyulitkan pengolahan tanah atau jangka olahnya sempit, dan daya dukung untuk bangunan rendah.

- 4) Alluvial, bagian tanah jenis ini terdapat pada dataran aluvial lembah sungai dan antar perbukitan. Sifat tanah, warna kelabu kecoklatan, tekstur lempung berpasir-geluh lempung berdebu, struktur gumpal, konsistensi agak teguh, permeabilitas lambat, pH 6,5-7,0 KTK dan kejenuhan basa sedang-tinggi, kesuburan dan potensi tanah untuk pertanian sedang-tinggi, bila tersedia air irigasi, tanah ini produktif untuk tanaman padi, dan tanaman palawija seperti kedelai, kacang tanah.



Gambar No. 2.3
Kondisi Drainase Kabupaten Wonogiri

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Berdasarkan data tahun 2015, penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut :

Tabel No. 2.2

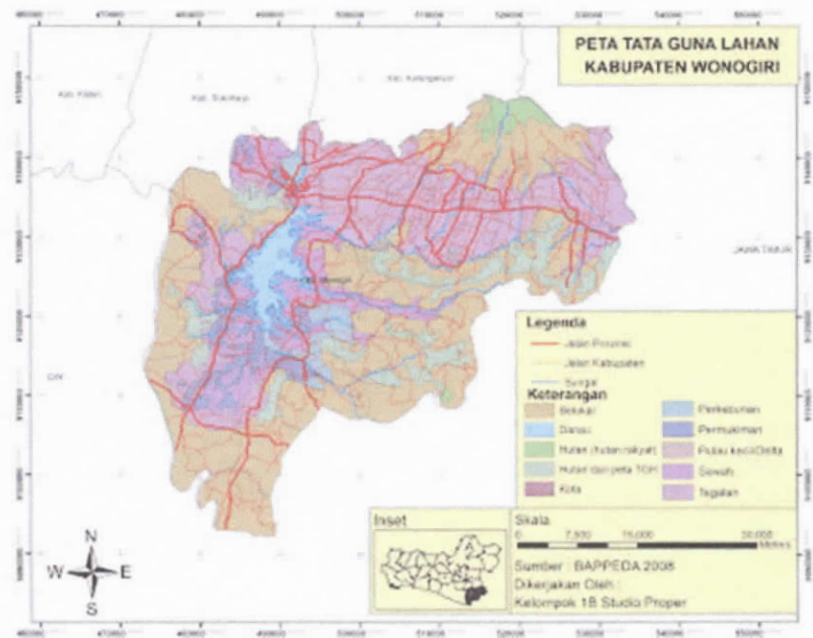
Tabel Penggunaan Lahan di Wilayah Kabupaten Wonogiri

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	2	3	4
A	Lahan Pertanian		
1	Lahan Sawah	32.170	17,65
2	Lahan Bukan Sawah		
2.a	Tegalan	88.836	48,75
2.b	Perkebunan	473	0,26
2.c	Hutan Rakyat	3.821	2,10

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	2	3	4
2.d	Pedang Penggembalaan	986	0,54
2.e	Sementara Tidak Diusahakan	167	0,09
2.f	Lainnya	17.666	9,69
B	Lahan Bukan Pertanian	38.117	20,92
	Jumlah	182.236	100,00

Dengan kondisi geografis seperti diatas, Kabupaten Wonogiri mempunyai cukup strategis dan memiliki peranana penting dalam proses pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah dan Nasional, antara lain :

1. Secara wilayah, sebagai wilayah pengembangan, pelayanan dan kawasan andalan bagian selatan jawa dengan daya dukung sumber daya alam yang sangat potensial, terutama produksi sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan, peternakan dan perkebunan).
2. Secara regional, Kabupaten Wonogiri sangat mudah berintegrasi dengan pusat wilayah pengembangan lainnya di propinsi Jawa Tengah.
3. Secara nasional, Kabupaten Wonogiri merupakan penyuplai komoditas terbaik untuk sektor pertanian khususnya ternak sapi besar, jagung, ubi kayu, ikan dan kacang mete.



Gambar No. 2.4
Kondisi Penggunaan Lahan Kabupaten Wonogiri

[Handwritten signature]

2.1.1.8. Potensi Pengembangan Wilayah

Dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Wonogiri turut memperhatikan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031 sebagai upaya mewujudkan Kabupaten Wonogiri sebagai daerah konservasi yang didukung oleh agribisnis, pariwisata dan kelautan. Berdasarkan RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2011-2031, sistem pusat kegiatan Kabupaten terbagi atas :

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, terletak di Perkotaan Wonogiri.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah kabupaten, terletak di :
 - a. Perkotaan Purwantoro; berfungsi sebagai kawasan perdagangan, permukiman, pendidikan, dan pertanian meliputi:
 - Kecamatan Purwantoro;
 - Kecamatan Bulukerto;
 - Kecamatan Kismantoro;
 - Kecamatan Puhpelem.
 - b. Perkotaan Pracimantoro; berfungsi sebagai kawasan perdagangan, permukiman, pendidikan, dan pariwisata meliputi:
 - Kecamatan Pracimantoro;
 - Kecamatan Eromoko;
 - Kecamatan Giritontro;
 - Kecamatan Paranggupito.
 - c. Perkotaan Baturetno. berfungsi sebagai kawasan perdagangan, pendidikan, permukiman, pertanian, dan pariwisata meliputi:

- Kecamatan Baturetno;
- Kecamatan Nguntoronadi;
- Kecamatan Tirtomoyo;
- Kecamatan Karangtengah;
- Kecamatan Batuwarno;
- Kecamatan Giriwoyo.

3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, meliputi :

- a. Perkotaan Eromoko;
- b. Perkotaan Manyaran;
- c. Perkotaan Ngadirojo;
- d. Perkotaan Tirtomoyo;
- e. Perkotaan Kismantoro;
- f. Perkotaan Paranggupito;
- g. Perkotaan Giritontro;
- h. Perkotaan Batuwarno;
- i. Perkotaan Karangtengah;
- j. Perkotaan Nguntoronadi;
- k. Perkotaan Jatiroto;
- l. Perkotaan Bulukerto;
- m. Perkotaan Puhpelem;
- n. Perkotaan Giriwoyo;
- o. Perkotaan Jatipurno;
- p. Perkotaan Girimarto;
- q. Perkotaan Slogohimo;
- r. Perkotaan Jatisrono;
- s. Perkotaan Selogiri;
- t. Perkotaan Wuryantoro;
- u. Perkotaan Sidoharjo.

4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Kecamatan Selogiri meliputi:

- 1. Kelurahan Kaliancar;
- 2. Desa Singodutan;
- 3. Desa Pule.

Kecamatan Wonogiri meliputi:

1. Kelurahan Wonokarto;
2. Kelurahan Wonoboyo;
3. Desa Bulusulur;
4. Desa Manjung.

Kecamatan Ngadirojo meliputi:

1. Kelurahan Kasihan;
2. Desa Ngadirojo Kidul;
3. Desa Mlokomanis Kulon.

Kecamatan Sidoharjo meliputi:

1. Kelurahan Kayuloko;
2. Desa Tempursari.

Kecamatan Jatisrono meliputi:

1. Desa Pandeyan;
2. Desa Tanggulangin;
3. Desa Jatisrono.

Kecamatan Girimarto meliputi:

1. Desa Tambakmerang;
2. Desa Jendi.

Kecamatan Jatipurno meliputi:

1. Kelurahan Jatipurno;
2. Desa Tawangrejo.

Kecamatan Slogohimo meliputi:

1. Kelurahan Bulusari;
2. Desa Randusari.

Kecamatan Jatiroto meliputi:

1. Desa Cangkring;
2. Kelurahan Jatiroto.

Kecamatan Purwantoro meliputi:

1. Kelurahan Tegalorejo;
2. Kelurahan Purwantoro;
3. Desa Miricinde.

Kecamatan Bulukerto meliputi:

1. Desa Nadi;
2. Desa Krandegan.

Kecamatan Puhpelem meliputi:

1. Kelurahan Giriharjo;
2. Desa Puhpelem;
3. Kecamatan Kismantoro meliputi;
4. Kelurahan Kismantoro;
5. Desa Miri.

Kecamatan Nguntoronadi meliputi:

1. Kelurahan Kedungrejo;
2. Desa Ngadirejo;
3. Desa Ngadiroyo.

Kecamatan Tirtomoyo meliputi:

1. Desa Hargantoro;
2. Desa Ngarjosari;
3. Desa Wiroko.

Kecamatan Baturetno meliputi:

1. Desa Kedungombo;
2. Desa Talunombo;
3. Desa Baturetno;
4. Desa Watuagung.

Kecamatan Batuwarno berada di Desa Batuwarno.

Kecamatan Karangtengah berada di Desa Karangtengah.

Kecamatan Giriwoyo meliputi:

1. Kelurahan Giriwoyo;
2. Desa Sirnobojo.

Kecamatan Wuryantoro meliputi:

1. Kelurahan Wuryantoro;
2. Desa Pulutan Wetan.

Kecamatan Manyaran berada di Desa Karanglor.

Kecamatan Eromoko meliputi:

1. Kelurahan Puloharjo;
2. Desa Eromoko.

Kecamatan Pracimantoro meliputi:

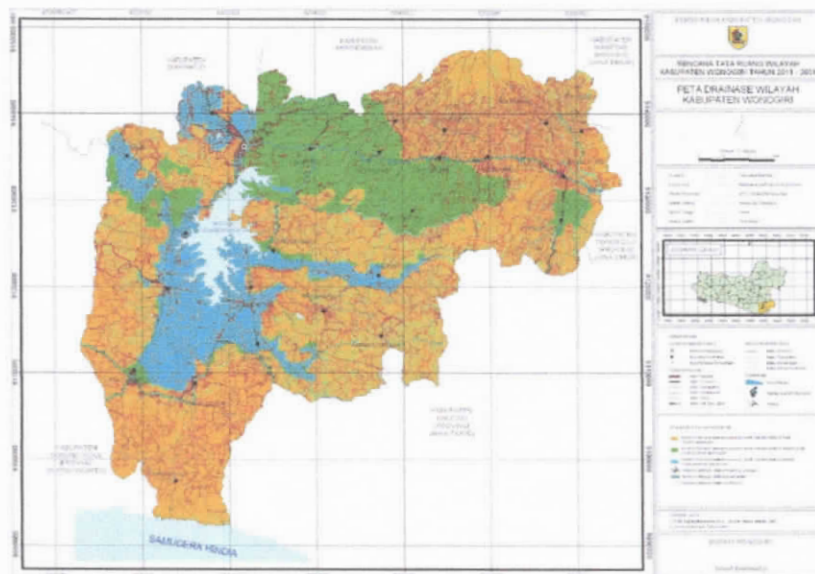
1. Desa Pracimantoro;
2. Desa Tubokarto;
3. Desa Suci.

Kecamatan Giritontro meliputi:

1. Kelurahan Giritontro;
2. Kelurahan Bayemharjo.

Kecamatan Paranggupito meliputi:

1. Desa Paranggupito;
2. Desa Ketos.



Gambar No. 2.5

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonogiri 2011-2031

Wilayah Kabupaten Wonogiri yang mempunyai pengaruh penting terhadap pengembangan ekonomi, sosial budaya maupun lingkungan menjadi prioritas dalam kebijakan penataan ruang daerah sebagai suatu kawasan strategis pada tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Dengan memperhatikan Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP), telah ditetapkan 3 (tiga) jenis Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), meliputi:

- 1) Kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten terdiri atas:
 - a. Kawasan perkotaan Wonogiri;
 - b. Kawasan perkotaan Pracimantoro;
 - c. Kawasan perkotaan Purwantoro;
 - d. Kawasan perkotaan Baturetno;
 - e. Kawasan sekitar terminal penumpang tipe A;
 - f. Kawasan koridor pantai selatan

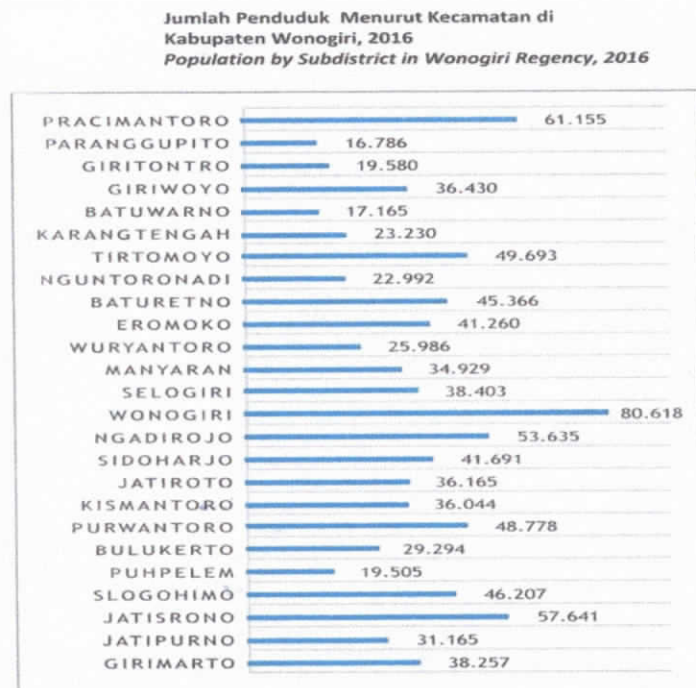
- 2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa Kawasan Cagar Budaya terdiri atas :
 - a. Kecamatan Wonogiri;
 - b. Kecamatan Selogiri;
 - c. Kecamatan Tirtomoyo;
 - d. Kecamatan Girimarto.
- 3) Kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup terdiri:
 - a. Sub DAS Keduang meliputi:
 - Kecamatan Slogohimo;
 - Kecamatan Jatipurno;
 - Kecamatan Jatisrono;
 - Kecamatan Jatiroto;
 - Kecamatan Girimarto;
 - Kecamatan Sidoharjo;
 - Kecamatan Ngadirojo;
 - Kecamatan Nguntoronadi; dan
 - Kecamatan Wonogiri.
 - b. Sub DAS Wuryantoro meliputi:
 - Kecamatan Wuryantoro; dan
 - Kecamatan Manyaran.
 - c. Sub DAS Wiroko meliputi:
 - Kecamatan Tirtomoyo;
 - Kecamatan Nguntoronadi;
 - Kecamatan Batuwarno;
 - Kecamatan Baturetno; dan
 - Kecamatan Jatiroto.
 - d. Sub DAS Temon meliputi:
 - Kecamatan Batuwarno; dan
 - Kecamatan Baturetno.
 - e. Sub DAS Alang Ngungghahan meliputi:
 - Kecamatan Pracimantoro;
 - Kecamatan Eromoko;
 - Kecamatan Giritontro; dan
 - Kecamatan Giriwoyo.

- f. Sub DAS SoloHulu meliputi:
- Kecamatan Karangten;
 - Kecamatan Giriwoyo;
 - Kecamatan Batuwarno;
 - Kecamatan Giritontro; dan
 - Kecamatan Baturetno.

2.1.2. Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 951.975 jiwa yang terdiri atas 462.700 jiwa penduduk laki-laki dan 489.275 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Wonogiri mengalami pertumbuhan sebesar 0,31 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 94,57.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2016 mencapai 522 jiwa/ km². Kepadatan penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.152 jiwa/ km² dan terendah di Kecamatan Paranggupito sebesar 259 jiwa/ km².

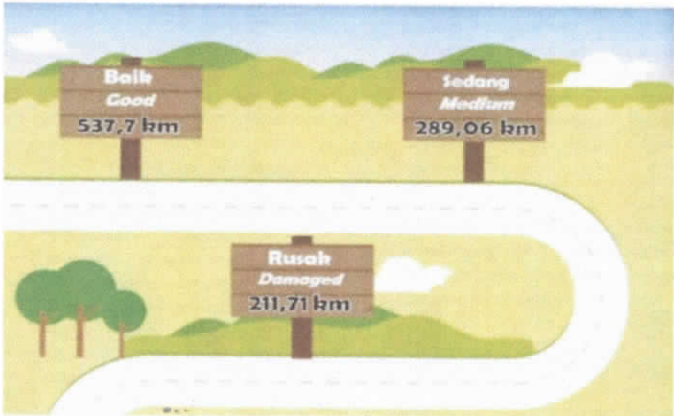


Gambar No. 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016

2.1.3. Kondisi Infrastuktur/ Sarana dan Prasarana Publik

2.1.3.1 Jaringan Jalan

Panjang jalan kabupaten di Kabupaten Wonogiri tahun 2016 adalah 1.038,47 km. Dilihat dari kondisinya jalan tersebut 537,7 km pada kondisi baik; 289,06 km pada kondisi sedang; 200,81 km rusak dan sisanya 10,9 km kondisinya rusak berat.



Gambar No. 2.7

Kondisi Jalan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

Tabel No. 2.3

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

Tabel Table		Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Kabupaten Wonogiri (km), 2016 <i>Length of Roads by Subdistrict and Level of Government Authority in Wonogiri Regency (km), 2016</i>			
Kecamatan Subdistrict		Pemerintahan yang Berwenang Mengelola <i>Level of Government Authority</i>			Jumlah Total
		Negara State	Provinsi Province	Kabupaten/Kota Regency/City	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pracimantoro	11,45	4,60	56,00	72,05
2	Paranggupito	-	-	32,35	32,35
3	Giritontro	5,60	-	19,55	25,15
4	Giriwoyo	16,40	1,60	31,05	49,05
5	Batuwarno	-	-	34,60	34,60
6	Karangtengah	-	-	36,60	36,60
7	Tirtomoyo	-	-	75,74	75,74
8	Nguntoronadi	-	13,50	34,06	47,56
9	Baturetno	-	14,90	31,70	46,60
10	Eromoko	-	7,40	74,33	81,73
11	Wuryantoro	-	20,15	21,77	41,92
12	Manyaran	-	12,91	21,28	34,19
13	Selogiri	-	7,80	43,87	51,67
14	Wonogiri	-	19,61	126,45	146,06
15	Ngadirojo	-	25,94	54,38	80,32
16	Sidoharjo	-	8,30	37,02	45,32
17	Jatiroto	-	-	32,82	32,82
18	Kismantoro	-	13,37	34,87	48,24
19	Purwantoro	-	12,91	36,20	49,11
20	Bulukerto	-	-	17,13	17,13
21	Puhpelem	-	-	11,62	11,62
22	Slogohimo	-	6,90	62,15	69,05
23	Jatisrono	-	9,90	55,07	64,97
24	Jatipurno	-	-	14,19	14,19
25	Girimarto	-	-	43,68	43,68

[Handwritten signature]

2.1.3.2 Sumber Daya Air

Sumber air utama di Wonogiri adalah Waduk Gajah Mungkur. Waduk Gajah Mungkur merupakan waduk terbesar nomor 5 di Indonesia. Waduk ini terletak 7 km arah selatan kota Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Dibagian hilir pertemuan kali Keduang. Perairan danau buatan ini dibuat dengan membendung sungai terpanjang di Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Mulai dibangun pada akhir tahun 1970an dan mulai ber operasi pada tahun 1978. Luas daerah genangan lebih dari 8.800 ha dan luas daerah yang dibebaskan 90 km² yang terdiri dari 51 desa di 7 Kecamatan. Selain untuk memasuk air minum Kota Wonogiri juga menghasilkan listrik dari PLTA sebesar 12,4 MegaWatt. Untuk membangun waduk ini pemerintah memindahkan penduduk yang tergusur perairan waduk dengan transmigrasi Bedol Desa ke Sitiung (Sumatra Barat), Jujuhan (Jambi), Air Lais (Bengkulu), dan Panggang (Sumatra Selatan).

Waduk Gajah Mungkur saat ini mengalami keadaan yang sangat memprihatinkan. Umur pakai waduk direncanakan selama 100 tahun, akan tetapi berdasarkan perkembangan terakhir umur pakai waduk diperkirakan hanya tinggal 10-15 tahun lagi. Hal ini disebabkan oleh laju sedimentasi yang sangat tinggi terutama dari 6 sub DAS yang menyebabkan semakin kecilnya daya tampung air. Sub DAS Keduang merupakan penyumbang terbesar terjadinya sedimentasi yang mempercepat pendangkalan waduk sehingga menyebabkan berkurangnya volume tampungan waduk.

Air dari Waduk Gajah Mungkur dialirkan menuju Sungai Bengawan Solo. Dalam perjalanannya dari waduk menuju Bengawan Solo air mengalami pencemaran dari limbah rumah tangga. Banyak warga sekitar sungai yang membuang sampah ke sungai. Banyak juga yang menggunakannya untuk MCK sehingga membuat air waduk terkontaminasi bakteri. Jadi, air dari waduk harus di olah dahulu agar dapat dikonsumsi.

Tabel No. 2.4
 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan
 Menurut Pelanggan di Kabupaten Wonogiri
 Tahun 2016

Tabel **Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut**
Table **Pelanggan di Kabupaten Wonogiri, 2016**
Number of Customer and Distributed Clean Water by Type
of Customers in Wonogiri Regency, 2016

Pelanggan Customers	Pelanggan Customers	Air Disalurkan Distributed Water (m ³)	Nilai/Value (rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
Sosial/Social	429	119 075	441 200 430
Rumah Tangga/Household	30 410	5 437 609	25 717 735 550
Instansi Pemerintah Government Institution	625	212 892	1 947 310 200
Niaga/Trade	659	234 820	2 592 651 000
Industri/Industry	3	92	3 294 000
Khusus/Exclusive	1 758	71 726	580 515 200
Jumlah/Total	33 884	6 096 214	31 283 707 580

Sumber/Source Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wonogiri/Water Supply Company of Wonogiri Regency

2.1.3.3. Perumahan dan Permukiman serta Penataan Ruang

Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DisperaKPP) Wonogiri menilai jumlah perumahan yang tersedia di Wonogiri masih minim. Tahun 2017, kebutuhan perumahan di Wonogiri mencapai 67.000 unit, dari jumlah saat ini kurang dari 1000 unit. Penyediaan rumah di perumahan baru kisaran 500-600 unit. Pada 2018, pengembang di bawah naungan REI bakal membangun perumahan murah sebanyak 3.000 unit. Seiring banyaknya perusahaan yang masuk ke Wonogiri mendorong kebutuhan perumahan untuk karyawan meningkat.

Pada tahun 2017, Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) mencapai sekitar 44.000 unit. Ditargetkan pemugaran 1000 RTLH tiap tahun sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Sumber dana dari APBD, DAK, dan juga kontribusi dari CSR. Tahun 2017, sebanyak 86 RTLH diperbaiki dari APBD sebesar Rp 1,3 miliar. Sedangkan dari DAK sebesar Rp 5,19 miliar untuk perbaikan 346 unit RTLH, juga dari CSR sebanyak Rp 1,5 miliar.



Pendistribusian energi listrik dari rumah ke rumah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dari data PLN Wonogiri, jumlah pelanggan listrik menurut kecamatan di kabupaten Wonogiri dari tahun 2012 sampai 2016 mengalami peningkatan. Pada 2012 terdapat 222.404 pelanggan, 2013; 230.399 pelanggan, meningkat ke pada 2014 menjadi 244.689, sedangkan 2015; 252.892 pelanggan dan 2016; 255.174 pelanggan dengan daya terpasang sebanyak 210.115.205 watt (VA) dan listrik terjual sebanyak 164.037.711 KWh. Adapun untuk air, pada tahun 2016 terdapat 30.410 rumah tangga telah teraliri air dari PDAM Wonogiri dengan jumlah air yang tersalurkan sebanyak 5.437.609 m³.

2.1.4 Energi.

Kabupaten Wonogiri memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar, yaitu sumber daya air. Bentang alam Wonogiri yang terdiri dari beberapa pegunungan dan juga berada di sisi selatan pulau Jawa yang langsung bersinggungan dengan pantai selatan, membuat Wonogiri memiliki penghasil energi listrik yang dapat diandalkan, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air yang dihasilkan dari Waduk yang merupakan hulu dari sungai Bengawan Solo.

Tabel
Table

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, 2012–2016
Number of Registered Electricity Costumers by Subdistrict in Wonogiri Regency, 2012–2016

Kecamatan Subdistrict	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Probanteran	14.331	14.479	14.401	15.346	16.382
2. Karangpundi	4.186	3.483	3.987	4.106	5.685
3. Gontaran	3.851	4.520	5.316	6.177	5.185
4. Cawas	9.264	9.152	9.052	9.280	8.647
5. Butowarno	4.136	4.258	2.849	2.931	4.514
6. Karangtengah	3.317	3.694	4.266	5.104	4.921
7. Tirtomoyo	9.876	10.897	11.260	10.823	11.511
8. Nguntaman	6.055	6.473	7.051	6.715	6.555
9. Batursari	12.018	12.325	18.268	18.607	12.995
10. Trimoka	10.674	10.775	10.701	11.005	12.057
11. Wuryantoro	7.498	7.626	8.871	7.051	7.984
12. Mangatan	8.080	8.286	8.517	8.773	8.321
13. Selogiri	10.056	10.473	12.905	13.332	10.819
14. Wonogiri	23.206	21.826	21.240	21.843	26.976
15. Kajoran	13.554	13.290	13.527	13.986	14.643
16. Sidoharjo	9.495	8.100	8.171	8.216	8.769
17. Jatiroto	8.663	8.701	8.527	8.861	9.075
18. Kemanaran	5.204	5.579	6.057	6.217	7.415
19. Purwantera	9.254	10.157	11.776	11.543	12.187
20. Bulukerto	8.231	6.616	6.917	7.347	7.776
21. Punpelem	7	2.902	1.054	1.367	3.468
22. Slogohimo	9.112	11.138	11.540	12.120	12.210
23. Jatsirana	14.115	15.639	16.045	16.548	17.856
24. Jatsirong	7.647	7.284	7.535	7.859	8.073
25. Girimayu	9.521	10.210	10.446	10.785	11.160
Jumlah/Total	222.404	230.399	244.689	252.892	255.174

Tabel No. 2.5
Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2012-2016

2.1.5 Pos dan Telekomunikasi

Perkembangan layanan telekomunikasi telah pula membantu Kabupaten Wonogiri untuk bisa mendapatkan layanan telekomunikasi yang baik. PT. Telekomunikasi Indonesia telah menempatkan satu kantor layanan. Dengan STO (Sentral Telepon Otomatis) berkapasitas lebih dari 3000 nomor, masih didukung dengan ekspansi operator seluler, layanan telekomunikasi telah mampu dinikmati. Hampir semua operator (Telkomsel, Excelcom, Indosat) telah memasang perangkat BTS (Base Transceiver Station) di pusat kota Wonogiri. Telkomsel telah merambah beberapa kota kecamatan, disusul juga BTS dari Smartfren.

Tabel No. 2.6
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan
di Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2016

Tabel Table		Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, 2013–2016 Number of Auxiliary Post Office by Subdistrict in Wonogiri Regency, 2013–2016			
Kecamatan Subdistrict		2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kratonadipin	1	1	1	1
2	Parunggunipin	1	1	1	1
3	Genteng	1	1	1	1
4	Botowiryo	1	1	1	1
5	Katungiryo	1	1	1	1
6	Katungiryo	1	1	1	1
7	Tetomayan	1	1	1	1
8	Nguntaronadi	1	1	1	1
9	Bahuretha	1	1	1	1
10	Eromoko	1	1	1	1
11	Wuryantono	1	1	1	1
12	Manyikan	1	1	1	1
13	Selogo	1	1	1	1
14	Wonogiri	1	1	1	1
15	Ngapiryo	1	1	1	1
16	Seloharjo	1	1	1	1
17	Jatiroto	1	1	1	1
18	Kimandharo	1	1	1	1
19	Purwantono	1	1	1	1
20	Bulukerto	1	1	1	1
21	Potopon	1	1	1	1
22	Slogoharjo	1	1	1	1
23	Jatiroto	1	1	1	1
24	Jatipurno	1	1	1	1
25	Grimarta	1	1	1	1

2.1.6 Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, variabel-variabel seperti jumlah gedung sekolah, jumlah murid dan jumlah guru seringkali ditampilkan untuk menggambarkan situasi pendidikan. Misalnya dua variabel di atas dapat digunakan untuk menghitung rasio murid-guru.

Pada tahun ajaran 2015/ 2016, Kabupaten Wonogiri memiliki gedung sekolah sebanyak 966 sekolah yang terdiri atas 766 Sekolah Dasar (SD), 35 Madrasah Ibtidaiyah, 116 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), 23 Madrasah Tsanawiyah, 21 Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 5 Madrasah Aliyah.

Selama tahun ajaran 2015/ 2016, jumlah murid SD sebanyak 75.063 orang, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 4.669 orang, SLTP sebanyak 37.068 orang, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3.859, SMA sebanyak 8.942 orang dan Madrasah Aliyah sebanyak 923 orang.

Jumlah guru yang mengajar di masing-masing sekolah pada tahun 2015/ 2016 ini terdiri atas 7.413 orang guru Sekolah Dasar, 375 orang guru Madrasah Ibtidaiyah, 3.239 orang guru SLTP, 495 orang guru Madrasah Tsanawiyah, 806 orang guru SMA dan 138 orang guru Madrasah Aliyah.

Tabel No. 2.7
 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis Kelamin,
 Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi Sekolah
 di Kabupaten Wonogiri
 Tahun 2016

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah <i>Sex and School Age Group</i>	Partisipasi Sekolah/ <i>School Participation</i>		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>Not/Never Attending School</i>	Masih Sekolah <i>Attending School</i>	Tidak Sekolah Lagi <i>Not Attending School Anymore</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-laki/Male			
7-12	0,75	99,25	0,00
13-15	0,00	97,26	2,74
16-18	0,00	78,80	21,20
19-24	2,25	71,87	25,88
Perempuan/Female			
7-12	1,38	98,62	0,00
13-15	0,00	95,84	4,16
16-18	0,00	64,02	35,98
19-24	1,22	57,04	41,75
Laki-laki+Perempuan/Male+Female			
7-12	1,00	99,04	0,00
13-15	0,00	97,99	2,01
16-18	0,00	73,12	26,88
19-24	1,74	64,46	33,80

Sumber: Survei Sosial-Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun 2016

2.1.7 Kesehatan

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan posyandu adalah sebagian dari variabel-variabel yang dapat menunjukkan pencapaian pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Pada tahun 2016, jumlah rumah sakit sebanyak 9 unit. Fasilitas kesehatan lainnya seperti puskesmas ada 34 unit dan poskesdes ada 230 unit.

Tabel No. 2.8
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016

Tabel
Table

Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Wonogiri, 2016
Number of Health Facilities by Sub Districts in Wonogiri
Regency, 2016

Kecamatan Subdistrict	Rumah Sakit Hospital	Rumah Seriwah Maternity Hospital	Puskesmas Public Health Center	Posyandu Maternal & Child Health Center	คลินิก/BCU Kesehatan Clinic/Health Center	Poskesdes Village Sanctuary
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Karanganyar	1	-	2	170	-	26
2. Karanganyar	-	-	-	11	-	8
3. Karanganyar	-	-	1	1	-	6
4. Karanganyar	-	1	2	132	2	14
5. Karanganyar	-	1	1	1	-	6
6. Karanganyar	-	-	1	65	1	7
7. Karanganyar	-	-	2	205	7	10
8. Karanganyar	-	-	2	69	-	11
9. Karanganyar	-	-	2	137	6	11
10. Karanganyar	-	-	2	95	1	10
11. Karanganyar	-	-	1	18	-	7
12. Karanganyar	-	-	1	64	-	7
13. Karanganyar	5	-	1	77	5	12
14. Karanganyar	1	3	2	65	11	12
15. Karanganyar	1	1	1	105	6	8
16. Karanganyar	-	1	1	71	1	10
17. Karanganyar	-	-	1	57	1	8
18. Karanganyar	-	-	1	60	-	7
19. Karanganyar	-	1	2	75	1	13
20. Karanganyar	-	1	1	65	3	8
21. Karanganyar	-	1	1	70	-	9
22. Karanganyar	1	-	1	72	2	10
23. Karanganyar	-	1	2	77	3	12
24. Karanganyar	-	-	1	57	1	8
25. Karanganyar	-	1	1	95	1	7
Wonogiri	9	12	34	1830	46	230

Sumber/Sources: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri/Health Office of Wonogiri Regency.

2.1.8 Agama

Jumlah agama yang ada di Wonogiri meliputi 5 agama yaitu Islam, Katholik, Kristen, Budha dan Hindu. Diantara kelima agama tersebut, islam mempunyai penganut terbanyak.

Tabel No. 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016

Tabel
Table Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang
Dianut di Kabupaten Wonogiri, 2016
*Population by Subdistrict and Religion in Wonogiri Regency,
2016*

	Kecamatan Subdistrict	Islam Islam	Protestan Christian	Katolik Catholic	Hindu Hindu	Budha Buddha	Lainnya Other
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pracimantoro	23.813	211	213	-	4	-
2	Paranglupito	18.730	57	63	-	-	-
3	Guntungan	23.888	11	476	-	-	-
4	Girwoyo	39.607	152	1.400	-	235	-
5	Batuwarno	18.393	147	-	-	-	-
6	Karanglunguh	24.786	3	-	-	-	-
7	Tirtomoyo	13.407	703	763	1	2	-
8	Nyuntoronadi	28.706	1.622	2.194	7	6	2
9	Baturetna	44.863	431	2.180	-	-	-
10	Promoko	45.817	1.017	164	-	3	1
11	Waryantoro	26.668	675	271	4	14	-
12	Manyanan	40.895	749	648	10	295	-
13	Selogiri	59.394	416	379	-	11	-
14	Wonogiri	80.732	3.074	2.435	14	87	-
15	Ngadirejo	65.721	424	1.037	1	6	-
16	Sidoharjo	47.119	767	731	-	-	-
17	Jatiroto	43.773	130	63	-	25	6
18	Kusmantoro	40.604	143	23	-	9	8
19	Purwantoro	62.022	484	31	2	3	-
20	Budakerto	38.001	601	-	-	-	-
21	Pulpelem	21.839	390	21	-	8	1
22	Sloketemo	57.773	690	68	5	14	-
23	Jatikanoro	63.062	761	110	14	42	-
24	Jatipurno	39.767	75	24	4	36	2
25	Cimarta	50.471	802	153	-	464	-
	Wonogiri	1.113.450	14.145	13.358	63	1.804	70

Sumber/Source: Kabupaten Agama dan Statistik, Kabupaten Wonogiri, Office of Wonogiri Regency

2.1.9 Sosial dan Budaya

Wonogiri merupakan sebuah Kabupaten yang terdiri dari banyak pegunungan dan persawahan sehingga mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani disawah maupun di kebun.

Tradisi dan adat kebudayaan Jawa di sini masih sangat di lestarikan dan di nguri-nguri oleh masyarakatnya. Hal tersebut dapat terlihat pada saat upacara pernikahan di wonogiri masih menggunakan adat Jawa yang masih kental belum ada perubahan sama sekali, meskipun ada beberapa dari masyarakat yang berada di wonogiri bagian kota yang sudah modern, sehingga pada saat upacara pernikahannya tidak menggunakan adat Jawa lagi atau sudah dihilangkan dari kehidupannya.


Selain itu juga dapat terlihat pada saat malam 1 suro ini, masyarakat masih melaksanakan tradisi secara turun temurun, yaitu pada saat malam 1 muharam semua masyarakat membuat nasi tumpeng yang berasal dari nasi guruh kemudian di taruh di sebuah baskom dan disamping nasi tersebut terdapat ayam ingkung yaitu ayam jawa yang dimasak dengan kuah kuning yang belum dipotong menjadi bagian kecil-kecil, sehingga masih utuh seperti wujud aslinya. Kemudian makanan tersebut dibawa ke sesepuh desa untuk mendapatkan doa-doa, dengan tujuan hidup kita tetap diberikan rezeki, kesehatan dan kehidupan yang aman, tenteram dan damai.

Di Wonogiri juga ada adat tradisi ngruwat, yaitu sebuah tradisi yang dipersyaratkan kepada orang-orang. Selain tradisi diatas masih banyak lagi tradisi kebudayaan Jawa di wonogiri antara lain :

1. Selamatan orang meninggal
2. Mauludan Nabi Muhammad SAW
3. Isra' miraj
4. Tradisi bersih desa
5. Gotong royong
6. Kuningan (selamatan lahirnya anak sapi)
7. Syukuran kelahiran anak
8. Mitoni dan tingkeban
9. Maleman pada saat bulan puasa
10. Dan lain-lain

Selain beragam budayanya, Wonogiri juga memiliki banyak makanan yang khas antara lain : cabuk, gudheg, gulai kambing, tempe benguk, emping, nasi tiwul, dan masih banyak lagi.

Wonogiri juga terkenal dengan tempat pariwisatanya, salah satu tempat rekreasi yang menjadi pilihan berberapa keluarga untuk berlibur yaitu Waduk Gajah Mungkur karena di tempat ini banyak sekali wahana permainan yang dapat digunakan oleh anak-anak dan pastinya mereka akan senang di tempat ini lantaran bisa melihat berbagai macam binatang yang di lindungi di tempat ini. Selain itu bagi orang dewasa juga dapat menikmati waduk tersebut dengan menggunakan kapal yang telah di sediakan di tempat tersebut. Di Waduk Gajah Mungkur juga banyak penjual ikan dengan berbagai jenisnya, udang, dan berbagai pernik-pernik hiasan yang dapat digunakan oleh wisatawan sebagai oleh-oleh untuk keluarga dirumah.



2.1.10 Pariwisata

Di Kabupaten Wonogiri terdapat banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi. Baik wisata spiritual, petualangan, wisata pantai, wisata alam dan lain sebagainya. Di antaranya objek wisata Waduk Gajah Mungkur, Wisata Pantai Nampu & Wisata Gantole. Terdapat sebuah situs bersejarah bernama "Kahyangan" di Desa Dlepih, Tirtomoyo, yang jaraknya sekitar 47 km dari ibu kota Kabupaten Wonogiri.

Dari Kota Wonogiri, pengunjung bisa naik bus dari Terminal Induk dan naik minibus dari dekat Ponten (dekat Kantor Badan Pertanahan), jurusan Tirtomoyo. Dari Tirtomoyo, bisa naik angdes jurusan Kahyangan atau Sukarjo. Sampai sekarang belum ada angdes yang bisa masuk sampai Kahyangan, sehingga harus dilanjutkan jalan kaki sekitar 1 Km. Pengunjung berkendara bisa langsung sampai ke tempat parkir Kahyangan. Wilayah Kahyangan dulunya merupakan sentra batik tulis, yang produknya banyak disetorkan ke Solo, untuk diproses lanjut. Banyak warga desa yang bergerak di bidang yang berhubungan dengan batik, baik sebagai pembatik, pembuat patron, pemasok kain mori. Akan tetapi, seiring dengan diperkenalkannya teknik pembuatan genting press, yang hasilnya cepat diperoleh, maka semakin lama industri batik semakin tergeser.



Gambar No. 2.8

Jumlah Wisatawan di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2012-2016

2.1.11 Industri dan Perdagangan

Bila dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Wonogiri pada tahun 2016, Kecamatan Selogiri memiliki jumlah perusahaan paling banyak dalam industri besar dan sedang yaitu sebesar 3 unit dengan tenaga kerja 702 orang.

Tabel No. 2.10
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut
Kecamatan di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2016

Tabel
Table Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi
Menurut Kecamatan di Kabupaten Wonogiri, 2016
*Number of Establishment, Employees, and Production Value
by Subdistrict in Wonogiri Regency, 2016*

	Kecamatan Subdistrict	Perusahaan Establishments	Tenaga Kerja Employee	Nilai Produksi (Ribuan Rupiah) Production Value (Thousand Rupiahs)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pracimantoro	2	70	
2	Paranggupito	-	-	
3	Condontra	-	-	
4	Girirejo	-	-	
5	Batuwaru	-	-	
6	Karangtengah	-	-	
7	Tirtomoyo	2	70	
8	Najasmoro	-	-	
9	Batiretno	-	-	
10	Trirenggo	-	-	
11	Wiryantoro	-	-	
12	Majayana	1	34	
13	Selogiri	3	702	
14	Wonogiri	-	-	
15	Ngadirojo	-	-	
16	Seloharjo	1	955	
17	Jatiroto	1	50	
18	Kemantoro	-	-	
19	Purwantoro	-	-	
20	Bukitene	-	-	
21	Purpanem	1	60	
22	Sigoharjo	-	-	
23	Jatirobo	1	75	
24	Batipurno	-	-	
25	Girimarto	-	-	

2.1.12 Kondisi Ekonomi

2.1.12.1Keuangan Daerah

Pendapatan pemerintah Kabupaten Wonogiri pada 2016 sebesar 2.035,056 milyar. Nilai ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yang sebesar 1.963,704 milyar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2016 yang diperoleh yaitu 218,604 milyar dimana penyumbang terbesar adalah PAD lain senilai 152,8 milyar. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum sebesar 1.145,434 milyar. Sedangkan realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada 2016 sebesar 2.132,909 milyar. Nilai belanja terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan nilai 1.104,67 milyar.

Tabel No. 2.11
 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut
 Jenis Pendapatan (ribu rupiah)
 Tahun 2015-2016

Tabel Table	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Wonogiri Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2015–2016 <i>Actual Revenues of Government of Wonogiri Regency by Source of Revenues (thousand rupiahs), 2015–2016</i>		
	Jenis Pendapatan Source of Revenues	2015	2016
	(1)	(2)	(3)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Original Local Government Revenue	211.708.601,70	218.604.834,60
1.1	Pajak Daerah/Local Taxes	11.985.686,10	34.831.059,22
1.2	Retribusi Daerah/Contributions	18.593.203,65	19.256.730,55
1.3	Hasil Pengelolaan Mula Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Diserahkan kepada Regional Gov./Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth	10.839.252,06	11.126.125,65
1.4	Lain-lain PAD yang Sah/Other Original Local Gov. Revenue	150.290.664,11	152.806.739,17
2.	Dana Perimbangan/Balanced Budget	1.146.100.682,06	1.470.168.316,26
2.1	Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing	22.080.141,11	34.231.013,49
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non Tax/Natural Resources Sharing	1.509.546,95	1.120.922,80
2.3	Dana Alokasi Umum/General Allocation Funds	1.031.393.472,00	1.143.434.222,00
2.4	Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Funds	86.112.520,00	289.121.067,98
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Legal Revenue	606.395.255,42	346.283.344,51
3.1	Pendapatan Hibah/Grants	2.508.871,15	8.080.293,65
3.2	Dana Darurat/Emergency Funds		
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax sharing from province and other local governments	102.295.243,62	99.994.425,86
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/ Autonomous Region and Balancing Funds	437.896.092,00	192.177.235,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/financial assistance from province and other local governments	63.605.048,65	45.424.890,00
3.6	Lainnya/Other Funds		
	Jumlah/Total	1.963.704.538,73	2.035.056.535,37

2.1.12.2 Harga-harga

Tabel No. 2.12
 Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok Pengeluaran
 di Kabupaten Wonogiri
 Tahun 2016

Tabel Table	Indeks Harga Konsumen per bulan Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Wonogiri, 2016 <i>Monthly Consumer Price Index by Expenditure Group in Wonogiri Regency, 2016</i>				
	Bulan Month	Bahan Makanan Foodstuff	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau Prepared Food, Beverages, and Tobacco Product	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Housing, Water, Electricity, Gas, and Fuel	Sandang Clothing
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Januari/January	130,02	127,13	110,02	121,64
	Februari/February	128,63	126,84	110,12	122,63
	Maret/March	132,13	127,34	110,20	122,94
	April/April	129,46	129,54	110,14	122,88
	Mei/May	131,51	131,04	110,10	124,08
	Juni/June	133,69	131,49	110,69	124,29
	Juli/July	146,62	141,92	110,69	124,68
	Agustus/August	133,81	131,04	110,93	124,65
	September/September	134,01	136,74	110,15	126,85
	Oktober/October	134,20	130,81	110,17	126,62
	November/November	138,86	130,52	110,12	126,65
	Desember/December	139,99	130,45	110,16	126,31

Lanjutan Tabel/Continued Tabel

Bulan Month	Kesehatan Health	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga Education, Recreation, and Sports	Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan Transport, Communication, and Financial Services	Umum General
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari/January	114,40	112,73	123,22	120,43
Februari/February	114,36	112,87	122,50	120,09
Maret/March	114,03	112,87	122,27	120,80
April/April	114,60	114,06	120,48	120,64
Mei/May	115,26	113,69	120,89	121,46
Jun/June	115,49	114,38	120,73	122,13
Juli/July	115,49	113,54	121,64	122,83
Agustus/August	115,49	115,10	122,20	122,45
September/September	115,99	115,76	122,23	122,47
Oktober/October	115,98	115,13	122,23	122,45
November/November	116,56	115,13	122,75	123,33
Desember/December	117,12	115,10	122,82	123,38

Sumber/Source: Survei Harga Konsumen/Consumer Price Survey

2.1.12.3Pendapatan Regional

Untuk wilayah Kabupaten Wonogiri, pertumbuhan ekonominya menampakkan adanya peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonominya mencapai 4,78 persen, sedangkan tahun 2015 pertumbuhannya menjadi 5,40 persen. Namun di tahun 2016 pertumbuhannya menurun menjadi 5,22 persen.

Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2016 adalah sektor jasa Keuangan dan Asuransi dengan pertumbuhan yang mencapai 10,82 persen. Diikuti oleh sektor Jasa Perusahaan yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,98 persen.

Tabel No. 2.13
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga
 Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri (juta rupiah)
 Tahun 2013-2016

Tabel Table		Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Wonogiri (juta rupiah), 2013-2016 <i>Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Industry in Wonogiri Regency (million rupiahs), 2013-2016</i>			
	Lapangan Usaha Industry	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6 320 637,12	6 732 283,94	7 259 771,63	7 649 332,97
B	Pertambangan dan Penggalian	551 517,47	632 906,91	734 015,34	772 118,27
C	Industri Pengolahan	2 539 161,46	2 992 863,89	3 341 910,75	3 724 359,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11 362,22	12 074,76	13 352,81	15 770,89
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12 078,04	13 311,82	14 230,36	14 845,00
F	Konstruksi	1 100 419,54	1 258 557,11	1 406 892,29	1 522 220,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2 849 141,75	3 107 736,69	3 369 835,35	3 629 970,13
H	Transportasi dan Pergudangan	968 261,34	1 146 078,95	1 290 692,24	1 369 383,51
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	400 881,05	445 559,13	493 976,24	553 745,54
J	Informasi dan Komunikasi	129 789,62	146 792,90	157 859,81	171 647,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	520 230,13	584 851,34	650 712,72	744 223,07
L	Real Estate	125 783,03	143 588,27	160 544,22	173 751,45
M,N	Jasa Perusahaan	62 746,79	72 275,04	82 448,36	94 560,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	542 299,82	598 746,09	660 471,04	709 591,17
P	Jasa Pendidikan	1 053 508,35	1 241 626,95	1 354 563,38	1 497 249,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	156 450,62	183 675,56	206 955,50	228 846,87
R,S,T,U	Jasa lainnya	296 722,15	345 307,26	374 193,56	409 516,62
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Bruto		17 640 990,52	19 668 236,61	21 572 475,62	23 251 134,37

BAB III

PENGKAJIAN KEBUTUHAN PEMULIHAN PASCABENCANA

Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan masyarakat pada seluruh aspek sosial dan ekonomi, membutuhkan pengkajian yang memadai atas dampak bencana berupa kerusakan dan kerugian aset-aset penghidupan, deprivasi hak-hak dasar, ketergangguan proses kemasyarakatan dan kenegaraan serta meningkatnya risiko karena menurunnya kapasitas dan meningkatnya kerentanan pascabencana.

Pengumpulan bukti-bukti dampak bencana diatas dilakukan melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasna) yang merupakan metode yang digunakan untuk pendekatan kajian akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pasca bencana. Jitu Pasna dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renaksi) membantu pemerintah dan para pemangku kepentingan menyusun kebijakan, program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berlandaskan pada informasi akurat dari para pihak yang terdampak bencana.

Dengan demikian Jitu Pasna merupakan basis bagi penyusunan dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pendekatan Jitu Pasna yang partisipatif dan berbasis pada data akan mampu mendukung penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang baik.

Jitu Pasna menggunakan kerangka pandang yang menyeluruh terhadap kebutuhan manusia dan masyarakat untuk pulih dari bencana. Jitu Pasna mengakui keseluruhan aspek kehidupan manusia dan masyarakat, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Tujuannya agar upaya-upaya pemulihan pasca bencana berorientasi pada pemulihan harkat dan martabat manusia secara utuh, yang tertuang pada komponen dan lingkup Jitu Pasna.

h.

Kajian Jitu Pasma akan memandu para pihak dengan menyajikan tiga komponen informasi penting untuk pemulihan pascabencana, yaitu:

1. pengkajian akibat bencana
2. pengkajian dampak bencana; dan
3. pengkajian kebutuhan pasca bencana

Komponen-komponen dalam Jitu Pasma diatas memiliki kesaling-terhubungan dalam rangka memandu proses penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi maupun untuk melakukan upaya pemulihan pasca bencana.

Hubungan antara komponen pengkajian akibat bencana, pengkajian dampak bencana dan pengkajian kebutuhan pasca bencana nampak pada diagram di bawah ini.



Gambar No. 3.1
Kerangka Pengkajian Kebutuhan Pascabencana
dan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Perkiraan kebutuhan pemulihan dalam Jitu Pasma berorientasi pada pemetaan kebutuhan untuk pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut :

1. Kebutuhan pemulihan awal adalah kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan pasca bencana yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kebutuhan rehabilitasi adalah kebutuhan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
3. Sedangkan kebutuhan rekonstruksi adalah kebutuhan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.

Dengan demikian, komponen pembangunan, penggantian, penyediaan akses, pemulihan proses dan pengurangan resiko harus dipilah-pilah dalam kerangka pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Berikut ini adalah tabel komponen perkiraan kebutuhan dalam Jitu Pasma.

Tabel No. 3.1.
Komponen Perkiraan Kebutuhan

Komponen	Keterangan
1	2
Pembangunan	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengkajian resiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam perkiraan kebutuhan pasca bencana.

Komponen	Keterangan
1	2
Pembangunan	Kebutuhan pembangunan bertujuan untuk memulihkan kerusakan infrastruktur pemerintah, masyarakat, keluarga dan badan usaha setelah terjadi bencana. Pembangunan kembali ini harus mengutamakan prinsip pembangunan kembali yang lebih tahan bencana sehingga pengkajian resiko bencana wajib menjadi pertimbangan dalam perkiraan kebutuhan pasca bencana.
Stimulasi	Kebutuhan stimulasi bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi sebagai akibat dari bencana. Penggantian juga harus berorientasi pada perbaikan besaran-besaran ekonomi dalam jangka panjang sehingga harus efektif, efisien dan berkelanjutan.
Penyediaan Akses	Kebutuhan penyediaan akses bertujuan untuk memulihkan akses masyarakat terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, jaminan sosial, perumahan, budaya, pekerjaan, kependudukan dan lain-lain. Penyediaan ini harus dilakukan dalam rangka pemulihan sistem pelayanan kebutuhan dasar yang ada.
Pemulihan Proses	Kebutuhan pemulihan proses merupakan pemulihan awal yang bertujuan untuk menjalankan kembali proses pemerintahan dan kemasyarakatan. Misalnya, pemulihan proses kemasyarakatan seperti pemulihan organisasi RT dan RW, kelompok posyandu, kelompok tani dan organisasi berbasis masyarakat lainnya.
Pengurangan Resiko	Kebutuhan pengurangan resiko meliputi kebutuhan mencegah dan melemahkan ancaman, kebutuhan mengurangi kerentanan terhadap bencana dan kebutuhan meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana di masa datang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan pemulihan awal dan kebutuhan pemulihan jangka panjang untuk merespon peningkatan resiko akibat bencana.

Lingkup pengkajian kebutuhan pasca bencana dan renaksi mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pedoman ini mengarahkan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi ke dalam enam aspek, yakni kemanusiaan, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas sektor.

Tabel No. 3.2.
Substansi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Aspek	Keterangan
Perumahan dan Pemukiman	Aspek perumahan dan permukiman, terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
Infrastruktur Pembangunan	Aspek infrastruktur pembangunan, antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, peningkatan fungsi pelayanan publik dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
Ekonomi	Aspek ekonomi, antara lain terdiri dari pemulihan sosial ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata dan perbankan
Sosial	Aspek sosial antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
Lintas Sektor	Aspek lintas sektor antara lain terdiri dari pemulihan aktivitas/kegiatan yang meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup

h

3.1. Kajian Akibat Bencana

3.1.1 Kronologi Kejadian Bencana

Kejadian bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri pada tanggal 28 Nopember 2017 telah merusak permukiman, infrastruktur, fasilitas sosial, ekonomi dan lainnya yang terletak di 23 (dua puluh tiga) wilayah kecamatan di Kabupaten Wonogiri.

Data Grafik dan Distribusi Curah Hujan (GIS dan GsMAP), berdasarkan pengukuran curah hujan (diukur dalam mm) menggunakan penakar hujan obs di sebagian Pos Pengamat Curah Hujan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah berupa pos hujan kerjasama dapat terlihat dalam Tabel 1, dapat dijelaskan bahwa curah hujan di beberapa pos hujan pengamatan terukur dengan intensitas curah hujan

Hujan Sangat Lebat (> 100 mm/hari) sampai ekstrim (> 150 mm/hari) pengukuran curah hujan tanggal 28–29 November 2017 (kejadian hujan tanggal 27 –28 November 2017) bertepatan dengan aktifnya Siklon Tropis Cempaka di Selatan Jawa Tengah (Samudera Hindia Selatan). Kejadian curah hujan tertinggi pada pengukuran curah hujan tanggal 29 November 2017 (kejadian hujan tanggal 28 November 2017) dengan curah hujan ekstrim >150 mm/hari di 6 titik pos hujan, curah hujan sangat lebat > 100 mm di 5 titik pos hujan dan curah hujan ekstrim tertinggi dasarian 3 November 2017 di 1 titik pos hujan yaitu Giritontro Kabupaten Wonogiri sebesar 320 mm/hari.

Sedangkan pengukuran curah hujan tanggal 28 November 2017 (kejadian hujan tanggal 27 November 2017) dengan curah hujan ekstrim >150 mm/hari di 1 titik pos hujan, curah hujan sangat lebat > 100 mm di 3 titik pos hujan dan curah hujan lebat >50 mm di 2 titik pos hujan.

Akumulasi Curah hujan dari tanggal 27-28 Nopember 2017 tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan banjir, tanah longsor dan angin topan 2017.

Analisis Perubahan Penggunaan Penutup Lahan, bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan informasi yang terdiri dari:

1. Data kependudukan yang meliputi jumlah penduduk pada tahun 2007-2011 yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wonogiri .
2. Data jumlah petani di masing-masing kecamatan dan desa diperoleh dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar
3. Peta-peta dasar, seperti peta jaringan jalan, peta kontur, peta jaringan sungai dan peta administratif yang diperoleh dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:25.000 dalam format digital
4. Peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2005 dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo Distribusi spasial tekanan penduduk terhadap lahan di Sub DAS Keduang disajikan pada Gambar 5. Pada gambar tersebut, terlihat bahwa sebagian besar wilayah Sub DAS Keduang memiliki nilai TP sedang (warna kuning). Tetapi berdasarkan penghitungan formula TP yang terinci dalam Rumus 1, 2, 3 dan 4 nilai TP di Sub DAS Keduang adalah 28.978,16 dan masuk dalam kategori jelek. Besarnya nilai tersebut disebabkan banyaknya wilayah kecamatan yang tidak 100% masuk ke dalam wilayah Sub Das Keduang (Tabel 1). Hal ini berakibat pada penghitungan akhir formula TP, karena parameter kependudukan yang digunakan berasal dari data perkecamatan dan belum ada data kependudukan berdasarkan batas DAS atau Sub DAS.

3.1.2. Upaya Penanganan Darurat dan Pemulihan Awal

Banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 4 orang meninggal, 2 orang luka berat dan sebanyak 2.584 jiwa pengungsi tersebar di 3 (tiga) lokasi penampungan yang telah ditentukan dan sebagian lainnya tersebar di rumah keluarga.

Dalam merespon banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri, kegiatan dan upaya-upaya yang telah dilakukan pada masa penanganan tanggap darurat antara lain :

- a. Pendirian Posko Tanggap Darurat untuk mengevakuasi dan menampung pengungsi, pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan *cash for work* untuk pengungsi, pembersihan dari lumpur untuk lahan pertanian dan rumah yang terendam, jalan, distribusi air bersih, MCK, dapur umum serta penyaluran layanan kesehatan.
- b. Rapat evaluasi harian di Posko Tanggap Darurat yang dikomando oleh Dandim 0723 Kabupaten Wonogiri, dihadiri seluruh SKPD serta elemen-elemen yang terkait, seperti Relawan-relawan berbagai unsur, organisasi masyarakat, serta komunitas peduli masyarakat.
- c. Pelaksanaan kegiatan selama tanggap darurat antara lain adalah: pencarian korban hanyut, pembersihan puing dan sampah, pengamanan, perbaikan/pemulihan fungsi jalan, jembatan dan saluran air bersih.
- d. Penyaluran bantuan masa tanggap darurat oleh BNPB berupa pakaian dan perlengkapan sekolah, lauk pauk dan makanan siap saji serta Dana Siap Pakai sebesar Rp.200 juta.
- e. Pengelolaan berbagai bantuan yang datang dari instansi pemerintah, pemerintah propinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten Wonogiri, swasta, sumbangan masyarakat, ormas, dan pihak lainnya.

- f. Penyediaan bantuan lain berupa makanan, pakaian, peralatan mandi, tempat tidur, layanan kesehatan, layanan pendidikan, maupun *trauma healing* pada korban terdampak.
- g. Pelaksanaan upaya penanganan darurat bencana banjir, tanah longsor dan angin topan oleh Kementerian/Lembaga dari sektor terdampak antara lain: BNPB, Kemensos, Kemenkes, Kemenhub, Kemenpora, Kemen LHK, TNI/Polri, Basarnas, dan BMKG.
- h. Pembersihan material longsor yang menutup akses transportasi dengan menggunakan alat berat.

3.2. Penilaian Akibat dan Dampak Bencana

Bencana Banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri yang terjadi menimbulkan dampak kerusakan baik sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lainnya di wilayah Kabupaten Garut. Kerusakan paling parah adalah pada sektor perumahan mencapai 557 unit (RB=144 unit, RS=403 unit, Terancam Longsor = 507 unit). Skala kerusakannya cukup besar karena topografi medan yang berupa lereng, sehingga banyak rumah yang mengalami longsor atau rusak akibat gerakan tanah. Sebagian juga diakibatkan oleh terjangan arus deras luapan sungai yang terjadi hampir disetiap sungai yang menuju Waduk Gajah Mungkur Wonogiri.

3.2.1. Sektor Permukiman

3.2.1.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Kerusakan pada sektor permukiman sub sektor perumahan sebagaimana dalam Nota Dinas Laporan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri tanggal : 2 Januari 2018 perihal : Laporan Hasil Finalisasi Data Dampak Bencana Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Nopember 2017, mencapai 557 unit rumah, baik rumah dengan konstruksi permanen,

semi permanen maupun non permanen. Kecamatan yang populasi rumahnya mengalami kerusakan paling banyak adalah Kecamatan Tirtomoyo sebanyak 58 unit rumah dan populasi rumah yang mengalami kerusakan paling sedikit adalah Kecamatan Ngadirojo sebanyak 2 unit rumah.

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah yang berupa mebelair dan peralatan lainnya. Berdasarkan data kondisi kerusakan rumah dapat diuraikan sebagai berikut : rumah kondisi rusak berat sebanyak 144 unit diakibatkan dampak tanah longsor, kerusakannya berupa : runtuhnya kolom, pondasi sehingga rumah ambruk, dinding tertimpa material. Sebagian lagi kerusakan diakibatkan oleh terjangan arus deras luapan air sungai. Kerusakan berupa : rumah hanyut diakibatkan terbawa arus sungai yang sangat deras dengan debit sungai dan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Rumah kondisi rusak sedang sebanyak 403 unit diakibatkan dampak tanah longsor. Kerusakannya berupa komponen struktur utama bangunan sebagian kecil rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih tetap berdiri, diantara kerusakan pintu kusen dan jendela hancur. Adapun sebagian lagi kerusakan disebabkan oleh aliran banjir yang menjebol dinding rumah, mengikis pondasi dan tertimbun lumpur dan material sampah. Rumah kondisi terancam tanah longsor sebanyak 507 unit. Hal ini disebabkan oleh adanya gerakan tanah atau terjadinya retakan tanah diatas perbukitan, sehingga dalam kondisi cuaca ekstrem dngan curah hujan tinggi menjadi sangat berbahaya untuk dijadikan tempat bermukim.

Rekapitulasi kerusakan sektor perumahan berdasarkan kategori tingkat kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan disajikan dalam Tabel No. 3.3.

Pada sub sektor perumahan, banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri menyebabkan kerusakan sebesar Rp. 39.076.800.000,- dan kerugian mencapai Rp. 2.315.750.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 41.392.550.000,-. Angka tersebut diperoleh dari penilaian kerusakan pada komponen bangunan rumah sebesar Rp. 34.742.700.000,- dan penilaian kerusakan isi rumah yang berupa mebelair dan peralatan lainnya sebesar Rp. 3.131.500.000,-. Penilaian kerugian yang terjadi pada sub sektor perumahan adalah akibat timbulnya biaya untuk pembersihan material sampah-sampah bangunan dan lumpur yang bercampur dengan air hujan, serta pemberesan puing-puing rumah dengan asumsi pembersihan dilakukan oleh tenaga manusia, biaya upah setempat serta lama waktu pembersihan yang dilakukan dengan nilai kerugiannya mencapai Rp. 1.111.500.000,-.

Pada sub sektor prasarana lingkungan, banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri menyebabkan kerusakan sebesar Rp. 3.369.600.000,- dan kerugian mencapai Rp. 148.750.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 3.518.350.000,-. Secara umum, banjir, tanah longsor dan angin topan tersebut menimbulkan kerusakan pada prasarana lingkungan pemukiman berupa drainase, benteng (tembok), MCK, sumur umum dan jalan lingkungan di kecamatan terdampak bencana. Selain itu, di enam kecamatan yang terkena dampak bencana banjir bandang, terdapat beberapa titik terendam dan merusak bangunan yang menimbulkan kerugian akibat keperluan untuk pembersihan dari genangan sampah dan lumpur pada kawasan tersebut yang diperlukan untuk pembersihan dari genangan sampah dan lumpur pada kawasan tersebut.

Tabel No. 3.3
Kerusakan Rumah Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017

No	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			Satuan
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Giriwoyo	1	11	-	Unit
2	Tirtomoyo	30	34	397	Unit
3	Eromoko	5	28	3	Unit
4	Jatiroto	4	26	2	Unit
5	Nguntoronadi	19	58	-	Unit
6	Wonogiri	2	2	-	Unit
7	Karangtengah	49	224	35	Unit
8	Sidoharjo	4	5	-	Unit
9	Manyaran	3	1	15	Unit
10	Giritontro	6	8	2	Unit
11	Kismantoro	4	16	-	Unit
12	Batuwarno	7	10	-	Unit
13	Ngadirojo	1	2	-	Unit
14	Slogohimo	2	3	-	Unit
15	Paranggupito	3	-	1	Unit
16	Pracimantoro	3	20	2	Unit
17	Selogiri	1	3	-	Unit

Banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri pada sektor permukiman menimbulkan kerusakan sebesar Rp. 39.076.800.000,- dan kerugian mencapai Rp. 2.315.750.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 41.392.550.000,-. Angka tersebut terdiri dari sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan.

Tabel No. 3.4
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Permukiman
Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten
Wonogiri Tahun 2017

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Kerusakan & Kerugian (Rp)
1	Perumahan	35.707.200.000	2.167.000.000	37.874.200.000
2	Prasarana Lingkungan	3.369.600.000	148.750.000	3.518.350.000
Jumlah		39.076.800.000	2.315.750.000	41.392.550.000

3.2.1.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Meningkatnya Risiko

Gangguan Akses

Pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan memberi dampak masalah perumahan pada masyarakat di wilayah kecamatan terdampak. Sebagian masyarakat mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di tempat pengungsian ataupun menumpang pada tempat saudara di luar kawasan yang terkena dampak bencana.

Masyarakat yang mengungsi sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan wiraswasta. Bagi para korban yang berprofesi sebagai petani, bila lokasi bertani dan berkebun jauh dari tempat tinggal mereka melebihi radius 2-5 km, maka akses masyarakat ke lokasi tempat bertani dan berkebun menjadi semakin jauh dan menambah waktu perjalanan menuju tempat kerja.

Gangguan Fungsi

Bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menyebabkan kerusakan pada komponen bangunan rumah, seperti : pintu, jendela, dinding, penutup atap, ataupun bangunan roboh/runtuh, hanyut, rumah yang hanya terendam genangan sampah dan lumpur serta isi rumah berupa mebelair dan peralatan lainnya. Hal ini terjadi pada perumahan masyarakat di wilayah terdampak bencana.

Secara bagian besar kerusakannya pada fisik struktur bangunan untuk rusak sedang dan ringan tidak menunjukkan kerusakan yang berarti hanya terdapat kerusakan pada kusen, daun pintu, dinding, namun masyarakat membutuhkan tenaga untuk membersihkan endapan sampah dan lumpur yang diakibatkan banjir dan tanah longsor. Namun masih banyak terdapat rumah masyarakat yang hanyut dan roboh yang dikategorikan rusak berat.

Dengan kondisi rumah runtuh/ roboh, rumah hanyut dan bagian rumah yang terendam, maka pada sebagian besar rumah penduduk berisikan sampah puing-puing rumah, kayu dan genangan lumpur akibat banjir yang menyebabkan fungsi rumah sebagai tempat tinggal sangat terganggu dan tidak dapat berfungsi, serta rumah dapat sewaktu-waktu ambruk.

Meningkatnya risiko

Banjir, tanah longsor dan angin topan pada sektor permukiman di wilayah terdampak yang tidak dapat dihuni kembali, untuk segera dicarikan relokasi bagi masyarakat di sepanjang bantaran sungai. Hal ini disebabkan karakteristik dari lereng dan sungai serta dampak dari ketidakstabilan tanah yang berdampak dari ketidaksesuaian pemanfaatan lahan oleh masyarakat yang mempunyai kepentingan tersendiri yang tidak memikirkan dampaknya bagi masyarakat disepanjang bantaran sungai datau dilereng perbukitan.

3.2.1.3. Kajian Dampak Bencana

Kerusakan pada sektor permukiman yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah yang berupa mebelair dan peralatan lainnya akibat bencana memberikan dampak langsung terhadap aset bangunan rumah yang sama sekali hancur dan tidak dapat ditempati kembali serta aset bangunan rumah yang masih bisa dipulihkan/ diperbaiki.

Untuk korban terdampak yang rumah tinggalnya rusak dan tidak dapat ditempati ataupun berada di daerah berbahaya terjadinya bencana banjir atau longsor susulan selanjutnya mengungsi dari lokasi tersebut dan tinggal di tempat pengungsian, menumpang pada tempat saudara ataupun menyewa rumah di luar kawasan yang terkena dampak bencana.

Dampak lainnya yang tidak langsung, diantaranya hambatan produktivitas akibat aset yang rusak/hilang akibat bencana, seperti potensi pendapatan yang berkurang, pengeluaran yang bertambah dan lain-lain selama beberapa waktu.

3.2.2. Sektor Infrastruktur

3.2.2.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir, tanah longsor dan angin topan akibat siklon cempaka di Kabupaten Wonogiri pada sub sektor transportasi darat, energi, air dan sanitasi, dan sumber daya air (SDA). Pada sub sektor transportasi darat, banjir, tanah longsor dan angin topan menyebabkan kerusakan pada beberapa bagian ruas jalan kabupaten, jalan lingkungan, jembatan kabupaten, jembatan lingkungan dan kendaraan hanyut, sebagaimana disajikan pada Tabel No. 3.5.

Tabel No. 3.5
Kerusakan Sub Sektor Transportasi
Pasca Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan Tahun 2017

No	Sarana/Prasarana	Data Kerusakan			Satuan
		Berat	Seda ng	Ringan	
1	Jembatan	25			Lokasi
2	Talud	132			Lokasi

Kerusakan sub sektor energi dan air dan sanitasi terjadi pada daerah terdampak banjir, tanah longsor dan angin topan merusak jaringan listrik dan sarana air bersih. Jaringan listrik yang mengalami kerusakan akibat luapan banjir bandang yang membawa materi lumpur setelah turunnya hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan rusaknya jaringan listrik di Kecamatan Karangtengah, Tirtomoyo dan Pracimantoro. Sedangkan sarana prasarana air bersih

yang terdampak banjir bandang terdapat pada beberapa kecamatan yaitu Karangetngah, Tirtomoyo, Kismantoro, Jatiroto, Manyaran, Pracimantoro, Eromoko, Giritontro, Giriwoyo dan Batuwarno, sebagaimana disajikan pada Tabel No. 3.6.

Tabel 3.6
Kerusakan Sub Sektor Energi dan Sarana Air Bersih
Pasca Bencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2017

No	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			Satuan
		Berat	Sedang	Ringan	
1	Tiang Listrik se-Kab Wonogiri	15			Batang
2	Sarana Air Bersih se-Kab Wonogiri	1			Paket

Kerusakan sub sektor sumber daya air (SDA) pada sungai dan sub daerah aliran sungai (DAS) pada daerah terdampak banjir, tanah longsor dan angin topan di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel No. 3.7.

Tabel No. 3.7
Kerusakan Sub Sektor Sumber Daya Air
Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan Tahun 2017

No	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			Satuan
		Berat	Sedang	Ringan	
1	2	3	4	5	6
1	Check Dam Dsn Josari, Jimbar	40			M
2	Irigasi Dsn Bendungan Jimbar	20			M
3	Embung Watangrejo		40		M
4	Irigasi Desa Trukan	100			M
5	Saluran Desa Suci	20			M
6	Embung Suruhan gambirmanis		2.000		M2

No	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			Satuan
		Berat	Sedang	Ringan	
1	2	3	4	5	6
7	Tebing sungai Wiroko Ds Wiroko	200			M
8	Irigasi Jurangkuwung, Sindukarto		25		M
9	Irigasi Dawungan	65			M
10	Dam Sanggrong, Jatiroto	22			M

Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri pada sektor infrastruktur menimbulkan kerusakan sebesar Rp. 19.877.500.000,- dan kerugian mencapai Rp. 6.112.835.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 25.990.335.000,-. Angka tersebut terdiri dari kerusakan dan kerugian pada sub sektor transportasi, energi, air dan sanitasi dan sumber daya air. Secara rinci penilaian kerusakan dan perkiraan kerugian sektor infrastruktur bisa dilihat dalam Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Infrastruktur
Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2017

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Kerusakan & Kerugian (Rp)
1	Transportasi	17.755.000.000	4.145.335.000	21.900.335.000
2	Energi	67.500.000	15.000.000	82.500.000
3	Sumber Daya Air	1.555.000.000	430.000.000	1.985.000.000
4	Pos dan Telekomunikasi	250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000
5	Air dan Sanitasi	250.000.000	22.500.000	272.500.000
Jumlah		19.877.500.000	6.112.835.000	25.990.335.000

Berdasarkan tabel diatas, sub sektor transportasi darat mengalami dampak terbesar dibandingkan dengan sub sektor lainnya. Kerusakan yang terjadi pada sub sektor sumber daya air berupa rusaknya beberapa sungai dan sub DAS serta irigasi.

3.2.2.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Meningkatnya Resiko

Gangguan Akses

Gangguan akses yang terjadi karena kerusakan pada sub sektor transportasi adalah kehilangan hak akses terhadap prasarana transportasi sebagai kebutuhan dasar perpindahan manusia dan barang di lingkungan perdesaan dan perkotaan. Pada sub sektor SDA menyebabkan petani kehilangan hak akses pengairan untuk persawahan sebagai kebutuhan dasar mata pencaharian.

Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi karena kerusakan aset pada sub sektor transportasi mengakibatkan terganggunya fungsi transportasi untuk sementara waktu. Kerusakan aset pada sub sektor SDA mengakibatkan terganggunya fungsi pengairan persawahan untuk sementara waktu.

Meningkatnya Resiko

Kerusakan aset sub sektor transportasi akibat kondisi jalan dan jembatan yang rusak menyebabkan meningkatnya resiko kerusakan kendaraan. Kerusakan pada sub sektor SDA mendorong meningkatnya resiko bencana banjir, kerentanan penyakit, serta mengakibatkan penurunan produksi pertanian dan kerentanan ekonomi masyarakat.

3.2.2.3. Kajian Dampak Bencana

Infrastruktur merupakan sarana penting dalam menunjang mobilitas aktivitas sosial dan ekonomi penduduk. Terjadinya

bencana banjir, tanah longsor dan angin topan mengakibatkan rusaknya berbagai infrastruktur yang mengakibatkan aktivitas masyarakat terganggu dan secara tidak langsung berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.

Pada subsektor transportasi darat, bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menimbulkan dampak rusaknya sejumlah jalan dan jembatan di Kabupaten Wonogiri. Sebanyak 152 ruas jalan di wilayah Kabupaten Wonogiri mengalami kerusakan/gangguan lalu lintas. Terdapat 25 lokasi jembatan yang mengalami kerusakan/gangguan.

Pada sub sektor energi ketenagalistrikan, bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menimbulkan dampak rusaknya jaringan listrik beberapa wilayah kecamatan diantaranya adalah tiang distribusi listrik roboh. Pada sub sektor Air dan Sanitasi, bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menimbulkan dampak rusaknya bangunan fisik pipa-pipa pengambilan air bersih yang mengakibatkan terputusnya saluran air bersih kepada pelanggan dan mendorong adanya pengeluaran untuk pengiriman air bersih selama tanggap darurat.

Pada sub sektor sumber daya air, bencana banjir, tanah longsor dan angin topan dampak rusaknya 2 sungai kewenangan BBWS Bengawan Solo. Kondisi tersebut berdampak pada tidak berfungsi sejumlah saluran irigasi, bendung dan intake sehingga air sungai tidak dapat mengalir sesuai dengan alur dan fungsinya. Juga adanya kerusakan pada dam, saluran drainase dan embung.

Tabel No. 3.10
Kerusakan Sub Sektor Pertanian Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan
Angin Topan di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2017

No	Sarana/ Prasarana	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			Satuan
			Berat	Sedang	Ringan	
1	Padi Sawah	Se-Kab Wonogiri	607,97	-	-	Ha
2	Padi Gogo	Se-Kab Wonogiri	251,50	-	-	Ha
3	Jagung	Se-Kab Wonogiri	399,77	-	-	Ha
4	Kacang Tanah	Se-Kab Wonogiri	37,00	-	-	Ha
5	Ubi Kayu	Se-Kab Wonogiri	50,00	-	-	Ha
6	Cabai	Se-Kab Wonogiri	25,00	-	-	Ha
7	Melon	Se-Kab Wonogiri	2,00	-	-	Ha

Dalam Tabel 3.10 terlihat dampak kerusakan terbesar akibat banjir bandang dialami pada sub sektor pertanian yaitu kerusakan pada lahan pertanian/sawah 607,97 Ha. Selain itu, infrastruktur penunjang pertanian yang juga terkena oleh dampak banjir, tanah longsor dan angin topan di wilayah Kabupaten Wonogiri, antara lain : dam/embung/bendung sebanyak 14 lokasi dan saluran/drainase sebanyak 22 lokasi. Kondisi ini mengakibatkan petani mengalami kerugian besar disebabkan gagal panen.

Banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri juga berdampak pada sub sektor peternakan dan perikanan yaitu dengan mati dan hilangnya ternak sapi (13 ekor), kambing/domba (78 ekor) dan unggas (266) ekor. Data kerusakan peternakan dan perikanan dapat dilihat dalam Tabel No. 3.11.

h

Tabel No. 3.11
Kerusakan Sub Sektor Peternakan Pascabencana Banjir, Tanah Longsor
dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2017

No	Sarana/ Prasarana	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			Satuan
			Berat	Sedang	Ringan	
1	Sapi	Se-Kab Wonogiri	13	-	-	Ekor
2	Domba	Se-Kab Wonogiri	78	-	-	Ekor
3	Unggas	Se-Kab Wonogiri	266	-	-	Ekor

Pada sub sektor pertanian, peternakan dan perkebunan, jumlah nilai kerugian mencapai Rp. 22.038.284.500,-, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 22.038.284.500,-.

Kerusakan pada sektor ekonomi terjadi juga pada sub sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM. Kegiatan ekonomi masyarakat berupa kegiatan produksi, transaksi jual beli barang dan jasa setelah terjadinya banjir, tanah longsor dan angin topan terhenti. Untuk sub sektor perdagangan terdapat kerusakan pada 1.150 unit toko dan warung yang tidak dapat berdagang selama beberapa hari, dengan jumlah kerugian mencapai Rp. 2.875.000.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 2.875.000.000,-.

Pada sub sektor industri terdapat kerugian akibat tidak adanya produksi dan penjualan atau pengiriman barang-barang. Hal ini disebabkan akses jalan yang terhambat karena kerusakan prasarana transportasi darat. Akibat dari banjir, tanah longsor dan angin topan ini menimbulkan kerugian mencapai Rp. 3.750.000.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 3.750.000.000,-.

Pada sub sektor pariwisata terdapat kerusakan sarana obyek wisata, yaitu OW Kahyangan dan OW Museum Karts. Juga timbul kerugian akibat tidak adanya pendapatan retribusi wisatawan dan penjualan

dari pedagang di kompleks obyek wisata. Akibat dari banjir, tanah longsor dan angin topan ini menimbulkan kerusakan sebesar Rp. 300.000.000,- dan nilai kerugian mencapai Rp. 210.000.000,-, sehingga total kerusakan dan kerugian mencapai Rp. 510.000.000,-.

Data kerusakan dan kerugian pada sub sektor perdagangan, perindustrian dan pariwisata, sebagaimana dapat di lihat pada Tabel No. 3.12.

Tabel No. 3.12

Kerusakan Sub Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2017

No	Sarana/ Prasarana	Lokasi Kecamatan	Data Kerusakan			Satuan
			Berat	Sedang	Ringan	
A	Perdagangan					
1	Toko	Se-Kab Wonogiri	1.150	-	-	Unit
B	Perindustrian					
1	Industri Genteng	Tirtomoyo	250	-	-	Unit
2	Industri Crushing	Tirtomoyo	1	-	-	Unit
C	Pariwisata					
1	OW Kahyangan	Tirtomoyo	1	-	-	Unit
2	OW Museum Karst	Pracimantoro	1	-	-	Unit

Penilaian kerusakan pada sektor ekonomi dilakukan terhadap aset berupa aset fisik di subsektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri kecil menengah, koperasi dan UKM serta dampak kerugian yang ditimbulkannya. Nilai kerusakan dihitung menggunakan pendekatan persamaan tingkat kerusakan kali harga satuan kali volume kerusakan. Sedangkan kerugian pada sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM

serta industri dihitung berdasarkan potensi hilangnya pendapatan atau penurunan produksi, dan biaya yang dikeluarkan untuk pembersihan material.

Dari hasil perhitungan, maka nilai kerusakan dan kerugian di sektor ekonomi meliputi sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM serta industri adalah kerusakan sebesar Rp. 300.000.000,- dan kerugian sebesar Rp. 28.873.284.500,- sehingga total perkiraan kerusakan dan kerugian pada sektor ekonomi sebesar Rp. 29.173.284.500,-. Ringkasan perkiraan kerusakan dan kerugian sektor ekonomi disajikan pada tabel No. 3.13.

Tabel No. 3.13
Perkiraan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Sektor Ekonomi
Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2017

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Kerusakan & Kerugian (Rp)
1	Pertanian, Peternakan, Perkebunan	-	22.038.284.500	22.038.284.500
2	Perikanan	-	-	-
3	Perdagangan	-	2.875.000.000	2.875.000.000
4	Perindustrian	-	3.750.000.000	3.750.000.000
5	Pariwisata	300.000.000	210.000.000	510.000.000
6	Koperasi dan UKM	-	-	-
Jumlah		300.000.000	28.873.284.500	29.173.284.500

3.2.4.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Meningkatnya Resiko

Gangguan Akses

Gangguan akses dalam bidang ekonomi berupa terganggunya akses individu dan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar karena transaksi jual beli barang dan jasa terhent. Biasanya masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan dasar sebelum bencana, tetapi sesudah terjadi bencana sulit diperoleh dan akses terhadap mata pencaharian menjadi terganggu.

Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi dalam bidang ekonomi berupa terganggunya fungsi kelembagaan organisasi kelompok ekonomi yang ada di masyarakat seperti kelompok tani dan organisasi simpan pinjam (koperasi, *credit union*).

Meningkatnya Risiko

Gangguan akses berupa sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar dan gangguan fungsi kelembagaan organisasi usaha ekonomi masyarakat, koperasi dan kelompok tani mengakibatkan meningkatnya risiko berupa turunnya daya beli masyarakat yang berdampak pada melambatnya laju perekonomian, sehingga dapat mendorong resiko meningkatnya angka kemiskinan.

3.2.4.3. Kajian Dampak Bencana

Pada sektor ekonomi dampak bencana terjadi di sub bidang Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan Perindustrian.

Pada subsektor pertanian, bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menyebabkan rusaknya lahan pertanian, jaringan irigasi dan jalan usaha tani yang berdampak pada potensi pendapatan yang

✓

hilang akibat menurunnya produksi panen dan adanya pengeluaran untuk pembersihan bagi korban terdampak.

Pada subsektor peternakan dan perikanan, bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menyebabkan mati dan hilangnya hewan ternak sapi, domba, unggas dan ikan yang berdampak pada potensi pendapatan yang hilang akibat menurunnya produksi ternak dan hilangnya aset usaha ekonomi masyarakat.

Pada subsektor perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Industri, bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menyebabkan rusaknya bahan baku, barang dagang serta peralatan usaha masyarakat yang berdampak pada potensi pendapatan yang hilang akibat, aset yang hilang serta kegiatan produksi, transaksi jual beli barang dan jasa setelah terjadinya banjir, tanah longsor dan angin topan.

3.2.5. Lintas Sektor

3.2.5.1. Penilaian Kerusakan dan Kerugian

Tidak terdapat kerusakan pada lintas sektor, namun menimbulkan kerugian karena aktifitas pemerintahan yang terganggu. Kerugian pada lintas sektor mencakup sub sektor pemerintahan, keuangan perbankan, ketertiban, keamanan dan lingkungan hidup. Kerugian diakibatkan terhentinya pelayanan masyarakat akibat akses jalan yang terputus dan kegiatan tanggap darurat yang melibatkan perangkat pemerintahan. Data kerugian pada lintas sektor dapat dilihat pada Tabel 3.15 di bawah ini:

Secara keseluruhan, penilaian kerusakan akibat banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri pada lintas sektor diperkirakan sebesar Rp. 25.000.000,- sehingga total kerusakan dan kerugian sebesar Rp.25.000.000,-, dengan rincian terlihat dalam Tabel No. 3.14.

Tabel No. 3.14
 Penilaian Kerusakan dan Perkiraan Kerugian Lintas Sektor
 Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
 di Kabupaten Wonogiri
 Tahun 2017

No	Sektor/Sub Sektor	Nilai Kerusakan (Rp)	Nilai Kerugian (Rp)	Kerusakan & Kerugian (Rp)
1	Pemerintahan	-	25.000.000	25.000.000
2	Keamanan dan Ketertiban	-	-	-
3	Keuangan dan Perbankan	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	-	-	-
	Jumlah Lintas Sektor	-	25.000.000	25.000.000

3.2.5.2. Gangguan Akses, Gangguan Fungsi dan Meningkatnya Risiko

Gangguan Akses

Gangguan akses sub sektor pemerintahan adalah pada terganggunya akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan di kantor kecamatan.

Gangguan Fungsi

Gangguan fungsi sub sektor pemerintah adalah karena saat terjadi bencana, banyak kegiatan dan pelayanan publik pemerintahan terganggu, maka diperlukan optimalisasi waktu untuk melaksanakan kegiatan dan penyelesaian pelayanan masyarakat.

Meningkatnya Risiko

Dalam menghadapi bencana banjir, tanah longsor dan angin topan, masyarakat memerlukan penyediaan informasi tentang kondisi rawan bencana di wilayah yang ditempati, wacana untuk relokasi hunian/rumah, pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

b

3.2.5.3. Kajian Dampak Bencana

Pada lintas sektor dampak bencana terjadi di sub bidang Pemerintahan. Pada subsektor pemerintahan, bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menyebabkan terhambatnya akses menuju kantor pemerintahan, yang berdampak pada terganggunya kegiatan pelayanan publik.

3.3. KAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA

Berdasarkan analisis terhadap kerusakan dan kerugian serta dampak pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan yang meliputi sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial, dan lintas sektor, diperkirakan total kebutuhan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp. 60.597.496.620,- . Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri tersebut diperuntukkan bagi sektor permukiman sebesar Rp. 22.908.829.620,- (37,80%), sektor infrastruktur sebesar Rp. 27.684.263.000,- (45,69%), sektor sosial sebesar Rp. 1.947.025.000,- (3,21%), sektor ekonomi sebesar Rp. 7.957.379.000,- (13,13%), dan lintas sektor sebesar Rp. 100.000.000,- (0,17%).

Tabel No. 3.15
Rekapitulasi Penilaian Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Prosentase
1	2	3	4
1	SEKTOR PERMUKIMAN	22.908.829.620	37,80 %
1	Sub Sektor Perumahan	21.908.829.620	36,15 %
2	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	1.000.000.000	1,65 %

No	Sektor/Sub Sektor	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Prosentase
1	2	3	4
II	SEKTOR INFRASTRUKTUR	27.684.263.000	45,69 %
1	Sub Sektor Transportasi	15.980.972.000	26,37 %
2	Sub Sektor Energi	100.000.000	0,17 %
3	Sub Sektor Sumber Daya Air	11.253.291.000	18,57 %
4	Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi	250.000.000	0,41 %
5	Sub Sektor Air dan Sanitasi	100.000.000	0,17 %
III	SEKTOR SOSIAL	1.947.025.000	3,21 %
1	Sub Sektor Kesehatan	163.000.000	0,27 %
2	Sub Sektor Pendidikan	1.539.025.000	2,54 %
3	Sub Sektor Agama	245.000.000	0,40 %
4	Sub Sektor Lembaga Sosial	-	0,00 %
IV	SEKTOR EKONOMI	7.957.379.000	13,13 %
1	Sub Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	2.675.000.000	4,41 %
2	Sub Sektor Perikanan	500.000.000	0,83 %
3	Sub Sektor Perdagangan	282.379.000	0,47 %
4	Sub Sektor Perindustrian	-	0,00 %
5	Sub Sektor Pariwisata	4.500.000.000	7,43 %
6	Sub Sektor Koperasi dan UKM	-	0,00 %
V	LINTAS SEKTOR	100.000.000	0,17 %
1	Pemerintahan	-	0,00 %
2	Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	-	0,00 %
3	Keuangan dan Perbankan	-	0,00 %
4	Lingkungan Hidup	100.000.000	0,17 %
	JUMLAH TOTAL	60.597.496.620	100,00 %

Secara terinci kebutuhan masing-masing sektor akan diuraikan sebagai berikut :

3.3.1. Kebutuhan Pascabencana Sektor Permukiman

Secara umum kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan terhadap masyarakat terdampak dan memiliki ancaman resiko bencana.

3.3.1.1. Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Perumahan

Pengkajian kebutuhan pascabencana sub sektor perumahan dilakukan berdasarkan data Kerusakan pada sektor permukiman sub sektor perumahan sebagaimana dalam Nota Dinas Laporan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Wonogiri tanggal : 2 Januari 2018 perihal : Laporan Hasil Finalisasi Data Dampak Bencana Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Nopember 2017, mencapai 557 unit rumah, baik rumah dengan konstruksi permanen, semi permanen maupun non permanen. Kecamatan yang populasi rumahnya mengalami kerusakan paling banyak adalah Kecamatan Tirtomoyo sebanyak 58 unit rumah dan populasi rumah yang mengalami kerusakan paling sedikit adalah Kecamatan Ngadirojo sebanyak 2 unit rumah.

Berdasarkan jenis kerusakan yang terjadi pada komponen bangunan rumah dan kerusakan isi rumah yang berupa mebelair dan peralatan lainnya. Berdasarkan data kondisi kerusakan rumah dapat diuraikan sebagai berikut : rumah kondisi rusak berat sebanyak 144 unit diakibatkan dampak tanah longsor, kerusakannya berupa : runtuhnya kolom, pondasi sehingga rumah ambruk, dinding tertimpa material. Sebagian lagi keruskan diakibtakan oleh terjangan arus deras luapan air sungai. Kerusakan berupa : rumah hanyut diakibatkan terbawa arus sungai yang sangat deras dengan debit sungai dan intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Rumah kondisi rusak sedang sebanyak 403 unit diakibatkan dampak tanah longsor. Kerusakannya berupa komponen struktur utama bangunan sebagian kecil rusak, dan komponen penunjang rusak namun bangunan masih

h

tetap berdiri, diantara kerusakan pintu kusen dan jendela hancur. Adapun sebagian lagi kerusakan disebabkan oleh aliran banjir yang menjebol dinding rumah, mengikis pondasi dan tertimbun lumpur dan material sampah. Rumah kondisi terancam tanah longsor sebanyak 507 unit. Hal ini disebabkan oleh adanya gerakan tanah atau terjadinya retakan tanah diatas perbukitan, sehingga dalam kondisi cuaca ekstrem dngan curah hujan tinggi menjadi sangat berbahaya untuk dijadikan tempat bermukim.

Pemulihan pascabencana pada sub sektor perumahan diarahkan pada penyediaan hunian tetap terhadap korban terdampak yang dilakukan melalui penyediaan perumahan Pola Pemberdayaan Masyarakat. Total kebutuhan pacabencana sub sektor perumahan untuk penyediaan hunian tetap korban bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri mencapai sebesar Rp. 22.908.829.620,- yang terdiri dari kebutuhan penyediaan lahan sebesar Rp. 2.039.405.000,-, kebutuhan pembangunan rumah huntap di desa Dlepih sebesar Rp. 13.366.288.000,-, huntap di desa kepuhsari sebesar Rp. 1.343.356.000,-, bantuan stimulan rehab rumah sebesar Rp. 3.382.500.000,-, perencanaan pembangunan huntap sebesar Rp. 294.187.120,-, pengawasan pembangunan huntap sebesar Rp. 147.093.500,-, bantuan sewa rumah sementara sebesar Rp. 1.336.000.000,-. Rekapitulasi penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sub sektor perumahan disajikan dalam Tabel No. 3.16.

Tabel No. 3.16
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Perumahan
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5
A	Sub Sektor Perumahan			21.908.829.620
1	Lahan huntap	2	Lokasi	2.039.405.000
2	Bangunan huntap desa Dlepih	284	Unit	13.366.288.000
3	Bangunan huntap desa Kepuhsari	19	Unit	1.343.356.000
4	Stimulan perbaikan rumah	1	Se-Kab Wng	3.382.500.000
5	Perencanaan huntap	303	Unit	294.187.120
6	Pengawasan huntap	303	Unit	147.093.500
7	Sewa rumah sementara	1	Se-Kab Wng	1.336.000.000

3.3.1.2. Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Prasarana Lingkungan

Pada sektor permukiman, kebutuhan prioritas lainnya pada sub sektor prasarana lingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang akan dipergunakan untuk perbaikan prasarana lingkungan yang rusak, antara lain : jalan lingkungan, sumber air bersih dan Sanitasi, Penataan Kawasan Terdampak, Perbaikan Kualitas Lingkungan, Jalan lingkungan, Drainase, Masjid Lingkungan Relokasi dan PJU.

Rekapitulasi penilaian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sub sektor prasarana lingkungan disajikan dalam Tabel No. 3.17.

Tabel No. 3.17
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Prasarana Lingkungan
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Satuan	
B	Sub Sektor Prasarana Lingkungan			1.000.000.000
1	Prasarana lingkungan	1	Se-Kab Wng	1.000.000.000

Secara keseluruhan, perkiraan kebutuhan pascabencana sektor permukiman mencapai sebesar Rp. 22.908.829.620,- yang terdiri dari kebutuhan pascabencana sub sektor perumahan sebesar Rp. 21.908.829.620,- dan kebutuhan sub sektor prasarana lingkungan sebesar Rp. 1.000.000.000,- sebagaimana disajikan pada Tabel No. 3.18.

Tabel No. 3.18
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Perkiraan Kebutuhan (Rp)
1	Sub Sektor Perumahan	21.908.829.620,-
2	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	1.000.000.000,-
	Jumlah Sektor Perumahan	22.908.829.620,-

3.3.2. Kebutuhan Pascabencana Sektor Infrastruktur

Secara umum pemenuhan kebutuhan sektor infrastruktur adalah membangun kembali dengan kualitas lebih baik terhadap aset yang rusak pada sub sektor Transportasi, Energi, Air dan Sanitasi, dan

h

Sumberdaya Air. Perkiraan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur mencapai sebesar Rp. 27.684.263.000,-, sebagaimana disajikan pada Tabel No. 3.19.

Tabel No. 3.19
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Perkiraan Kebutuhan (Rp)
1	Sub Sektor Transportasi	15.980.972.000,-
2	Sub Sektor Energi	100.000.000,-
3	Sub Sektor Sumber Daya Air	11.253.291.000,-
4	Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi	250.000.000,-
5	Sub Sektor Air dan Sanitasi	100.000.000,-
	Jumlah Sektor Infrastruktur	27.684.263.000,-

3.3.2.1. Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Transportasi dan Energi

Prioritas dalam pemenuhan kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur pada kawasan yang terkena dampak bencana banjir bandang diantaranya adalah perbaikan/ pembangunan jalan dan jembatan serta pemasangan jaringan sambungan listrik. Total kebutuhan sektor infrastruktur pada sub sektor sarana transportasi sebesar Rp. 15.980.972.000,- untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pemulihan jalan dan jembatan. Total kebutuhan sub sektor energi sebesar sebesar Rp. 100.00.000,- untuk perbaikan jaringan distribusi dan sambungan listrik, dengan rincian pada Tabel No. 3.20.

Tabel No. 3.20
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Transportasi
dan Energi Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Satuan	
A	Sub Sektor Transportasi			15.980.972.000
1	Jalan	1	Se-Kab Wng	9.184.612.000
2	Jembatan	13	lokasi	6.796.360.000
B	Sub Sektor Energi			100.000.000
1	Energi (PLN)	1	Se-Kab Wng	100.000.000

3.3.2.2. Kebutuhan Pascabencana Sub sektor Air dan Sanitasi

Kebutuhan pemulihan sektor infrastruktur sub sektor air dan sanitasi pada daerah terkena dampak banjir, tanah longsor dan angin topan yaitu penyediaan kebutuhan air bersih dengan total kebutuhan sebesar Rp. 100.000.000,-, dengan rincian pada Tabel No. 3.21.

Tabel No. 3.21
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Air dan Sanitasi
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Satuan	
A	Sub Sektor Air dan Sanitasi			100.000.000
1	Air dan Sanitasi	1	Se-Kab Wng	100.000.000

3.3.2.3. Kebutuhan Pascabencana Sub sektor Sumber Daya Air

Kebutuhan sektor infrastruktur untuk sub sektor sumber daya air di luar relokasi diantaranya perbaikan pada Sungai Kewenangan BBWS Bengawan Solo, Sungai/Sub DAS kewenangan Kabupaten dan Saluran/ Daerah Irigasi.

Total kebutuhan sub sektor sumber daya air sebesar Rp. 11.253.291.000,- yang terdiri dari kebutuhan rehabilitasi sungai kewenangan BBWS Bengawan Solo sebesar Rp. 8.334.390.000,- rehabilitasi sungai/sub DAS dan irigasi kewenangan kabupaten sebanyak 4 lokasi sebesar Rp. 2.918.901.000,- dengan rincian pada Tabel No 3.22.

Tabel No. 3.22
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Sub Sektor Air, Sanitasi dan Sumber Daya Air Pancabencana Banjir,
Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Satuan	
A	Sub Sektor Sumber Daya Air			11.253.291.000
1	Kewenangan BBWS BS	4	lokasi	8.334.390.000
2	Kewenangan Kabupaten	4	lokasi	2.918.901.000

3.3.3. Kebutuhan Pascabencana Sektor Sosial

Dampak banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri pada sektor sosial meliputi sub sektor pendidikan, kesehatan dan agama membutuhkan total biaya sebesar Rp. 1.947.025.000,- dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel No. 3.23.

h

Tabel No. 3.23
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Perkiraan Kebutuhan (Rp)
1	Sub Sektor Kesehatan	163.000.000,-
2	Sub Sektor Pendidikan	1.539.025.000,-
3	Sub Sektor Agama	245.000.000,-
	Jumlah Sektor Sosial	1.947.025.000,-

3.3.3.1. Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Kesehatan

Kebutuhan rencana pembiayaan pascabencana sub sektor kesehatan membutuhkan biaya terbesar yaitu Rp. 163.000.000,- untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi bangunan berupa pondasi yang tergerus erosi dan sarana ., sebagaimana disajikan pada tabel No. 3.24.

Tabel No. 3.24
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Kesehatan
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan(Rp)
		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5
A	Sub Sektor Kesehatan			163.000.000
1	Rekonst Talud Pustu Ds. Pingkuk	1	Paket	50.000.000

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan(Rp)
		Volume	Satuan	
1	2	3	4	5
2	Rekonst Talud Pustu Ds. Pesido	1	Paket	55.000.000
3	Rekonst Talud Pustu Ds. Brenggolo	1	Paket	50.000.000
4	Sarpras Pustu Kel. Girikikis	1	Paket	8.000.000

3.3.3.2. Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Pendidikan

Kebutuhan penanganan pascabencana untuk sub sektor pendidikan digunakan untuk perbaikan ruang kelas dan sarana lainnya yang terkena dampak bencana pada jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan penyediaan Perlengkapan Sekolah, sebesar Rp. 1.539.025.000,-. Rincian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sub sektor pendidikan disajikan pada Tabel No. 3.25.

Tabel No. 3.25
 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Pendidikan
 Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
 di Kabupaten Wonogiri
 Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Sat	
1	2	3	4	5
A	Sub Sektor Pendidikan			1.539.025.000
1	Rekonst Talud SDN 1 Hargosari	108	M3	65.000.000
2	Rekonst Talud SDN 2 Sidorejo	36	M3	30.000.000

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Sat	
1	2	3	4	5
3	Sarpras SDN 1 Tameng	1	Paket	60.000.000
4	Rekonst Talud SDN 1 Karangtengah	206,4	M3	65.000.000
5	Rekonst Talud SDN 2 Karangtengah	24	M3	30.000.000
6	Rekonst Talud SDN 4 Karangtengah	81,6	M3	40.000.000
7	Rekonst Talud SMP 3 Satap Jatiroto	312	M3	414.000.000
8	Rekonst Talud SMP 2 Satap Tirtomoyo	86	M3	108.000.000
9	Rekonst Talud SMP 2 Kismantoro	144	M3	64.800.000
10	Rekonst Talud SMPN 1 Karangtengah	34	M3	51.000.000
11	Rekonst Gedung SMPN 2 Karangtengah	126	M3	511.225.000
12	Rehab Sarpras SMKN 2 Jatiroto	1	Paket	100.000.000

3.3.3.3. Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Agama

Kebutuhan penanganan pascabencana untuk untuk sub sektor agama digunakan untuk perbaikan tempat ibadah beserta sarananya sebesar Rp. 245.000.000,- dengan rincian kebutuhan dapat dilihat pada Tabel No. 3.26.

Tabel No. 3.26
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Agama
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Satuan	
A	Sub Sektor Agama			245.000.000
1	Masjid Keron, Wonogiri	1	Lokasi	35.000.000
2	Masjid Ngasem, Karangtengah	1	Lokasi	35.000.000
3	Masjid Jatirogo, Baturetno	1	Lokasi	35.000.000
4	Masjid Muning, Karangtengah	1	Lokasi	35.000.000
5	Masjid Masaran, Karangtengah	1	Lokasi	35.000.000
6	Masjid Ngumbul, Karangtengah	1	Lokasi	35.000.000
7	Masjid Bendungan, Kulurejo	1	Lokasi	35.000.000

3.3.4 Kebutuhan Pascabencana Sektor Ekonomi

Pemulihan ekonomi pada daerah terkena dampak bencana banjir, tanah longsor dan angin topan direncanakan akan dilaksanakan melalui sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, UKM dan perindustrian dan pariwisata dengan total kebutuhan sebesar Rp. 7.9579379.000,-, sebagaimana disajikan pada Tabel No. 3.27.

Tabel No. 3.27
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Perkiraan Kebutuhan (Rp)
1	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	2.675.000.000
2	Perikanan	500.000.000
3	Perdagangan	282.379.000
4	Perindustrian	0
5	Pariwisata	4.500.000.000
Jumlah Sektor Ekonomi		7.957.379.000

3.3.4.1. Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan.

Pemulihan akibat bencana pada sub sektor pertanian diarahkan pada sawah, budidaya jagung dan tanaman pertanian lainnya yang mengalami kerusakan. Kegiatan pemulihan ekonomi sub sektor pertanian akan dilaksanakan pada lahan pertanian dengan pemberian bantuan bibit dan pupuk serta obat-obatan pertanian dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 2.675.000.000,-, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel No. 3.28.

Tabel No. 3.28
 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Pertanian,
 Peternakan, Perkebunan Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin
 Topan di Kabupaten Wonogiri
 Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Sat	
A	Sub Sektor Pertanian, Peternakan dan Perkebunan			2.675.000.000
1	Bantuan bibit, pupuk dan obat-obatan	472	Ha	1.500.000.000
2	Bantuan ternak sapi	50	Ekor	750.000.000
3	Bantuan ternak kambing	150	Ekor	300.000.000
4	Bantuan ternak unggas	5000	Ekor	125.000.000

3.3.4.2. Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Perikanan

Rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub sektor perikanan dilakukan dengan kegiatan berupa bantuan pembuatan kolam dan bibit ikan. Nilai kebutuhan untuk kegiatan subsektor perikanan adalah Rp. 500.000.000,- sebagaimana disajikan pada Tabel No. 3.29.

Tabel No. 3.29
 Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Perikanan
 Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
 di Kabupaten Wonogiri
 Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Sat	
A	Sub Sektor Perikanan			500.000.000
1	Bantuan Pembuatan kolam dan benih ikan	10	Lokasi	500.000.000

h'

3.3.4.4 Kebutuhan Pascabencana Sub Sektor Perdagangan

Rehabilitasi dan rekonstruksi pada sub sektor perdagangan dilakukan dengan kegiatan berupa pembangunan kembali talud areal pasar desa temboro yang runtuh, dengan kebutuhan dana sebesar Rp. 282.379.000,- dengan rincian pada Tabel No. 3.30.

Tabel No. 3.30
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Perdagangan
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Sat	
A	Sub Sektor Perdagangan			282.379.000
1	Rekonst. Talud Pasar Desa Temboro	43,50	M3	282.379.000

3.3.5. Kebutuhan Pascabencana Lintas Sektor

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan untuk Lintas sektor yang diperuntukan bagi sub lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana, dalam upaya pemulihan kerusakan lahan dengan jumlah total kebutuhan lintas sektor sebesar Rp. 100.000.000,-. Adapun rekapitulasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Lintas Sektor disajikan pada Tabel No. 3.31.

Tabel No. 3.31
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Perkiraan Kebutuhan (Rp)
1	Pemerintahan	-
2	Keamanan dan Ketertiban	-
3	Keuangan dan Perbankan	-
4	Lingkungan Hidup	100.000.000
Jumlah Lintas Sektor		100.000.000

3.3.5.1 Kebutuhan Pascabencana Sub Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan untuk Lintas sektor yang diperuntukkan bagi sub sektor lingkungan hidup, dengan jumlah kebutuhan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk penanganan pemulihan kerusakan lahan melalui penghijauan dan mitigasi struktural skala kecil dan kampanye sadar lingkungan. Adapun rekapitulasi kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sub sektor lingkungan hidup disajikan pada Tabel No. 3.32.

Tabel No. 3.32
Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Lingkungan Hidup
Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
di Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sarana dan Prasarana	Data Kebutuhan		Perkiraan Kebutuhan (Rp)
		Volume	Satuan	
A	Sub Sektor Lingkungan Hidup			100.000.000
1	Lingkungan Hidup	1	Se-Kab Wng	100.000.000

1

BAB IV
PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri melalui BPBD Kabupaten Wonogiri dan difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan partisipasi dari Bappeda Kabupaten Wonogiri, SKPD Kabupaten Wonogiri yang terdampak, Kementerian/ Lembaga serta BPBD dan SKPD Provinsi Jawa Tengah. Proses penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana didasarkan pada hasil Penilaian Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana (Dala) serta Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Dala dan Jitu Pasma dilakukan melalui penilaian kerusakan dan kerugian akibat banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil Jitu Pasma dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemulihan wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, seperti APBD kabupaten dan APBD provinsi wilayah terdampak, APBN dan DIPA kementerian/lembaga yang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan organisasi pembangunan multilateral.

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti pascabencana banjir bandang, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri adalah :

1. Masyarakat korban bencana banjir, tanah longsor dan angin topan menginginkan pembersihan, perbaikan rumah dan perbaikan infrastruktur publik dengan segera;
2. Pemerintah Kabupaten dan BNPB bersama dengan Kementerian/Lembaga menugaskan tim pengkajian kebutuhan pascabencana sehingga hasilnya dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekostruksi pascabencana;
3. Identifikasi dan inventarisasi dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian/Lembaga;
4. Mempercepat upaya pemulihan penghidupan masyarakat di daerah relokasi untuk daerah terdampak bencana dengan sumber pembiayaan berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, BNPB dan Kementerian/Lembaga sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya;
5. Dalam upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan mitigasi kawasan rawan bencana.

4.1 Prinsip Dasar dan Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana pada prinsipnya merupakan upaya pemulihan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terdampak bencana pada

situasi yang lebih baik daripada sebelumnya. Perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Wonogiri Tahun 2010-2030;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021.

Pokok-pokok kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri meliputi :

1. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai sarana untuk membangun komunitas dan menstimulasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana;
2. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan, serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;
3. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
4. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman di daerah rawan bencana dengan prinsip *build back better and safer*
5. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis dan perizinan, termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat;
6. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama antarpihak lintas sektor, dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Dengan pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi periode tahun anggaran 2018 - 2020.

4.2 Ruang Lingkup Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi diperoleh dari penilaian kerusakan dan kerugian. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar perhitungan untuk mendapatkan perkiraan kebutuhan pemulihan pascabencana. Keterkaitan antara penilaian kerusakan dan kerugian dengan penilaian kebutuhan dapat memberikan umpan balik bagi kebutuhan pemulihan pascabencana dengan menempatkan masyarakat korban bencana dan lingkungannya sebagai sasaran pemulihan pascabencana.

Berdasarkan sektor dan subsektor yang mengalami kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir, tanah longsor dan angin topan, hampir seluruh sektor dan sub sektor terkena dampak. Oleh karena itu, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi sektor dan sub sektor yang terdampak, yaitu permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor. Pemulihan di setiap sektor dan subsektor ini berbasis pada mitigasi dan pengurangan risiko bencana dengan tujuan untuk meminimalkan kerugian yang akan timbul apabila terjadi kembali bencana pada masa mendatang.

1. Sektor Permukiman

Pemulihan sektor permukiman, meliputi sub sektor perumahan dan prasarana lingkungan, akan dilakukan dengan pembangunan



hunian tetap, pembangunan sarana MCK komunal yang bersumber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembangunan hunian tetap dengan pola pemberdayaan masyarakat, serta pemberian bantuan stimulan kepada pemilik rumah sesuai dengan tingkat kerusakan rumahnya berdasarkan hasil verifikasi kriteria kerusakan bangunan rumah berdasarkan ketentuan yang ada.

2. Sektor Infrastruktur

Pemulihan sektor infrastruktur meliputi perbaikan dan pembangunan kembali sarana dan prasarana vital yang mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian wilayah meliputi subsektor transportasi daerah, listrik, air bersih dan sumber daya air.

3. Sektor Ekonomi Produktif

Pemulihan sektor ekonomi meliputi subsektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM.

4. Sektor Sosial

Pemulihan sektor sosial meliputi pemulihan kehidupan sosial masyarakat pada sub sektor kesehatan, pendidikan, agama dan lembaga sosial

5. Lintas Sektor

Pemulihan lintas sektor meliputi sub sektor pemerintahan, ketertiban, keamanan, perbankan, lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana.

4.3. Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga terkait. Terkait tanggung jawab tersebut, dalam

rangka menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri, untuk melakukan penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan koordinasi penyusunan data dampak bencana serta Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Pascabencana Banjir, tanah longsor dan angin topan yang di koordinasikan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri. Hal-hal yang dilaksanakan dalam penyusunan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana yang dibagi kedalam sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi produktif, sektor sosial dan lintas sektor antara lain :

- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan penilaian, kerugian dan kebutuhan pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri;
- b. melakukan proses pengumpulan data penilaian, kerugian dan kebutuhan pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri;
- c. melakukan verifikasi data penilaian, kerugian dan kebutuhan pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri;
- d. melakukan pengolahan dan analisis data penilaian, kerugian dan kebutuhan pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan;
- e. melakukan pelaporan penilaian, kerusakan dan kerugian pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan;
- f. menyusun perkiraan kebutuhan pasca bencana banjir, tanah longsor dan angin topan;
- g. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri;



Berdasarkan hasil penilaian terhadap kerusakan, kerugian dan kebutuhan pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri yang telah dilakukan oleh Tim dimaksud dengan fasilitasi oleh BNPB, maka berikut ini diuraikan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk masing-masing sektor.

1. Sektor Permukiman

Pendataan awal kerusakan sektor permukiman dihimpun oleh setiap kecamatan terdampak bersumber dari laporan kerusakan dari para ketua RT, RW, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. Kemudian dilakukan finalisasi dan dilaporkan kepada Bupati Wonogiri melalui Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 360/007 tanggal : 2 Januari 2018, Perihal : Laporan Hasil Finalisasi Data Dampak Bencana Kabupaten Wonogiri tanggal 28 Nopember 2017. Data Kerusakan Pemukiman Akibat Banjir, tanah longsor dan angin topan mencapai 557 unit rumah mengalami kerusakan yang tersebar di 23 (dua puluh tiga) kecamatan di wilayah Kabupaten Wonogiri, dengan rincian 58 unit rumah roboh, 96 unit rusak berat, 403 unit rumah rusak sedang dan 507 unit rumah dalam kondisi terancam akibat adanya gerakan tanah.

Adapun strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman sebagai berikut :

1. Menyusun rencana aksi penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sesuai dengan kebutuhan. Renaksi disusun dengan melibatkan seluruh SKPD terdampak dan melibatkan partisipasi masyarakat terdampak. Penyusunan renaksi juga melibatkan lintas sektoral. Hal ini disebabkan dampak bencana meliputi berbagai sektor dan lintas kewenangan.

2. Melakukan penentuan lahan calon lokasi relokasi rumah terdampak di dua desa, yaitu Desa Dlepih Kecamatan Tirtomoyo dan Desa Kepuhsari, Kecamatan Manyaran; Selanjutnya dilaksanakan proses persiapan penyediaan lahan secara simultan dengan proses pengajuan usulan relokasi.
3. Melakukan relokasi masyarakat korban dan pemilik rumah yang berada di kawasan rawan bencana ke lokasi yang aman dari bencana banjir melalui pembangunan rumah hunian tetap dengan pola pemberdayaan masyarakat;
4. Melakukan pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat korban dan pemilik rumah yang akan dilakukan melalui BNPB untuk kategori rumah rusak berat dan rusak sedang serta melalui Pemerintah Daerah untuk kategori rumah rusak ringan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada;
5. Melakukan pembangunan prasarana lingkungan permukiman di lokasi relokasi antara lain pelaksanaan Land Clearing Lokasi Relokasi, Rehabilitasi Jalan Lingkungan, penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Penataan Kawasan Terdampak, Perbaikan Kualitas Lingkungan, Jalan lingkungan, Drainase, SPAM, IPAL Komunal, Tempat Pembuangan Sementara (TPS3R), pembangunan Masjid di lingkungan Relokasi dan pembangunan penerangan jalan umum (PJU). Lahan yang dipergunakan untuk lokasi relokasi merupakan lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri;
6. Menetapkan jenis bantuan rumah type 36 dengan model typikal untuk meminimalisir terjadinya konflik sosial;
7. Melakukan penggalangan dana dan bantuan non pemerintah untuk pembangunan rumah khusus maupun bantuan stimulan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mekanisme pemulihan sektor permukiman berupa:

- a. Melakukan kajian kelayakan calon lokasi relokasi di dua kecamatan yaitu Kecamatan Tirtomoyo dan Kecamatan Manyaran dengan bantuan dari Badan Geologi Kementerian ESDM;
- b. Penyusunan dokumen perencanaan teknis *Detail Engineering Design* (DED) untuk pembangunan Rumah Hunian Tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- c. Sosialisasi data korban terdampak sektor perumahan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, desa/kelurahan, RW dan RT, baik yang akan dilakukan relokasi maupun yang akan diberikan bantuan stimulan sesuai dengan tingkat kerusakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada;
- d. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Pembangunan rumah hunian tetap mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemberian bantuan stimulan untuk pelaksanaan pemulihan sektor permukiman berdasarkan hasil verifikasi penerima bantuan perumahan, status kepemilikan lahan dan bangunan berdasarkan *by name by address* dengan besaran stimulan ditetapkan berdasarkan tingkat kerusakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disertai dengan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi;
- g. Bantuan diberikan melalui pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal, karakter, dan budaya masyarakat setempat sesuai mekanisme yang telah ditetapkan;

- h. Pembangunan rumah mengikuti standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait sekaligus aspirasi masyarakat korban bencana.

2. Sektor Infrastruktur

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur meliputi:

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemulihan perekonomian masyarakat;
- b. Pembangunan kembali infrastruktur publik dengan memperhatikan kebijakan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- c. Memulihkan fungsi dan membangun kembali infrastruktur publik, yaitu transportasi, sumber daya air, energi/ listrik, serta air bersih;
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur mengacu pada standar teknis terkait;
- e. Pembangunan pengendali sedimen yang baru serta perawatan bangunan secara berkesinambungan agar tetap berfungsi optimal;
- f. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sektor Ekonomi

Pada sektor ekonomi, strategi yang ditetapkan meliputi:

- a. Mendorong dan mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik di bidang ekonomi;

- b. Pemberian bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pemberian pendampingan dalam pemulihan usaha, termasuk pelatihan kewirausahaan;
- d. Pembentukan kelompok usaha kecil menengah berbadan hukum di lokasi relokasi untuk pemenuhan penyaluran bantuan sektor ekonomi;
- e. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;

4. Sektor Sosial

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadahan dan lembaga sosial dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor sosial meliputi:

- a. Pemulihan layanan kesehatan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas), layanan gizi masyarakat, dan pemulihan psikososial;
- b. Pemulihan layanan pendidikan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan milik pemerintah (misalnya fasilitas PAUD, TK, SD, SMP, dan SMU), pemberian bantuan peralatan sekolah dan inisiasi sekolah siaga bencana;
- c. Pemulihan sarana dan prasarana ibadah (rehabilitasi masjid);
- d. Pemulihan pelayanan lembaga sosial (panti) dengan merehabilitasi sarana dan prasarana panti;
- e. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;



5. Lintas Sektor

Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas sektor meliputi:

- a. Pemulihan kembali fungsi layanan publik dan sarana prasarana pemerintahan (Kantor Pemerintahan, Polsek, Rumah Dinas);
- b. Fasilitasi kemudahan dalam proses pengurusan surat berharga dan administrasi kependudukan;
- c. Sosialisasi pengurangan risiko bencana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
- d. Pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana guna menumbuhkan dan menanamkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana; dan
- e. Mendorong dan memfasilitasi dalam restrukturisasi pinjaman seperti penjadwalan ulang, penundaan pembayaran utang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengurangan pajak;
- f. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

4.4. Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Skema pendanaan bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Masyarakat, Swasta (CSR) maupun bantuan luar negeri.



Gambar No. 4.1

Skema Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4.5. Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Waktu pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri, yang diuraikan sebagai berikut :

Handwritten signature

BAB V

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

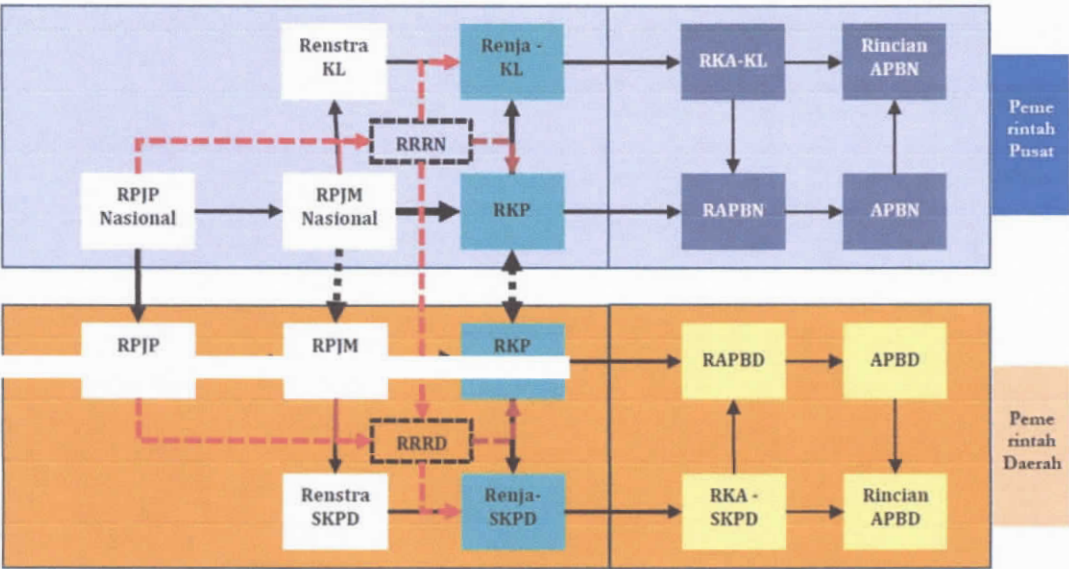
Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan kegiatan (termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber pembiayaan), pelaksanaan kegiatan, pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi kegiatan (termasuk pengawasan oleh pihak internal maupun eksternal pemerintah dan/atau pemerintah daerah), hingga pengalihan hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, merupakan kegiatan yang harus segera dilaksanakan sesaat setelah penanganan darurat selesai dilaksanakan. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri masih berpotensi terjadi longsor dan banjir susulan mengingat masih tingginya curah hujan. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa tanggap darurat, tahapan selanjutnya dilakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui penyelenggaraan pemulihan pascabencana pada kelima sektor yang terkena dampak yang akan dikoordinasikan di tingkat daerah melalui BPBD Kabupaten Wonogiri dan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB.

5.1. Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah kebijakan yang harus diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, termasuk dalam kaitannya dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan. Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahun pertama pascabencana, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang sudah ditetapkan sebelumnya, demikian juga terhadap RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) provinsi dan kabupaten/kota dan RAPBD tahun berjalan. Untuk tahun kedua dan seterusnya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah dimasukkan dalam RKP, APBN, RKPD dan RAPBD, sesuai dengan mekanisme dalam peraturan dan perundang-undangan terkait.



Gambar No. 5.1.
Kedudukan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan (Sumber: Bappenas 2013)

Keterangan :

Renstra KL	: Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Renja KL	: Rencana Kerja Kementerian/Lembaga
RKA-KL	: Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKA-SKPD	: Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Pendek
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RRRN	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional
RRRD	: Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah

Sumber pendanaan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Wonogiri dan sumber lainnya seperti dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah lainnya. Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada pemerintah daerah yang terkena bencana dalam hal APBD tidak memadai dalam membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Bantuan diberikan melalui mekanisme Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah.

Penyusunan kebutuhan pendanaan tersebut dilakukan secara *bottom-up* dan partisipatif, yang disinkronkan dengan usulan-usulan dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta dikonsolidasikan oleh BNPB dan BPBD. Proses ini dilakukan dengan tujuan mengurangi potensi duplikasi kegiatan dan pembiayaan serta menganalisis prioritas pemulihan masing-masing sektor berdasarkan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Besarnya kebutuhan pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dihitung berdasarkan hasil Kajian Kebutuhan Pascabencana (Jitu Pasma). Pengkajian kebutuhan pascabencana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap akibat bencana dan dampak bencana. Komponen akibat bencana yang dikaji terdiri dari penilaian kerusakan, kerugian, gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko bencana. Pengkajian akibat bencana, dampak bencana sampai kepada kebutuhan pascabencana meliputi sektor permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

Total kebutuhan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 60.597.496.620,-, dengan komposisi pendanaan dari APBN sebesar Rp. 48.131.705.620,- (79,43%), APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 100.000.000,- (0,17%), APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 11.915.791.000,- (19,66%), dan sumber lainnya dari dana masyarakat, dunia usaha, dan bantuan/hibah lainnya sebesar Rp. 450.000.000,- (0,74%).

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri untuk setiap sektor diuraikan sebagai berikut :

5.1.1. Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sektor Permukiman.

Secara umum perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor perumahan dan sub sektor prasarana lingkungan terhadap masyarakat terdampak dan memiliki ancaman resiko bencana, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 22.908.829.620,-. Komposisi sumber

pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman terdiri dari APBN sebesar Rp. 19.869.424.620,- (91,10%) dan APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 2.039.405.000,- (8,90%).

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rumah huntap, bantuan stimulan rusak berat dan rusak sedang dengan pola pemberdayaan masyarakat, bantuan isi rumah, pendampingan (Konsultan Management, Fasilitator, *Quality Assurance*) dan penyediaan prasarana lingkungan. Juga untuk memenuhi kebutuhan prasarana lingkungan yaitu *land clearing* lokasi relokasi, rehabilitasi jalan lingkungan, penyediaan air bersih dan sanitasi, penataan kawasan terdampak, dan perbaikan kualitas lingkungan. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Wonogiri diarahkan untuk penyediaan lahan perumahan, pembuatan site plan, bantuan stimulan rusak ringan, dan penyediaan prasarana lingkungan. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari CSR maupun dana masyarakat untuk pembangunan rumah khusus.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman disajikan dalam Tabel No. 5.1.

Tabel No. 5.1

Rekapitulasi Kebutuhan dan Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Permukiman Pancabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan TA. 2018 – 2020 (Rp)			
			APBD Kab	APBD Prop	APBN K/L	Sumber Lain
1	Sub Sektor Perumahan	21.908.829.620	2.039.405.000	-	19.869.424.620	-
2	Sub Sektor Prasarana Lingkungan	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-
		22.908.829.620	2.039.405.000	-	20.869.424.620	-

Pembangunan huntap yang dilakukan dilengkapi pula dengan sarana dan prasarana dan utilitas lingkungan, meliputi air bersih, jaringan listrik, PJU, drainase dan jalan lingkungan.

5.1.2. Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Infrastruktur

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor transportasi, energi, air dan sanitasi serta sumberdaya air, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 27.684.263.000,-. Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur terdiri dari APBN sebesar Rp. 18.736.902.000,- (67,68%), APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 8.497.361.000,- (30,69%) dan sumber lainnya sebesar Rp. 450.000.000,- (1,63%).

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, ketenagalistrikan, sarana air bersih dan sumber daya air. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten Wonogiri diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jembatan, dan sumber daya air irigasi. Sementara itu sumber pendanaan lainnya diperoleh dari CSR maupun dana masyarakat untuk pembangunan sarana komunikasi dan air bersih.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur disajikan dalam Tabel No. 5.2.

Tabel No. 5.2
Rekapitulasi Kebutuhan dan Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Sektor Infrastruktur Pancabencana Banjir, Tanah
Longsor dan Angin Topan Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan TA. 2018 – 2020 (Rp)			
			APBD Kab	APB D Prop	APBN K/L	Sumber Lain
1	Transportasi	15.980.972.000	8.322.760.000	-	7.658.212.000	-
2	Energi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
3	Sumber Daya Air	11.253.291.000	174.601.000	-	11.078.690.000	-
4	Pos dan Telekomunikasi	250.000.000	-	-	-	250.000.000
5	Air dan Sanitasi	100.000.000	-	-	-	100.000.000
		27.684.263.000	8.497.361.000	-	18.736.902.000	450.000.000

5.1.3. Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Kesehatan, Pendidikan, Agama, Lembaga Sosial dan Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 1.947.025.000,-. Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi sektor sosial terdiri dari APBN sebesar Rp. 468.000.000,- (11,45%), APBD Kabupaten Wonogiri sebesar Rp. 1.379.025.000,- (70,83%) dan APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 100.000.000,- (5,14%).

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan dan pendidikan, keagamaan, panti sosial, dan Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat. Sumber pendanaan dari APBD Provinsi Jawa Tengah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan pada tingkat Sekolah menengah atas. Sumber pendanaan dari APBD Kabupaten

Wonogiri diarahkan untuk pendidikan. Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial disajikan dalam Tabel No. 5.3.

Tabel No. 5.3
Rekapitulasi Kebutuhan dan Sumber Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Sosial Pancabencana Banjir,
Tanah Longsor dan Angin Topan
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan TA. 2018 – 2020 (Rp)			
			APBD Kab	APBD Prop	APBN K/L	Sumber Lain
1	Kesehatan	163.000.000	-	-	163.000.000	-
2	Pendidikan	1.539.025.000	1.379.025.000	100.000.000	60.000.000	-
3	Agama	245.000.000	-	-	245.000.000	-
4	Lembaga Sosial	-	-	-	-	-
Jml Sektor Sosial		1.947.025.000	1.379.025.000	100.000.000	468.000.000	-

5.1.4. Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi.

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM, perindustrian dan pendampingan/pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 7.957.379.000,-. Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi terdiri dari APBN sebesar Rp. 7.957.379.000,- (100,00%).

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, koperasi dan UKM, perindustrian dan pendampingan/pemberdayaan ekonomi masyarakat. Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi disajikan dalam Tabel No. 5.4.

h

Tabel No. 5.4
Rekapitulasi Kebutuhan dan Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Sektor Ekonomi Pancabencana Banjir, Tanah Longsor
dan Angin Topan
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan TA. 2018 – 2020 (Rp)			
			APBD Kab	APBD Prop	APBN K/L	Sumber Lain
1	Pertanian, Peternakan, Perkebunan	2.675.000.000	-	-	2.675.000.000	-
2	Perikanan	500.000.000	-	-	500.000.000	-
3	Perdagangan	282.379.000	-	-	282.379.000	-
4	Perindustrian	-	-	-	-	-
5	Pariwisata	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000	-
6	Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-
Jml Sektor Ekonomi		7.957.379.000	-	-	7.957.379.000	-

5.1.2. Perencanaan dan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor.

Perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor Pemerintahan, Keuangan dan Perbankan, Ketertiban (POLRI), Keamanan (TNI), dan Lingkungan Hidup, dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp. 100.000.000,-. Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor terdiri dari APBN sebesar Rp 100.000.000,- (100,00%),

Sumber pendanaan dari APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sub sektor ketertiban (POLRI), keamanan (TNI), dan lingkungan hidup untuk penanganan pemulihan DAS dan Subdas Bengawan Solo, penghijauan lahan dan pengurangan resiko bencana.

Rekapitulasi kebutuhan dan sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas sektor disajikan dalam Tabel No. 5.5.

Tabel No. 5.5

Rekapitulasi Kebutuhan dan Sumber Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lintas Sektor Pancabencana Banjir,
Tanah Longsor dan Angin Topan Kabupaten Wonogiri
Tahun 2018-2020

No	Sektor/Sub Sektor	Prakiraan Kebutuhan (Rp)	Pendanaan TA. 2018 – 2020 (Rp)			
			APBD Kab	APBD Prop	APBN K/L	Sumber Lain
1	Pemerintahan	-	-	-	-	-
2	Keuangan dan Perbankan	-	-	-	-	-
3	Keamanan dan Ketertiban	-	-	-	-	-
4	Lingkungan Hidup	100.000.000	-	-	100.000.000	-
5	Pengurangan Resiko Bencana	-	-	-	-	-
Jml Lintas Sektor		100.000.000	-	-	100.000.000	-

Sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi berasal dari APBN berupa dana siap pakai BNPB, hibah pemerintah kepada pemerintah daerah (dari Kementerian Keuangan), DIPA Kementerian/Lembaga teknis terkait, dan APBD sesuai kewenangan masing-masing. Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yakni dari 2018 sampai dengan 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemulihan sektor permukiman dilaksanakan selama dua tahun anggaran, yakni tahun anggaran 2018-2019;
2. Pemulihan sektor infrastruktur dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana infrastruktur untuk pelayanan transportasi, air minum, sumberdaya air dan irigasi, serta kegiatan pengurangan risiko bencana;
3. Pemulihan sektor ekonomi produktif dilaksanakan secara bertahap bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi produktif, dilakukan kegiatan

penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana;

4. Pemulihan sektor sosial diprioritaskan pada tahun anggaran 2018; bersamaan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial, dilakukan kegiatan penguatan kapasitas dalam rangka pengurangan risiko bencana; dan
5. Pemulihan lintas sektor diprioritaskan pada tahun anggaran 2018 dalam rangka mengembalikan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

Identifikasi potensi sumber pendanaan ditempuh dengan cara pendayagunaan anggaran pemerintah sebagai berikut:

1. Rupiah murni APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018, 2019 dan 2020 didayagunakan secara optimal untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terkena dampak bencana melalui realokasi (jika dimungkinkan) kegiatan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku;
2. Anggaran perubahan APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 didayagunakan secara optimal untuk upaya penyelenggaraan transisi darurat sebagai dasar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku; dan
3. Anggaran pemerintah APBN, APBD provinsi/kabupaten pada 2018 dan 2019 didayagunakan secara optimal untuk upaya lanjutan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah yang terkena dampak bencana sesuai dengan prosedur perencanaan dan penganggaran tahunan yang berlaku.

Berdasarkan upaya tersebut, maka indikasi pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilihat pada Tabel No. 5.6.

No	Sektor/ Sub Sektor	Saluran Transisi Darurat	Saluran Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Total
1	PERMUKIMAN	2.039.405.000	20.869.424.620	22.908.829.620
	Perumahan	2.039.405.000	19.869.424.620	21.908.829.620
	Prasarana Lingkungan	-	1.000.000.000	1.000.000.000
2	INFRASTRUKTUR	-	27.684.263.000	27.684.263.000
	Transportasi	-	15.980.972.000	15.980.972.000
	Energi	-	100.000.000	100.000.000
	Sumberdaya Air	-	11.253.291.000	11.253.291.000
	Pos dan Telekomunikasi	-	250.000.000	250.000.000
	Air dan Sanitasi	-	100.000.000	100.000.000
3	SOSIAL	-	1.947.025.000	1.947.025.000
	Kesehatan	-	163.000.000	163.000.000
	Pendidikan	-	1.539.025.000	1.539.025.000
	Agama	-	245.000.000	245.000.000
	Pendampingan/Pemberdayaan Sosial Masyarakat	-	-	-
4	EKONOMI	-	7.957.379.000	7.957.379.000
	Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	-	2.675.000.000	2.675.000.000
	Perikanan	-	500.000.000	500.000.000
	Perdagangan	-	282.379.000	282.379.000
	Perindustrian	-	-	-
	Pariwisata	-	4.500.000.000	4.500.000.000
	Koperasi dan UKM	-	-	-
5	LINTAS SEKTOR	-	100.000.000	100.000.000
	Pemerintahan	-	-	-
	Keuangan dan Perbankan	-	-	-
	Ketertiban/Keamanan (POLRI/TNI)	-	-	-
	Lingkungan Hidup	-	100.000.000	100.000.000
	Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	-	-	-
	TOTAL	2.039.405.000	58.558.091.620	58.558.091.620

f

5.2. Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kabupaten Wonogiri dan oleh BNPB untuk koordinasi di tingkat Pusat.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Provinsi dan atau Kabupaten. Semua pelaksanaan teknis dari aspek – aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD bersama Kementrian Lembaga dan SKPD.

Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahakan sesuai peraturan yang berlaku.

5.3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

5.3.1. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

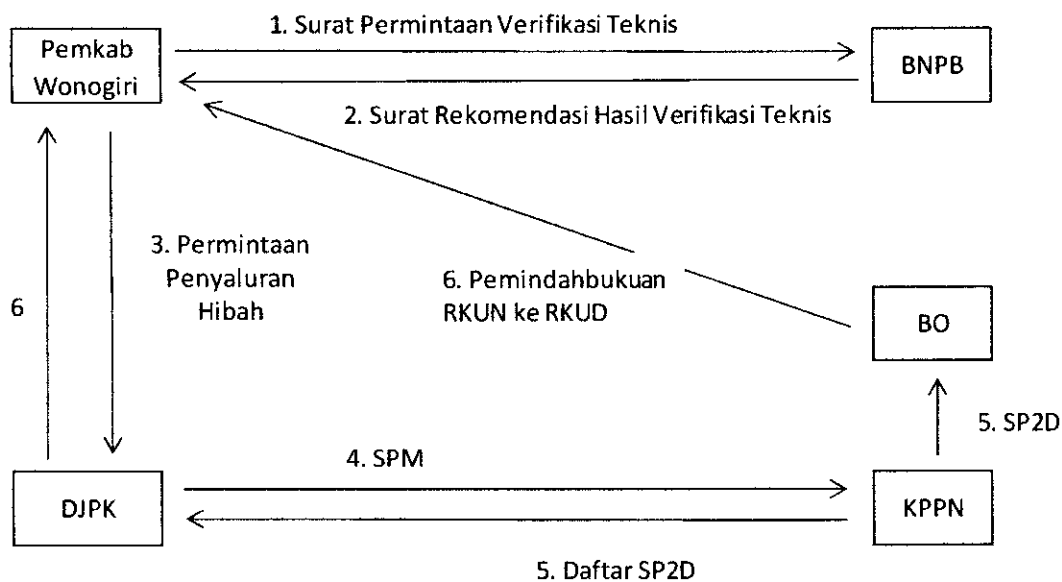
Perbendaharaan Negara, dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari kementerian/lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut :
 - a. Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - b. Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - c. Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
2. Pembiayaan yang menggunakan APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Wonogiri akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait.
3. Pembiayaan yang menggunakan DSP BNPB akan mengikuti pola pelaksanaan anggaran DSP BNPB.
4. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyampaikan usulan bantuan pendanaan kepada Pemerintah melalui Kepala BNPB berdasarkan Rencana Aksi (renaksi) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana banjir bandang di Kabupaten Wonogiri .

- b. BNPB akan melakukan proses verifikasi dan evaluasi atas usulan bantuan tersebut dengan melakukan konfirmasi dan validasi terhadap renaksi Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri.
- c. Kepala BNPB akan menyampaikan surat usulan kepada Menteri Keuangan untuk dapat mengalokasikan anggaran Hibah kepada pemerintah Kabupaten Wonogiri. Surat usulan kepala BNPB ini dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan termasuk rekomendasi untuk mengalokasikan anggaran Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
- d. Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan melakukan proses Hibah kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui suatu Surat Pemberitahuan Hibah
- e. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hibah, akan dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dan Bupati Wonogiri.
- f. PPA dan KPA Hibah pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan akan melakukan proses pencairan Hibah dari R KUN ke R KUD Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Satker BPBD Kabupaten Wonogiri sebagaimana terdapat pada Gambar No. 5.2.





Gambar No. 5.2
Mekanisme Hibah Bantuan Dana Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

5.3.2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial-ekonomi-budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan *build back better and safer*. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi pembangunan kembali sarana

dan prasarana yang rusak, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan risiko bencana dan mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

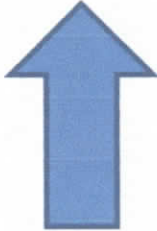
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BNPB. Di tingkat daerah, kegiatan teknis dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD.

5.3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekontruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam periode tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020 dengan jadwal sebagaimana terdapat pada Tabel 5.7. Jadwal pelaksanaan sebagaimana terdapat pada Tabel 5.7 akan dapat tercapai dengan asumsi anggaran tersedia secara tepat waktu dan cukup, serta komponen pendukung kegiatan seperti penyediaan lahan dan lain-lain dapat selesai tepat waktu.

Tabel No. 5.7
 Jadwal Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan
 Di Kabupaten Wonogiri

No	Kegiatan	2017/ 2018	2018						2019						2020				Pasca RR
			tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	tw	
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penanganan Darurat Bencana																		
2	Pelaksanaan Transisi Darurat																		
3	Persiapan Operasional																		
4	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi																		
	a. Sektor Permukiman																		
	b. Sektor Infrastruktur																		
	c. Sektor Ekonomi																		
	d. Sektor Sosial																		
	e. Lintas Sektor																		



Handwritten signature or mark.

5.4. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pascabencana

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri .

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional,

h

penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tanggal 26 November 2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Wonogiri juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selain kepada Pengguna Anggaran (PA) masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya.

Atas pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah, maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri wajib menyampaikan laporan secara triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

5.5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, evaluasi

penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, digunakan lima indikator, yaitu:

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional dengan melibatkan kementerian/lembaga dan SKPD terkait di daerah dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Perka BNPB Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Dokumen RENAKSI yang telah ditetapkan Bupati serta tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional.

Monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten, dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Kabupaten sebagai penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun dengan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan untuk dilakukannya penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam rencana aksi.

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tiga tahun anggaran, yakni dari tahun anggaran 2018 sampai dengan 2020, dimana prakiraan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data Jitu Pasna pada proses awal penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Setelah rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pos yang belum jelas pendanaannya dan pos yang sangat rinci dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dapat mendorong pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha, untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut

16

peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan di lapangan;
2. Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini dibelanjakan dengan setepat-tepatnya; dan
3. Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

5.6. Kestinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.

Setelah pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi ini, perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan “normal” sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan:

1. Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risiko bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);

2. Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA dan DPA SKPD, serta RTRW.
3. Dengan adanya kejadian bencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW kabupaten terdampak;
4. Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
5. Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
6. Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD.



BAB VI PENUTUP

6.1. Aspek Legal Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri telah melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus berpedoman pada rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sebagai tindak lanjut operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka perlu ditetapkan:

1. Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang Penetapan Lahan Relokasi Pemukiman Akibat Bencana Banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri;
2. Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang Data Korban Bencana Banjir, tanah longsor dan angin topan Kabupaten Wonogiri;
3. Surat Keputusan Bupati Wonogiri tentang Relokasi Pengungsi Korban Bencana Banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri;
4. Surat Keputusan dan pedoman lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Banjir, Tanah Longsor dan Angin Topan di Kabupaten Wonogiri.

6.2. Jangka Waktu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan Kabupaten Wonogiri adalah dua tahun anggaran, yaitu dimulai pada Tahun Anggaran 2018 dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2020.

6.3. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain.

Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah daerah melalui BPBD provinsi dan BPBD kabupaten mengacu pada rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri.

6.4. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir, tanah longsor dan angin topan di Kabupaten Wonogiri, Pemerintah Kabupaten Wonogiri harus segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

rehabilitasi dan rekonstruksi secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR,
TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 - 2020

PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN
DI KABUPATEN WONOGIRI - PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

REKAPITULASI PENILAIAN KERUSAKAN & KERUGIAN PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN
KABUPATEN WONOGIRI - PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

NO	SEKTOR/ SUBSEKTOR	Nilai Kerusakan (Rp Juta)	Nilai Kerugian (Rp Juta)	Total Kerusakan dan Kerugian (Rp Juta)	Kepemilikan	
					Pemerintah (Rp Juta)	Non Pemerintah (Rp Juta)
1	PERUMAHAN	39.076.800.000	2.315.750.000	41.392.550.000	-	41.392.550.000
	1 Perumahan	35.707.200.000	2.167.000.000	37.874.200.000	-	37.874.200.000
	2 Prasarana Lingkungan	3.369.600.000	148.750.000	3.518.350.000	-	3.518.350.000
2	INFRASTRUKTUR	19.877.500.000	6.112.835.000	25.990.335.000	23.580.335.000	2.410.000.000
	1 Transportasi	17.755.000.000	4.145.335.000	21.900.335.000	21.900.335.000	-
	2 Energi	67.500.000	15.000.000	82.500.000	-	82.500.000
	3 Sumber Daya Air	1.555.000.000	430.000.000	1.985.000.000	1.680.000.000	305.000.000
	4 Pos dan Telekomunikasi	250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	-	1.750.000.000
	5 Air dan Sanitasi	250.000.000	22.500.000	272.500.000	-	272.500.000
3	SOSIAL	618.000.000	100.000.000	718.000.000	678.000.000	40.000.000
	1 Kesehatan	40.000.000	10.000.000	50.000.000	50.000.000	-
	2 Pendidikan	543.000.000	85.000.000	628.000.000	628.000.000	-
	3 Agama	35.000.000	5.000.000	40.000.000	-	40.000.000
	4 Lembaga Sosial	-	-	-	-	-
4	EKONOMI	300.000.000	28.873.284.500	29.173.284.500	-	29.173.284.500
	1 Pertanian, Perternakan, Perkebunan	-	22.038.284.500	22.038.284.500	-	22.038.284.500
	2 Perikanan	-	-	-	-	-
	3 Perdagangan	-	2.875.000.000	2.875.000.000	-	2.875.000.000
	4 Perindustrian	-	3.750.000.000	3.750.000.000	-	3.750.000.000
	5 Pariwisata	300.000.000	210.000.000	510.000.000	-	510.000.000
5	LINTAS SEKTOR	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-
	1 Pemerintahan	-	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-
	2 Keamanan dan Keteriban (TNI/POLRI)	-	-	-	-	-
	3 Keuangan dan Perbankan	-	-	-	-	-
	4 Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-
TOTAL		59.872.300.000	37.426.869.500	97.299.169.500	24.283.335.000	73.015.834.500

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan				Luas Jumlah Bata-2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)				Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerusakan	Total Kerusakan & Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan					
		Karangtengah	5	5	5	Lokasi	60	540.000	162.000.000	81.000.000	16.200.000	259.200.000	8.750.000	267.950.000		
		Sidoarjo	4	4	4	Lokasi	60	540.000	129.600.000	64.800.000	12.960.000	207.360.000	8.750.000	216.110.000		
		Manyaran	2	2	2	Lokasi	60	540.000	64.800.000	32.400.000	6.480.000	103.680.000	8.750.000	112.430.000		
		Girifontro	1	1	1	Lokasi	60	540.000	32.400.000	16.200.000	3.240.000	51.840.000	8.750.000	60.590.000		
		Kismantoro	6	6	6	Lokasi	60	540.000	194.400.000	97.200.000	19.440.000	311.040.000	8.750.000	319.790.000		
		Batuwamo	7	7	7	Lokasi	60	540.000	228.800.000	113.400.000	22.680.000	362.880.000	8.750.000	371.630.000		
		Ngadirojo	1	1	1	Lokasi	60	540.000	32.400.000	16.200.000	3.240.000	51.840.000	8.750.000	60.590.000		
		Slogohimo	1	1	1	Lokasi	60	540.000	32.400.000	16.200.000	3.240.000	51.840.000	8.750.000	60.590.000		
		Paranggupito	2	2	2	Lokasi	60	540.000	64.800.000	32.400.000	6.480.000	103.680.000	8.750.000	112.430.000		
		Praclimantoro	8	8	8	Lokasi	60	540.000	259.200.000	129.600.000	25.920.000	414.720.000	8.750.000	423.470.000		
		Selogiri	4	4	4	Lokasi	60	540.000	129.600.000	64.800.000	12.960.000	207.360.000	8.750.000	216.110.000		
				65	65	65				2.106.000.000	1.053.000.000	210.600.000	3.369.600.000	148.750.000	3.518.350.000	
										14.490.000.000	20.446.000.000	4.140.800.000	39.076.800.000	2.315.750.000	41.392.550.000	
	INFRASTRUKTUR															
1 Transportasi																
	A. Transportasi Darat															
	1. Jalan Nas. / Prov. / Kab. / Kota															
	1. JIMBAR	Ds. Jimbar	12				m	25.000.000	300.000.000			300.000.000	112.500.000	412.500.000	Jembatan jalan Kabupaten	
		Dsn. Koban	15				m	6.666.667	100.000.000			100.000.000	28.125.000	128.125.000	Jalan Kabupaten	
		Dsn. Josari	25				m	4.000.000	100.000.000			100.000.000	-	100.000.000	Talud Cek Dam	
		Dsn. Jimbar	50				m	1.000.000	50.000.000			50.000.000	11.250.000	61.250.000	Jalan Dusun	
		Dsn. Josari	50				m	600.000	30.000.000			30.000.000	11.250.000	41.250.000	Jalan Pertanian	
		Dsn. Josari		100			m	500.000		50.000.000		50.000.000	11.250.000	61.250.000	Jalan Barat Dusun	
		Dsn. Josari			100		m	300.000			30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	Perpipaan Air Bersih	
		Dsn. Pringwatang			30		m	1.000.000			30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	Talud	
	2. WATANGREJO	Dsn. Pelem		20			m	1.500.000		30.000.000		30.000.000	11.250.000	41.250.000	JUT (Jalan Usaha Tani)	
		Dsn. Glegahombo		40			m	625.000		25.000.000		25.000.000	56.250.000	81.250.000	Jalan Kabupaten	
	3. JOHO	Dsn. Pendem	30				m	2.500.000				75.000.000	-	75.000.000	Saluran Sekunder	
	4. TRUKAN	Dsn. Tambak Rejo	50				m	2.000.000				100.000.000	22.500.000	122.500.000	Talud Dan Badan Jalan	
		Dsn. Blongan	35				m	2.142.857				75.000.000	-	75.000.000	Saluran	
		Dsn. Blongan	30				m	1.666.667				50.000.000	11.250.000	61.250.000	Talud	
		Dsn. Tambak Sari	100				m	1.250.000				125.000.000	-	125.000.000	Saluran Jeblogan	
		Dsn. Gedog	5				m	8.000.000				40.000.000	16.875.000	56.875.000	Buk. Deker	

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan				Luas Jumlah Bata 2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerusakan	Total Kerusakan & Kerusakan	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan			Berat	Sedang	Ringan				
		Dsn. Gadog	25			m	2.800.000	70.000.000			70.000.000	16.875.000	86.875.000	Talud Jalan	
		Dsn. Tambak sari	200			m	250.000	50.000.000			50.000.000	11.250.000	61.250.000	Makadam Jalan	
5. SUCI		Dsn. Pojok	12			m	20.833.333	250.000.000			250.000.000	56.250.000	306.250.000	Jembatan	
6. SEDAYU		Dsn. Ceran	35			m	2.142.857	75.000.000			75.000.000	22.500.000	97.500.000	Talud Jalan	
		Dsn. Ceran	300			m2	250.000	75.000.000			75.000.000	22.500.000	97.500.000	Aspal Jalan	
		Ds. Guyangan		3		m	16.666.667		50.000.000		50.000.000	56.250.000	106.250.000	Jembatan	
7. TUBOKARTO		Bandungan	20			m	5.000.000	100.000.000			100.000.000	-	100.000.000	Tanggul cek DAM	
		Dsn. Salak		6		m	16.666.667	100.000.000			100.000.000	22.500.000	122.500.000	Jembatan	
8. SAMBIROTO		Dsn. Jetak 3/7		15		m	3.333.333		50.000.000		50.000.000	-	50.000.000	Saluran irigasi	
9. GILINGGANG		Dsn. Bercak		300		m2	233.333		70.000.000		70.000.000	22.500.000	92.500.000	Jalan penghubung	
10. GEBANGHARJO		Dsn. Karanglo-Danggolo		210		m2	238.095		50.000.000		50.000.000	11.250.000	61.250.000	Jalan	
		Dsn. Dangdolo-Jati		25		m	600.000		15.000.000		15.000.000	-	15.000.000	Drainase	
		Sekeloh barat embung Gebang		20		m	3.500.000		70.000.000		70.000.000	11.250.000	81.250.000	Talud	
		Karang kulon		25		m	3.200.000		80.000.000		80.000.000	16.875.000	96.875.000	Talud	
11. BANARAN		Babadan		15		m	3.333.333		50.000.000		50.000.000	28.125.000	78.125.000	Talud jembatan	
		Dungtemu-krading	450			m2	144.444	65.000.000			65.000.000	11.250.000	76.250.000	Jalan penghubung	
		Dungpedas-Tondan	450			m2	166.667	75.000.000			75.000.000	11.250.000	86.250.000	Jalan penghubung	
		Mijahan	25			m	3.000.000	75.000.000			75.000.000	16.875.000	91.875.000	Talud Jalan	
		Jempe		10		m	10.000.000		100.000.000		100.000.000	56.250.000	156.250.000	Jembatan	
12. LEBAK		Lebak		30		m	3.333.333		100.000.000		100.000.000	-	100.000.000	Talud sungai	
		Tiogo lor		180		m2	277.778		50.000.000		50.000.000	22.500.000	72.500.000	Jalan desa	
13. GAMBIRMANIS		Bekalan		450		m2	166.667		75.000.000		75.000.000	16.875.000	91.875.000	Jalan	
14. PRACIMANTORO		Blindas		35		m	1.857.143		65.000.000		65.000.000	-	65.000.000	Tanggul Sumber Teleng	
		Godang		40		m	1.500.000		60.000.000		60.000.000	-	60.000.000	Talud telaga timbang	
		Ngulu Wetan		50		m	1.500.000		75.000.000		75.000.000	-	75.000.000	Tanggul sungai	
		Ngulu Wetan		50		m	1.000.000		50.000.000		50.000.000	-	50.000.000	Saluran air	
		Ngulu Wetan		165		m2	272.727		45.000.000		45.000.000	11.250.000	56.250.000	Jalan Pertanian	
		Ngulu Wetan		90		m2	166.667		15.000.000		15.000.000	16.875.000	31.875.000	Jalan paving	
		Ngulu Wetan		90		m2	166.667		15.000.000		15.000.000	22.500.000	37.500.000	Jalan Aspal	
		Ngulu Wetan		105		m2	142.867		15.000.000		15.000.000	11.250.000	26.250.000	Jalan Aspal	
		Ngulu Wetan		105		m2	142.857		15.000.000		15.000.000	11.250.000	26.250.000	Jalan	
		Ngulu Wetan		90		m2	111.111		10.000.000		10.000.000	11.250.000	21.250.000	Jalan	
		Ngulu Wetan		20		m	2.000.000		40.000.000		40.000.000	-	40.000.000	Pagar talud lap. Voly	
		Ngulu Wetan		1		Paket	10.000.000		10.000.000		10.000.000	-	10.000.000	Pipe Air	
15. WONODADI		Surodadi 2/1		20		m	3.000.000		60.000.000		60.000.000	-	60.000.000	Talud Jalan	
		Ngreboh 3/2		135		m2	296.296		40.000.000		40.000.000	16.875.000	56.875.000	Jalan dusun	
		Salam		20		m	1.750.000		35.000.000		35.000.000	-	35.000.000	Talud jalan	
		Godang		25		m	1.800.000		45.000.000		45.000.000	-	45.000.000	Talud Jalan	

Handwritten signature or mark.

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Luas/ Jumlah Rata 2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerusakan	Total Kerusakan & Kerusakan	Keterangan	
			Berat	Sedang	Ringan			Satuan	Berat	Sedang					Ringan
		Jojo		25		m	2.800.000		70.000.000		70.000.000	-	70.000.000	Talud jalan	
		Surodadi		20		m	3.750.000		75.000.000		75.000.000	-	75.000.000	Cek Dam Penahan	
		Gurungan		60		m2	250.000		15.000.000		15.000.000	16.875.000	31.875.000	Jalan Dusun	
												-	-		
	Giripurno	Kerdus kapik Rt 3/II		15		m	2.000.000		30.000.000		30.000.000	-	30.000.000	Talud Halaman	
		Gondang legi	450			m2	222.222	100.000.000			100.000.000	22.500.000	122.500.000	Badan jalan putus	
	Wuryorejo	Lingk. Grobogan			45	m	333.333			15.000.000	15.000.000	11.250.000	26.250.000	Jalan tertimbun longsor	
		Lingk. Keron Kidul 2/6		12		m	2.916.667		35.000.000		35.000.000	-	35.000.000	Talud masjid	
	Wondoyo	Lingk. Jatrejo 2/9		15		m	666.667		10.000.000		10.000.000	11.250.000	21.250.000	Jalan dan saluran air	
												-	-		
	Tempursari	Kebuyuk Rt 2/V		10		m	1.500.000		15.000.000		15.000.000	-	15.000.000	Talud	
		Kebuyuk lor	25			m	10.000.000	250.000.000			250.000.000	11.250.000	261.250.000	sayap jembatan	
		banyuripan		20		m	1.250.000		25.000.000		25.000.000	-	25.000.000	Talud	
	Jatinom	tuakan Rt 2 Rw 6		25		m	2.000.000		50.000.000		50.000.000	16.875.000	66.875.000	Jalan dan talud	
		Ngempak Rt 1 Rw 7		3		unit	25.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Gedung sdh 3 jatinom	
	Mojoagung	poligede Rt 4 Rw 2		20		m	3.750.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Talud lapangan	
		poligede Rt 4 Rw 2	15			m	6.666.667	100.000.000			100.000.000		100.000.000	Talud dan dam gupak warak 2	
												-	-		
	Kel. Kayuloko	ngledok rt 4		15		m	666.667		10.000.000		10.000.000		10.000.000	saluran pertanian	
		patoman		25		m	1.200.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	tebing	
		Lingk Sindon Rt 1Rw 5		30		m	2.500.000		75.000.000		75.000.000	22.500.000	97.500.000	Talud jalan longsor	
												-	-		
	Girirejo	Puter, Gatrejo	28			m	8.928.571	250.000.000			250.000.000	225.000.000	475.000.000	Talud dan timbunan oprt jbt	
		Gedong	40			m	3.750.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	Talud jalan	
	Wiroko	dsn. Tarnan kulon 1/2	24			m	18.750.000	450.000.000			450.000.000	225.000.000	675.000.000	Badan jalan dan talud sayap jbt	
		dsn. Tarnan kulon 1/2	7			Btg	5.000.000	35.000.000			35.000.000		35.000.000	tiang listrik roboh	
		dsn. Blarakan 2/6	25			m	6.000.000	150.000.000			150.000.000	11.250.000	161.250.000	Talud jembatan	
		dsn. Talang 2/8		300		m2	233.333		70.000.000		70.000.000	11.250.000	81.250.000	Jalan dusun	
		dsn. Talang 2/8		240		m2	250.000		60.000.000		60.000.000	11.250.000	71.250.000	Jalan dusun	
		dsn. Tisan kulon 1/3		135		m	555.556		75.000.000		75.000.000	11.250.000	86.250.000	Jalan dusun	
	Banyakprodo	Nglaran	10			m	5.000.000	50.000.000			50.000.000	11.250.000	61.250.000	Talud sayap jembatan	
	Ngarjosari	Klampok Rt 3/IV		25		m	3.000.000		75.000.000		75.000.000		75.000.000	Talud jalan	
	Hargosari		15			m	3.333.333	50.000.000			50.000.000	22.500.000	72.500.000	Badan jalan putus	
	Sidorejo	Dsn Towo	10			m	5.000.000	50.000.000			50.000.000	28.125.000	78.125.000	Jalan longsor	
	Dlepih	Ngrejeng Rt 2		20		m	2.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Talud jalan	

5

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Luas Jumlah Rata2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerugian	Total Kerusakan & Kerugian	Keterangan	
			Berat	Sedang	Ringan			Satuan	Berat	Sedang					Ringan
		bengle		20		m	1.250.000		25.000.000		25.000.000	11.250.000	36.250.000	jalan	
		natah	4			m	37.500.000	150.000.000			150.000.000	28.125.000	178.125.000	jembatan	
		dongstreni	5			m	9.000.000	45.000.000			45.000.000	16.875.000	61.875.000	jembatan	
		natah		120		m2	416.667		50.000.000		50.000.000	11.250.000	61.250.000	jalan	
	Genengharjo	Dsn Godang	15			m	6.666.667	100.000.000			100.000.000	16.875.000	116.875.000	Jalan longsor	
											-	-	-		
	Beji	Beji Rt 2 / II	15			m	3.333.333	50.000.000			50.000.000	16.875.000	66.875.000	Badan jalan longsor	
											-	-	-		
	Gedong	Gedong				m					-	-	-	jembatan	
	Kerjo Kidul	Dsn. Gambiab		30		m	3.166.667		95.000.000		95.000.000		95.000.000	Talud	
											-	-	-		
	Bayenharjo	Triris (Mukus)	25			m	3.800.000	95.000.000			95.000.000		95.000.000	Talud jalan	
	Suci	Bakon	20			m	3.750.000	75.000.000			75.000.000	11.250.000	86.250.000	Sayap jembatan	
	Kal. Gritontro	Jrt DUNG kancil	10			m	15.000.000	150.000.000			150.000.000	11.250.000	161.250.000	Jembatan ambrol	
		Dam DUNG Kancil		15		m	6.666.667		100.000.000		100.000.000		100.000.000	Dam ambrol	
											-	-	-		
	Baleharjo	Malangan - Sirmoboyo	40			m	6.250.000	250.000.000			250.000.000	16.875.000	266.875.000	talud Jembatan	
		Prambon - malangan	22			m	6.818.182	150.000.000			150.000.000	28.125.000	178.125.000	jembatan PNPM	
		Malangan		180		m2	833.333		150.000.000		150.000.000	16.875.000	166.875.000	jalan	
		pangkah - gadok		10		m	10.000.000		100.000.000		100.000.000	16.875.000	116.875.000	jembatan	
		pangkah 2/8		300		m	333.333		100.000.000		100.000.000	22.500.000	122.500.000	jalan	
		pangkah		240		m	416.667		100.000.000		100.000.000	28.125.000	128.125.000	jalan dan jembatan P3DT	
	Pucung	Pucung kidul -dungguda	40			m	8.750.000	350.000.000			350.000.000	16.875.000	366.875.000	jalan putus P-30, L-5, T-50m	
	Basuhan	dsn. Basuhan		50		m	1.000.000		50.000.000		50.000.000	11.250.000	61.250.000	jalan tertutup batu	
	Pasekan	Sumberwatu		60		m	2.500.000		150.000.000		150.000.000	16.875.000	166.875.000	tanah retak di rabat jalan	
		banyon		60		m	8.333.333		500.000.000		500.000.000	22.500.000	522.500.000	jalan aspal retak	
	Sindukarto	Nglegong		180		m	388.889		70.000.000		70.000.000	16.875.000	86.875.000	rabat jalan	
											-	-	-		
	Minggahharjo	Eromoko-griwoyo	22			m	6.818.182	150.000.000			150.000.000	22.500.000	172.500.000	jalan dan jembatan	
	Puloharjo	watulembu kulon		15		m	2.000.000		30.000.000		30.000.000	22.500.000	52.500.000	jalan ambles	
		watulembu kulon		30		m	666.667		20.000.000		20.000.000	16.875.000	20.000.000	talud jalan longsor	
		Lingk Mundu		25		m	1.800.000		45.000.000		45.000.000	16.875.000	61.875.000	jalan longsor	
											-	-	-		
	Panekan	Jurang Gandok		20		m	1.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	saluran irigasi P-20m	

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Luas Jumlah Bata2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerusakan	Total Kerusakan & Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan			Berat	Sedang	Ringan				
		panekan		25		m	600.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	saluran sekunder (karetan)
	Ngunggahan	Ngunggahan			30	m	333.333		10.000.000		10.000.000		10.000.000	saluran sekunder P.5. T.2.1.2.5m
	Eromoko	Kedung dadap		7		m	2.857.143		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Saluran suplesi P.7. L.3
	Sumberharjo	Gendang		10		m	2.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	bandungan dan sayap 10x3m
											-		-	
	Gunturharjo	Dsn Talunombo		75		m	2.000.000		150.000.000		150.000.000	28.125.000	178.125.000	Talud Badan jalan
		Dsn Plawon		30		m	6.666.667		200.000.000		200.000.000	11.250.000	211.250.000	Talud Badan jalan
	Paranggupito	Dusun Sawit		25		m					-	22.500.000	22.500.000	Badan jalan
											-		-	
	Brenggolo	Dusun Samo Rt 06/ 03			165	m2	303.030		50.000.000		50.000.000	11.250.000	61.250.000	Jalan dusun
		Dusun Brenggolo			180	m2	277.778		50.000.000		50.000.000	11.250.000	61.250.000	Jalan dusun
		Dusun Brenggolo Rt 02/ 06		1		unit	45.000.000		45.000.000		45.000.000		45.000.000	PUSTU terancam roboh
		Dsn Brenggolo 5/8	120			m2	458.333	55.000.000			55.000.000	11.250.000	66.250.000	Jalan putus
		Dsn Gemawang 2/9	120			m2	458.333	55.000.000			55.000.000	11.250.000	66.250.000	Jalan putus
		SMPN 3	1			unit	150.000.000	150.000.000			150.000.000		150.000.000	R. Guru SMPN 3 tembok Jebol, air
	Sugihan	Dusun Sugihan Rt 04/ 05		105		m2	142.857	15.000.000			15.000.000	22.500.000	37.500.000	Jalan dusun
	Guno	Guno lor 4/4		20		m	750.000	15.000.000			15.000.000	16.875.000	31.875.000	Talud jalan
		guno kidul 2/1	50			m	2.000.000	100.000.000			100.000.000		100.000.000	talud dem watu lumbung
	Duren	weru 1/1	35			m	2.857.143	100.000.000			100.000.000		100.000.000	talud jalan
	boto	mesu 1/2		30		m	2.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	Talud jalan
	jatrejo	tengger		50		m	1.200.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000	saluran air
	Pacarangin			150		m2	286.667	40.000.000			40.000.000	56.250.000	96.250.000	Jalan Kabupaten
	Kel. Tanjungan	Lingk. Tengger Rt 2/6	20			m	500.000	10.000.000			10.000.000		10.000.000	talud jalan jebol
		Mirahan Rt 2/1		15		m	666.667	10.000.000			10.000.000	11.250.000	21.250.000	badan jalan longsor
	Pelem	Kel. Pelem	1			unit	65.000.000	65.000.000			65.000.000	28.125.000	93.125.000	Jembatan rusak
	Watangsono	tunggur 2/3		20		m	500.000	10.000.000			10.000.000	22.500.000	32.500.000	badan jalan longsor
		tunggur 1/3		15		m	466.667	7.000.000			7.000.000	16.875.000	23.875.000	badan jalan longsor
		tunggur 1/2		25		m	520.000	13.000.000			13.000.000	16.875.000	29.875.000	badan jalan longsor
											-		-	
	TEMBORO	disen		15		m	666.667	10.000.000			10.000.000	16.875.000	26.875.000	Jalan
		disen		24		m	2.500.000	60.000.000			60.000.000	16.875.000	76.875.000	Jalan dan buk deker
		belang	40			m	2.500.000	100.000.000			100.000.000		100.000.000	talud dan pagar desa
		belang		35		m	1.714.286	60.000.000			60.000.000		60.000.000	talud lapangan
		boro		26		m	2.307.692	60.000.000			60.000.000	28.125.000	88.125.000	Jalan
		salam-ngambarsari		15		m	1.333.333	20.000.000			20.000.000	11.250.000	31.250.000	Jalan
		bengle		10		m	1.000.000	10.000.000			10.000.000	22.500.000	32.500.000	Jalan
		bengle		15		m	666.667	10.000.000			10.000.000	16.875.000	26.875.000	Jalan
		manggis		8		m	1.250.000	10.000.000			10.000.000	16.875.000	26.875.000	Jalan

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Luas Jumlah Data 2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Praktiraan Kerusakan	Total Kerusakan & Kerugian	Keterangan	
			Berat	Sedang	Ringan			Ringan	Berat	Sedang					Ringan
		manggis		10		m	1.000.000		10.000.000		10.000.000	11.250.000	21.250.000	jalan	
		bengle		12		m	833.333		10.000.000		10.000.000	22.500.000	32.500.000	jalan	
		sawit-salam-temboro		8		m	1.250.000		10.000.000		10.000.000	11.250.000	21.250.000	jalan	
		temboro-hargosan		30		m	666.667		20.000.000		20.000.000	16.875.000	36.875.000	jalan	
		joso		25		m	800.000		20.000.000		20.000.000	11.250.000	31.250.000	jalan	
		joso		15		m	666.667		10.000.000		10.000.000	22.500.000	32.500.000	jalan	
		joso		15		m	666.667		10.000.000		10.000.000	16.875.000	26.875.000	jalan	
		joso		20		m	500.000		10.000.000		10.000.000	11.250.000	21.250.000	jalan	
		temboro-dlepih		40		m	2.250.000		90.000.000		90.000.000	16.875.000	106.875.000	jalan	
		joso-temboro		45		m	2.000.000		90.000.000		90.000.000	11.250.000	101.250.000	jalan	
	JEBLOGAN	muning		20		m	850.000		17.000.000		17.000.000		17.000.000	mesjid	
		Purwoharjo	40			m	25.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000	281.250.000	1.281.250.000	jalan purwoharjo - karangtengah	
		Purwoharjo	35			m	24.285.714	850.000.000			850.000.000	33.750.000	883.750.000	jalan purwoharjo - sandangmulyo	
		Purwoharjo	30			m	21.666.667	650.000.000			650.000.000	28.125.000	678.125.000	jalan purwoharjo - ngandong	
		Purwoharjo	35			m	22.857.143	800.000.000			800.000.000		800.000.000	Akses listrik PLN	
		kitren 1/1	20			m	15.000.000	300.000.000			300.000.000		300.000.000	smp n 2 karangtengah	
		Purwoharjo	20			m	12.500.000	250.000.000			250.000.000		250.000.000	jaringan komunikasi selulerTowe	
	Bero	Dsn. Timoyo		25		m	1.200.000		30.000.000		30.000.000	33.750.000	63.750.000	jalan	
		Dsn. Banasan		20		m	750.000		15.000.000		15.000.000	28.125.000	43.125.000	jalan	
	Pijiharjo	Dsn Pijiharjo		20		m	500.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000	Pagar Vihara	
		Dsn. Jurang		35		m	1.714.286		60.000.000		60.000.000	16.875.000	76.875.000	jalan	
	Gumiwang Lor	Dsn. Blernbem		30		m	1.666.667		50.000.000		50.000.000	28.125.000	78.125.000	jalan	
		Dsn. Suwondo		15		m	866.667		10.000.000		10.000.000	28.125.000	38.125.000	jalan	
	Sumberagung	jalan Selatan Lap. Sumberagung		25		m	2.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000	Talud jalan	
	Sumberejo	jalan semawur-wates-temon		45		m	3.888.889		175.000.000		175.000.000	16.875.000	191.875.000	jalan	
	Tegiri	Galih 3/9		25		m	2.000.000		50.000.000		50.000.000	11.250.000	61.250.000	Jalan desa	
		butuh		30		m	1.666.667		50.000.000		50.000.000	22.500.000	72.500.000	jalan desa	
	Ronggojati	Ngancar 1/8		15		m	1.333.333		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Talud jalan	
		Ngancar 2/8		1		lokasi	1.000.000		1.000.000		1.000.000	22.500.000	23.500.000	jalan	
		Ronggojati		30		m	1.333.333		40.000.000		40.000.000	16.875.000	56.875.000	jalan	
		penggung 2/6		20		m	750.000		15.000.000		15.000.000	22.500.000	37.500.000	jalan	
		penggung 2/6		15		m	333.333		5.000.000		5.000.000	16.875.000	21.875.000	jalan	
		gunungagung rt.1 dan rt.2		20		m	750.000		15.000.000		15.000.000	16.875.000	31.875.000	jalan	
	kudi	dsn. Kudi Rt 2 Rw 7		25		m	1.200.000		30.000.000		30.000.000	22.500.000	52.500.000	jalan	
		Dsn Nalangan Rt 4 Rw 4		120		m2	541.667		65.000.000		65.000.000	22.500.000	87.500.000	jalan	

2

[illegible]

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Luas/ Jumlah Bata2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerusakan	Total Kerusakan & Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan	Satuan		Berat	Sedang	Ringan				
2 Energi	Ketenagalistrikan													
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)					unit								
	Jaringan Listrik													
	Tiang Listrik Roboh	Se-Kab Wonogiri	15			Big	4.500.000	67.500.000			67.500.000	15.000.000	82.500.000	Perbaikan & Kabel
3 Sumber Daya Air														
	Ds. Imbar	Dsn. Josari	40				2.500.000	100.000.000			100.000.000	15.000.000	115.000.000	Bendungan Cek Dam
	Ds. Imbar	Dsn. Bendungari	20				1.500.000	30.000.000			30.000.000	50.000.000	80.000.000	Dam Irigasi
	Ds. Watangrejo	Dsn. Pringwatang	40				2.500.000	100.000.000			100.000.000	15.000.000	115.000.000	Tanggul Embung
	Ds. Trukan	Dsn. Trukan	100				1.000.000	100.000.000			100.000.000	100.000.000	200.000.000	Saluran Sekunder
	Ds. Suci	Dsn. Pajok	20				7.500.000	150.000.000			150.000.000	75.000.000	225.000.000	Dam Irigasi
	Ds. Gambirmanis	Suruhan	2.000				50.000	100.000.000			100.000.000	10.000.000	110.000.000	Embung
	Ds. Wiroko	dsn. Taman wetan 1/1	200				1.500.000	300.000.000			300.000.000	5.000.000	305.000.000	talud
	Ds. Sindukarto	jurang kuwung cernangkah	25				1.000.000	25.000.000			25.000.000	50.000.000	75.000.000	saluran P.15, T.7, L.1m
	dawungan	dawungan	65				7.692.308	500.000.000			500.000.000	10.000.000	510.000.000	talud
4 Pos dan Telekomunikasi	kal Sanggrong	manggis 2/4	22				6.818.182	150.000.000			150.000.000	100.000.000	250.000.000	dam dan talud
								1.330.000.000	225.000.000		1.555.000.000	430.000.000	1.985.000.000	
	Jaringan Telepon Seluler	Karangtengah	1			Bh	250.000.000	250.000.000			250.000.000	1.500.000.000	1.750.000.000	
5 Air dan Sanitasi														
	Sarana Air Bersih													
	Jaringan Air Bersih	Se-Kab Wonogiri	1			Ls	250.000.000	250.000.000			250.000.000	22.500.000	272.500.000	Suplai Tanki
								11.242.500.000	7.005.000.000	75.000.000	18.322.500.000	5.662.835.000	24.005.335.000	

3

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Luas Jumlah Batas	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerugian	Total Kerusakan & Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan			Satuan	Berat	Sedang				
EKONOMI PRODUKTIF														
1. Pertanian, Perkebunan, dan Pertanian	A Pertanian													
	Padi Sawah	Se-Kab Wonogiri				Ha	607,97	20.000.000				12.159.400.000		
	Padi Gogo	Se-Kab Wonogiri				Ha	251,5	15.000				3.772.500		
	Jagung	Se-Kab Wonogiri				Ha	399,77	24.000.000				9.594.480.000		
	Kacang Tanah	Se-Kab Wonogiri				Ha	37	16.000				592.000		
	Ubi Kayu	Se-Kab Wonogiri				Ha	50	15.000				750.000		
	Cabai	Se-Kab Wonogiri				Ha	25	180.000				4.500.000		
	Melon	Se-Kab Wonogiri				Ha	2	160.000				320.000		
	B Peternakan						1373,24							
	Sapi	Se-Kab Wonogiri				ekor	13	15.500.000				201.500.000		
	Kambing	Se-Kab Wonogiri				ekor	78	765.000				59.670.000		
	Unggas	Se-Kab Wonogiri				ekor	266	50.000				13.300.000		
	C Perkebunan													
2 Perikanan														
3 Perdagangan														
	Toko	Se-Kab Wonogiri	1.150			unit		250.000			2.875.000.000		Kehilangan Omzet	
4 Perindustrian														
	Industri Genteng	Kec. Tirtomoyo	250			unit		3.000.000			3.000.000.000		Kehilangan Omzet	
	Industri Crushing	Kec. Tirtomoyo	1			unit/hr		25.000.000			750.000.000		Kehilangan Omzet	
5 Pariwisata														
	Hotel													
	Objek Wisata	Kahyangan	1			unit		100.000.000			100.000.000		Kehilangan Omzet	
		Museum Karst	1			unit		100.000.000			200.000.000		Kehilangan Omzet	
6 Koperasi dan UKM														
											300.000.000			
											28.873.284.500			

Sektor / Sub Sektor	Sarana dan Prasarana	Lokasi (Kecamatan)	Data Kerusakan			Luas/ Jumlah Rata2	Harga Satuan	Nilai Kerusakan (Rp. Juta)			Perkiraan Kerusakan	Prakiraan Kerugian	Total Kerusakan & Kerugian	Keterangan
			Berat	Sedang	Ringan			Satuan	Berat	Sedang				
SOSIAL														
1. Kesehatan														
	1 Posyandu					unit	-							
	2 Puskesmas Pembantu			4		unit	10.000.000		40.000.000		40.000.000	10.000.000	50.000.000	
	3 Puskesmas					unit	-							
2. Pendidikan														
	1 Gedung TK			1		RKB	10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000	20.000.000	
	2 Gedung SD			1		RKB	13.000.000		13.000.000		13.000.000	10.000.000	23.000.000	
	3 Gedung SMP			1	3	RKB	70.000.000	300.000.000	210.000.000		510.000.000	60.000.000	570.000.000	
	4 Gedung SMA/SMK				1	RKB	10.000.000			10.000.000	10.000.000	5.000.000	15.000.000	
3. Agama														
	1 Rumah Ibadah													
	a Gereja					unit								
	b Mesjid			7		unit	5.000.000		35.000.000		35.000.000	5.000.000	40.000.000	
4. Lembaga Sosial														
								300.000.000	308.000.000	10.000.000	618.000.000	100.000.000	718.000.000	
LINTAS SEKTOR														
1. Pemerintahan														
	1 Bangunan Kantor	Karanglengah										25.000.000	25.000.000	Pindah Pelayanan
2 Keamanan dan Keamanan (TNI/POLRI)														
2 Keuangan dan Perbankan														
4 Lingkungan Hidup:														
5 Pengurangan Risiko Bencana														
								-	-	-	-	25.000.000	25.000.000	
TOTAL								27.662.500.000	27.984.000.000	4.225.800.000	59.872.300.000	37.426.869.500	97.299.169.500	

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOPO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2013,
TENTANG
RENCANA AKSI REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN
TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 - 2020

PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN
DI KABUPATEN WONOGIRI - PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

✓

**PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 - 2020**

SEKTOR/SUB SEKTOR		Prakiraan Kebutuhan (Rp Juta)	Prosentase Kebutuhan
1	SEKTOR PERUMAHAN	22.908.829.620	37,80%
	A Sub Sektor Perumahan	21.908.829.620	36,15%
	B Sub Sektor Prasarana Lingkungan	1.000.000.000	1,65%
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	27.684.263.000	45,69%
	A Sub Sektor Transportasi	15.980.972.000	26,37%
	B Sub Sektor Energi	100.000.000	0,17%
	C Sub Sektor Sumber Daya Air	11.253.291.000	18,57%
	D Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi	250.000.000	0,41%
	E Sub Sektor Air dan Sanitasi	100.000.000	0,17%
3	SEKTOR SOSIAL	1.947.025.000	3,21%
	A Sub Sektor Kesehatan	163.000.000	0,27%
	B Sub Sektor Pendidikan	1.539.025.000	2,54%
	C Sub Sektor Agama	245.000.000	0,40%
	D Lembaga Sosial	-	0,00%
4	EKONOMI	7.957.379.000	13,13%
	A Pertanian, Perternakan, Perkebunan	2.675.000.000	4,41%
	B Perikanan	500.000.000	0,83%
	C Perdagangan	282.379.000	0,47%
	D Perindustrian	-	0,00%
	E Pariwisata	4.500.000.000	7,43%
	6 Koperasi dan UKM	-	0,00%
5	LINTAS SEKTOR	100.000.000	0,17%
	A Pemerintahan	-	0,00%
	B Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	-	0,00%
	C Keuangan dan Perbankan	-	0,00%
	D Lingkungan Hidup	100.000.000	0,17%
TOTAL		60.597.496.620	100,00%
PROSENTASE		100,00%	100,00%

V

**PENILAIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 - 2021**

SEKTOR/SUB SEKTOR	SARANA DAN PRASARANA	LOKASI (KECAMATAN)	Data Kebutuhan		Harga Satuan (Rp)	Prakiraan Kebutuhan	KETERANGAN
			Volume	Satuan			
1	SEKTOR PERUMAHAN					22.908.829.620	
	A Sub Sektor Perumahan					21.908.829.620	
						2.039.405.000	
	1 Lahan Huntap	Tirtomoyo, Manyaran	2,00	lokasi	1.019.702.500		
	2 Bangunan Huntap dlepih	Tirtomoyo	284,00	unit	47.064.394		
	3 Bangunan Huntap kepuhsari	Manyaran	19,00	unit	70.702.947		
	4 Bantuan stimulan rehab rumah	Se-Kab. Wonogiri	1,00	se-Kab. Wng	3.382.500.000		
	5 Perencanaan huntap	Tirtomoyo, Manyaran	303,00	Unit	970.915		
	6 Pengawasan huntap	Tirtomoyo, Manyaran	303,00	unit	485.457		
	7 Sewa rumah sementara	Se-Kab. Wonogiri	1,00	se-Kab. Wng	1.336.000.000		
	B Sub Sektor Prasarana Lingkungan	Se-Kab. Wonogiri	1,00	se-Kab. Wng	1.000.000.000		
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR					27.684.263.000	
	A Sub Sektor Transportasi					15.980.972.000	
						150.000.000	
	1 Rehab Jbt Blarakan, Desa Wiroko	Tirtomoyo	12,00	m	12.500.000		
	2 Rehab Talud Dusun Duren, Desa Ngambarsari	Karangtengah	50,00	m	14.000.000		
	3 Rehab Talud Dsn Timbangan, Ds Karangtengah	Karangtengah	50,00	m	10.000.000		
	4 Rehab Talud Dsn Gudang, Ds Ngambarsari	Karangtengah	35,00	m	10.000.000		
	5 Rekonstruksi Jembatan Jimbar, Pracimantoro	Pracimantoro	12,00	m	75.000.000		
	6 Rekonstruksi Dsn Beji, Nguntoronadi	Nguntoronadi	30,00	m	6.666.667		
	7 Rekonstruksi Talud Giribelah, Giritontro	Giritontro	60,00	m	5.833.333		
	8 Rehab sayap jbt Nglaran, Desa Banyakprodo	Tirtomoyo	8,00	m	14.750.000		
	9 Rehab jbt Dusun Puter, Desa Genengharjo	Tirtomoyo	10,00	m	21.900.000		
	10 Rehab Talud Dusun Temuwuh, Desa Giritrejo	Tirtomoyo	52,00	m	4.807.692		
	11 Rehab Talud Soko, Ruas Jl Sampang-Jeblogan	Karangtengah	50,00	m	10.000.000		
	12 Rehab Talud Pojok, Ruas Jl Sampang-Jeblogan	Karangtengah	26,00	m	7.730.769		
	13 Rehab Talud Sambeng, Desa Ngambarsari	Karangtengah	25,00	m	7.000.000		
	14 Rehab Talud Dsn Ngumbul, Rs Karangtengah - Purwoharjo	Karangtengah	50,00	m	6.000.000		
	15 Rehab Talud Dsn Sumur, Rs Karangtengah - Widoro 2	Karangtengah	60,00	m	5.000.000		
	16 Rehab Talud Dsn Plawan, Rs Juwangi - Widoro 2	Parangggupito	60,00	m	4.166.667		
	17 Rehab Talud Rs. Juwangi - Widoro 1	Parangggupito	16,00	m	3.125.000		
	18 Rehab Sayap Jbt Dungkancil, Desa Suci	Pracimantoro	37,00	m	1.351.351		
	19 Rehab Jbt Dawung Kismantoro	Kismantoro	24,00	m	20.833.333		
	20 Jembatan Tiken, Kec. Manyaran	Manyaran	20,00	m	65.000.000		

2

SEKTOR/SUB SEKTOR	SARANA DAN PRASARANA	LOKASI (KECAMATAN)	Data Kebutuhan		Harga Satuan (Rp)	Prakiraan Kebutuhan	KETERANGAN
			Volume	Satuan			
	21 Jembatan Pagersari, Sempukerep, Sidoharjo	Sidoharjo	13,00	m	46.153.846	600.000.000	
	22 Rekonst Talud Jalan Tengger, Kel. Tanjungsari, Jatisrono	Jatisrono	30,00	m	7.082.000	212.460.000	
	23 Rehab Jbt Taman, Desa Wiroko	Tirtomoyo	94,00	m	7.184.043	675.300.000	
	24 Rehab Sayap Jbt Malangan, Desa Baleharjo	Eromoko	37,00	m	8.783.784	325.000.000	
	25 Rehab Sayap Jbt Pidekso, Giriwoyo	Giriwoyo	33,00	m	62.030.303	2.047.000.000	
	26 Rekonst Sayap Jbt Kebyuk, Desa Tempursari, Sidoharjo	Sidoharjo	30,00	m	6.245.333	187.360.000	
	27 Rekonst Talud Sayap Jbt Babadan, Banaran, Pracimantoro	Pracimantoro	50,00	m	5.077.200	253.860.000	
	28 Rehab Talud Ploso-Godang, Desa Genengharjo	Tirtomoyo	60,00	m	35.833.333	2.150.000.000	
	29 Rekonst Talud Semawur, Sumberejo, Batuwarno	Batuwarno	40,00	m	6.875.000	275.000.000	
	30 Rekonst Talud Tileng, Desa Hargosari, Tirtomoyo	Tirtomoyo	41,00	m	9.667.951	396.386.000	
	31 Rekonst Jbt Pangkah - Gadok, Baleharjo, Eromoko	Eromoko	1,00	Paket	400.000.000	400.000.000	
	32 Rekonst Talud Jalan Kajuman, Desa Kepuhsari, Manyaran	Manyaran	60,00	m	16.593.433	995.606.000	
	33 Rekonst Talud Jalan Galih Rt 2/5, Desa Sumber	Purwantoro	20,00	m	5.000.000	100.000.000	
						-	
B Sub Sektor Energi						100.000.000	
C Sub Sektor Sumber Daya Air						11.253.291.000	
	1 DI. Jurang Kuwung	Eromoko	576,00	m3	923.611	532.000.000	
	2 DI. Jeblogan	Pracimantoro	655,00	m3	984.733	645.000.000	
	3 DI. Dawungan	Jatiroto	143,00	m3	9.211.888	1.317.300.000	
	4 DI. Sanggrong	Jatiroto	11,00	m	22.727.273	250.000.000	
	5 Rekonst Talud Tebing S. Wiroko Dsn Taman Wetan, Tirtomo	Tirtomoyo	250,00	m	9.559.820	2.389.955.000	
	6 Rekonst Talud Tebing S. Wiroko Dsn Taman Kulon, Tirtomo	Tirtomoyo	250,00	m	9.554.980	2.388.745.000	
	7 Rekonst Talud Tebing S. Wiroko Dsn Godang, Ds. Genengha	Tirtomoyo	200,00	m	5.278.450	1.055.690.000	
	8 Normalisasi Sungai Wiroko, Kec. Tirtomoyo	Tirtomoyo	1.000,00	m	2.500.000	2.500.000.000	
	9 Perencanaan	se-Kab Wonogiri	4,00	Paket	18.707.250	74.829.000	
	10 Pengawasan	se-Kab Wonogiri	4,00	Paket	24.943.000	99.772.000	
						-	
D Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi						250.000.000	
E Sub Sektor Air dan Sanitasi						100.000.000	
						-	

SEKTOR/SUB SEKTOR	SARANA DAN PRASARANA	LOKASI (KECAMATAN)	Data Kebutuhan		Harga Satuan (Rp)	Prakiraan Kebutuhan	KETERANGAN
			Volume	Satuan			
3 SEKTOR SOSIAL						1.947.025.000	
A Sub Sektor Kesehatan						163.000.000	
	Rekonst Talud Pustu Ds. Pingkuk, Jatiroto	Jatiroto	1,00	Paket		50.000.000	
	Rekonst Talud Pustu Ds. Pesido, Jatiroto	Jatiroto	1,00	Paket		55.000.000	
	Rekonst Talud Pustu Ds. Brenggolo, Jatiroto	Jatiroto	1,00	Paket		50.000.000	
	Sarpras Pustu Kel. Ginkikis, Giriwoyo	Giriwoyo	1,00	Paket		8.000.000	
B Sub Sektor Pendidikan						1.539.025.000	
	1 Rekonst Talud SDN 1 Hargosari	Tirtomoyo	108,00	m3	601.852	65.000.000	
	2 Rekonst Talud SDN 2 Sidorejo	Tirtomoyo	36,00	m3	833.333	30.000.000	
	3 Rehab Sarpras SDN 1 Tameng	Giriwoyo	1,00	Paket	60.000.000	60.000.000	
	4 Rekonst Talud SDN 1 Karangtengah	Karangtengah	206,40	m3	314.922	65.000.000	
	5 Rekonst Talud SDN 2 Karangtengah	Karangtengah	24,00	m3	1.250.000	30.000.000	
	6 Rekonst Talud SDN 4 Karangtengah	Karangtengah	81,60	m3	490.196	40.000.000	
	7 Rekonst Talud SMPN 3 Satu Atap Jatiroto	Jatiroto	312,00	m3	1.326.923	414.000.000	
	8 Rekonst Talud SMPN 2 Satu Atap Tirtomoyo	Tirtomoyo	86,00	m3	1.255.814	108.000.000	
	9 Rekonst Talud SMPN 2 Kismantoro	Kismantoro	144,00	m3	450.000	64.800.000	
	10 Rekonst Talud dan Pagar SMPN 1 Karangtengah	Karangtengah	34,00	m3	1.500.000	51.000.000	
	11 Rekonst Ruang Kelas dan Talud SMPN 2 Karangtengah	Karangtengah	126,00	m3	4.057.341	511.225.000	
	12 Rehab Sarpras SMKN 2 Jatiroto	Jatiroto	1,00	Paket	100.000.000	100.000.000	
						-	
C Sub Sektor Agama						245.000.000	
	1 Masjid Keron Kidul 2/6 Wonogiri	Wonogiri	1,00	Lokasi	35.000.000	35.000.000	
	2 Masjid Ngasem, Karangtengah	Karangtengah	1,00	Lokasi	35.000.000	35.000.000	
	3 Masjid Jatirogo 1/1 Baturetno	Baturetno	1,00	Lokasi	35.000.000	35.000.000	
	4 Masjid Muning, Karangtengah	Karangtengah	1,00	Lokasi	35.000.000	35.000.000	
	5 Masjid Masaran, Karangtengah	Karangtengah	1,00	Lokasi	35.000.000	35.000.000	
	6 Masjid Ngumbul, Karangtengah	Karangtengah	1,00	Lokasi	35.000.000	35.000.000	
	7 Masjid Bendungan 1/1 Kulurejo	Nguntoronadi	1,00	Lokasi	35.000.000	35.000.000	
						-	
D Lembaga Sosial						-	

SEKTOR/SUB SEKTOR		SARANA DAN PRASARANA		LOKASI (KECAMATAN)		Data Kebutuhan		Harga Satuan (Rp)	Prakiraan Kebutuhan	KETERANGAN
						Volume	Satuan			
4	EKONOMI								-	
	A Pertanian, Perternakan, Perkebunan								7.957.379.000	
		a. Bantuan Bibit, Pupuk dan Obat-obatan pertanian		se-Kab. Wonogiri	472,00	Hektar		3.177.966	1.500.000.000	
		b. Bantuan Bibit Sapi		se-Kab. Wonogiri	50,00	ekor		15.000.000	750.000.000	
		c. Bantuan Bibit Kambing		se-Kab. Wonogiri	150,00	ekor		2.000.000	300.000.000	
		d. Bantuan ternak unggas		se-Kab. Wonogiri	5.000,00	ekor		25.000	125.000.000	
	B Perikanan								-	
		a. Bantuan Kolam Ikan		se-Kab. Wonogiri	10,00	Lokasi		50.000.000	500.000.000	
	C Perdagangan								-	
		a Rekonst Talud Pasar Temboro, Kec. Karangtengah		Karangtengah	43,50	m		6.491.471	282.379.000	
	D Perindustrian								-	
	E Pariwisata								-	
		a Rekonst OW. Kahyangan, Desa Dlepih, Tirtomoyo		Tirtomoyo	1,00	Paket		2.500.000.000	2.500.000.000	
		b Rehab OW. Museum Kars, Pracimantoro		Pracimantoro	1,00	Paket		2.000.000.000	2.000.000.000	
	6 Koperasi dan UKM								-	
5	LINTAS SEKTOR								100.000.000	
		1 Pemerintahan							-	
		2 Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)							-	
		3 Keuangan dan Perbankan							-	
		4 Lingkungan Hidup		se-Kab. Wonogiri	1,00	Kegiatan		100.000.000	100.000.000	
									-	
									60.597.496.620	
									100,00%	



BUPATI WONOGIRI



JOKO SUTOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA AKSI REHABILITASI
DAN REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA BANJIR, TANAH
LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN
2018 - 2020

PENILAIAN KEBUTUHAN DAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
PASCABENCANA BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN
DI KABUPATEN WONOGIRI - PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017



REKAPITULASI PENILAIAN KEBUTUHAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 - 2021

SEKTOR/SUB SEKTOR		Prakiraan Kebutuhan (Rp Juta)	RENCANA SUMBER PENDANAAN			
			KABUPATEN	PROPINSI	K / L	SUMBER LAIN
1	SEKTOR PERUMAHAN	22.908.829.620	2.039.405.000	-	20.869.424.620	-
	A Sub Sektor Perumahan	21.908.829.620	2.039.405.000	8,90%	19.869.424.620	86,73%
	B Sub Sektor Prasarana Lingkungan	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	4,37%
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	27.684.263.000	8.497.361.000	30,69%	18.736.902.000	67,68%
	A Sub Sektor Transportasi	15.980.972.000	8.322.760.000	30,06%	7.658.212.000	27,66%
	B Sub Sektor Energi	100.000.000				100.000.000
	C Sub Sektor Sumber Daya Air	11.253.291.000	174.601.000	0,63%	11.078.690.000	40,02%
	D Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi	250.000.000				250.000.000
	E Sub Sektor Air dan Sanitasi	100.000.000				100.000.000
3	SEKTOR SOSIAL	1.947.025.000	1.379.025.000	100.000.000	468.000.000	-
	A Sub Sektor Kesehatan	163.000.000	-	-	163.000.000	8,37%
	B Sub Sektor Pendidikan	1.539.025.001	1.379.025.000	70,83%	100.000.000	3,08%
	C Sub Sektor Agama	245.000.000	-	-	245.000.000	12,58%
	D Lembaga Sosial	-				-
						24,04%
4	EKONOMI	7.957.379.000	-	-	7.957.379.000	-
	A Pertanian, Perternakan, Perkebunan	2.675.000.000	-	-	2.675.000.000	33,62%
	B Perikanan	500.000.000	-	-	500.000.000	6,28%
	C Perdagangan	282.379.000	-	-	282.379.000	3,55%
	D Perindustrian	-	-	-	-	-
	E Pariwisata	4.500.000.000	-	-	4.500.000.000	56,55%
	6 Koperasi dan UKM	-				-
5	LINTAS SEKTOR	100.000.000	-	-	100.000.000	-
	A Pemerintahan	-	-	-	-	-
	B Keamanan dan Keteriban (TNI/POLRI)	-	-	-	-	-
	C Keuangan dan Perbankan	-	-	-	-	-
	D Lingkungan Hidup	100.000.001	-	-	100.000.000	100,00%
						-
	TOTAL	60.597.496.620	11.915.791.000	100.000.000	48.131.705.620	450.000.000
	PROSENTASE	100,00%	19,66%	0,17%	79,43%	0,74%

PENILAIAN KEBUTUHAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 - 2021

SEKTOR/SUB SEKTOR		Prakiraan Kebutuhan (Rp Juta)	RENCANA SUMBER PENDANAAN				KETERANGAN
			KABUPATEN	PROPINSI	K / L	SUMBER LAIN	
1	SEKTOR PERUMAHAN	22.908.829.620	2.039.405.000	-	20.869.424.620	-	
	A Sub Sektor Perumahan	21.908.829.620	2.039.405.000	-	20.869.424.620	-	
	1 Lahan Huntap	2.039.405.000	2.039.405.000	-	-	-	
	2 Bangunan Huntap dlepih	13.366.288.000	-	-	13.366.288.000	-	BNPB
	3 Bangunan Huntap kepulisari	1.343.356.000	-	-	1.343.356.000	-	BNPB
	4 Bantuan stimulan rehab rumah	3.382.500.000	-	-	3.382.500.000	-	BNPB
	5 Perencanaan huntap	294.187.120	-	-	294.187.120	-	BNPB
	6 Pengawasan huntap	147.093.500	-	-	147.093.500	-	BNPB
	7 Sewa rumah sementara	1.336.000.000	-	-	1.336.000.000	-	BNPB
	B Sub Sektor Prasarana Lingkungan	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	BNPB
2	SEKTOR INFRASTRUKTUR	27.684.263.000	8.497.361.000	-	18.736.902.000	450.000.000	
	A Sub Sektor Transportasi	15.980.972.000	8.322.760.000	-	7.658.212.000	-	
	1 Rehab Jbt Blarakan, Desa Wiroko	150.000.000	150.000.000	-	-	-	
	2 Rehab Talud Dusun Duren, Desa Ngambarsari	700.000.000	700.000.000	-	-	-	
	3 Rehab Talud Dsn Timbangan, Ds Karangtengah	500.000.000	500.000.000	-	-	-	
	4 Rehab Talud Dsn Gudang, Ds Ngambarsari	350.000.000	350.000.000	-	-	-	
	5 Rekonstruksi Jembatan Jinbar, Pracinanoro	900.000.000	900.000.000	-	-	-	
	6 Rekonstruksi Dsn Beji, Nguteronadi	200.000.000	200.000.000	-	-	-	
	7 Rekonstruksi Talud Giribelah, Giritontro	350.000.000	350.000.000	-	-	-	
	8 Rehab savap jbt Nglaran, Desa Banyakprodo	118.000.000	118.000.000	-	-	-	
	9 Rehab jbt Dusun Puter, Desa Genengharjo	219.000.000	219.000.000	-	-	-	
	10 Rehab Talud Dusun Temuwuh, Desa Girirejo	250.000.000	250.000.000	-	-	-	
	11 Rehab Talud Soko, Ruas Jl Sampang-Jeblogan	500.000.000	500.000.000	-	-	-	
	12 Rehab Talud Pojok, Ruas Jl Sampang-Jeblogan	201.000.000	201.000.000	-	-	-	
	13 Rehab Talud Sambeng, Desa Ngambarsari	175.000.000	175.000.000	-	-	-	
	14 Rehab Talud Dsn Ngumbul, Rs. Karangtengah - Purwoharjo	300.000.000	300.000.000	-	-	-	
	15 Rehab Talud Dsn Sumur, Rs. Karangtengah - Purwoharjo	300.000.000	300.000.000	-	-	-	
	16 Rehab Talud Dsn Plawan, Rs Juwangi - Widoro 2	250.000.000	250.000.000	-	-	-	
	17 Rehab Talud Rs. Juwangi - Widoro 1	50.000.000	50.000.000	-	-	-	
	18 Rehab Savap Jbt Dungkancil, Desa Suci	50.000.000	50.000.000	-	-	-	
	19 Rehab Jbt Dawung Kismantoro	500.000.000	500.000.000	-	-	-	
	20 Jembatan Tikem, Kec. Manyaran	1.300.000.000	1.300.000.000	-	-	-	

PENILAIAN KEBUTUHAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 - 2021

SEKTOR/SUB SEKTOR		Prakiraan Kebutuhan (Rp Juta)	RENCANA SUMBER PENDANAAN				KETERANGAN
			KABUPATEN	PROPINSI	K / L	SUMBER LAIN	
	21 Jembatan Pagersari, Sempukerep, Sidoharjo	600.000.000	600.000.000	-	-	-	
	22 Rekonst Talud Jalan Tengger, Kel. Tanjung Sari, Jatistreno	212.460.000	212.460.000				
	23 Rehab Jbt Taman, Desa Wiroko	675.300.000	25.300.000	-	650.000.000	-	KEMENDES & PDTT
	24 Rehab Sayap Jbt Malangun, Desa Baleharjo	325.000.000	75.000.000	-	250.000.000	-	KEMENDES & PDTT
	25 Rehab Sayap Jbt Pidekso, Giriwoyo	2.047.000.000	47.000.000	-	2.000.000.000	-	KEMENDES & PDTT
	26 Rekonst Sayap Jbt Kebuyuk, Desa Tempursari, Sidoharjo	187.360.000			187.360.000		KEMENDES & PDTT
	27 Rekonst Talud Sayap Jbt Babadan, Banaran, Pracimantoro	253.860.000			253.860.000		KEMENDES & PDTT
	28 Rehab Talud Ploso-Godang, Desa Genengharjo	2.150.000.000	-	-	2.150.000.000	-	KEMENDES & PDTT
	29 Rekonst Talud Semawur, Sumberejo, Batuwarno	275.000.000	-	-	275.000.000	-	KEMENDES & PDTT
	30 Rekonst Talud Tileng, Desa Hargosari, Tirtomoyo	396.386.000	-	-	396.386.000	-	KEMENDES & PDTT
	31 Rekonst Jbt Pangkah - Gadok, Baleharjo, Eromoko	400.000.000	-	-	400.000.000	-	KEMENDES & PDTT
	32 Rekonst Talud Jalan Kajunan, Desa Kepuh Sari, Manyaran	995.606.000			995.606.000		KEMENDES & PDTT
	33 Rekonst Talud Jalan Galih Rt 2/5 Desa Sumber	100.000.000			100.000.000		KEMENDES & PDTT
		-					
B	Sub Sektor Energi	100.000.000				100.000.000	PT PLN
C	Sub Sektor Sumber Daya Air	11.253.291.000	174.601.000	-	11.078.690.000	-	
	1 DI. Jurang Kuwung	532.000.000	-	-	532.000.000	-	BNPB
	2 DI. Jeblogun	645.000.000	-	-	645.000.000	-	BNPB
	3 DI. Dawungan	1.317.300.000	-	-	1.317.300.000	-	BNPB
	4 DI. Sanggrong	250.000.000	-	-	250.000.000	-	BNPB
	5 Rekonst Talud Tebing S. Wiroko Dsn Taman Wetan, Tirtomoyo	2.389.955.000			2.389.955.000		KEMENPUPERA/BBWS
	6 Rekonst Talud Tebing S. Wiroko Dsn Taman Kulon, Tirtomoyo	2.388.745.000			2.388.745.000		KEMENPUPERA/BBWS
	7 Rekonst Talud Tebing S. Wiroko Dsn Godang, Ds. Genengharjo	1.055.690.000			1.055.690.000		KEMENPUPERA/BBWS
	8 Normalisasi Sungai Wiroko, Kec. Tirtomoyo	2.500.000.000			2.500.000.000		KEMENPUPERA/BBWS
	9 Perencanaan	74.829.000	74.829.000	-	-	-	
	10 Pengawasan	99.772.000	99.772.000	-	-	-	
		-					
D	Sub Sektor Pos dan Telekomunikasi	250.000.000				250.000.000	PT TELKOM
E	Sub Sektor Air dan Sanitasi	100.000.000				100.000.000	PDAM

PENILAIAN KEBUTUHAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 - 2021

SEKTOR/SUB SEKTOR		Prakiraan Kebutuhan (Rp Juta)	RENCANA SUMBER PENDANAAN				KETERANGAN
			KABUPATEN	PROPINSI	K / L	SUMBER LAIN	
3	SEKTOR SOSIAL	1.947.025.000	1.379.025.000	100.000.000	468.000.000	-	
	A Sub Sektor Kesehatan	163.000.000	-	-	163.000.000	-	
	1 Rekonst Talud Pustu Ds. Pingkuk, Jatiroto	50.000.000	-	-	50.000.000	-	KEMENKES
	2 Rekonst Talud Pustu Ds. Pesido, Jatiroto	55.000.000	-	-	55.000.000	-	KEMENKES
	3 Rekonst Talud Pustu Ds. Brenggolo, Jatiroto	50.000.000	-	-	50.000.000	-	KEMENKES
	4 Sarpras Pustu Kel. Girikikis, Giriwoyo	8.000.000	-	-	8.000.000	-	KEMENKES
	B Sub Sektor Pendidikan	1.539.025.000	1.379.025.000	100.000.000	60.000.000	-	
	1 Rekonst Talud SDN 1 Hargosari	65.000.000	65.000.000	-	-	-	KEMENDIKBUD
	2 Rekonst Talud SDN 2 Sidorejo	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-
	3 Rehab Sarpras SDN 1 Taneng	60.000.000	-	-	60.000.000	-	KEMENDIKBUD
	4 Rekonst Talud SDN 1 Karangtengah	65.000.000	65.000.000	-	-	-	-
	5 Rekonst Talud SDN 2 Karangtengah	30.000.000	30.000.000	-	-	-	-
	6 Rekonst Talud SDN 4 Karangtengah	40.000.000	40.000.000	-	-	-	-
	7 Rekonst Talud SMPN 3 Satu Atap Jatiroto	414.000.000	414.000.000	-	-	-	-
	8 Rekonst Talud SMPN 2 Satu Atap Tirtomoyo	108.000.000	108.000.000	-	-	-	-
	9 Rekonst Talud SMPN 2 Kismantoro	64.800.000	64.800.000	-	-	-	-
	10 Rekonst Talud dan Pagar SMPN 1 Karangtengah	51.000.000	51.000.000	-	-	-	-
	11 Rekonst Ruang Kelas dan Talud SMPN 2 Karangtengah	511.225.000	511.225.000	-	-	-	-
	12 Rehab Sarpras SMKN 2 Jatiroto	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	C Sub Sektor Agama	245.000.000	-	-	245.000.000	-	
	1 Masjid Keron Kidul 2/6 Wonogiri	35.000.000	-	-	35.000.000	-	KEMENAG
	2 Masjid Ngasem, Karangtengah	35.000.000	-	-	35.000.000	-	KEMENAG
	3 Masjid Jatirogo 1/1 Baturetno	35.000.000	-	-	35.000.000	-	KEMENAG
	4 Masjid Muning, Karangtengah	35.000.000	-	-	35.000.000	-	KEMENAG
	5 Masjid Masuran, Karangtengah	35.000.000	-	-	35.000.000	-	KEMENAG
	6 Masjid Ngumbul, Karangtengah	35.000.000	-	-	35.000.000	-	KEMENAG
	7 Masjid Bendungan 1/1 Kulturejo	35.000.000	-	-	35.000.000	-	KEMENAG
		-	-	-	-	-	-
	D Lembaga Sosial	-	-	-	-	-	

3

PENILAIAN KEBUTUHAN SUMBER PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA
BANJIR, TANAH LONGSOR DAN ANGIN TOPAN DI KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018 - 2021

SEKTOR/SUB SEKTOR	Prakiraan Kebutuhan (Rp Juta)	RENCANA SUMBER PENDANAAN				KETERANGAN
		KABUPATEN	PROPINSI	K / L	SUMBER LAIN	
4 EKONOMI	7.957.379.000	-	-	7.957.379.000	-	-
A Pertanian, Perternakan, Perkebunan	2.675.000.000	-	-	-	-	-
a. Bantuan Bibit, Pupuk dan Obat-obatan pertanian	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	-	KEMENTAN
b. Bantuan Bibit Sapi	750.000.000	-	-	750.000.000	-	KEMENTAN
c. Bantuan Bibit Kambing	300.000.000	-	-	300.000.000	-	KEMENTAN
d. Bantuan ternak unggas	125.000.000	-	-	125.000.000	-	KEMENTAN
B Perikanan	500.000.000	-	-	-	-	-
a. Bantuan Kolam Ikan	500.000.000	-	-	500.000.000	-	KKP
C Perdagangan	282.379.000	-	-	-	-	-
a Rekonst Talud Pasar Temboro, Kec. Karangtengah	282.379.000	-	-	282.379.000	-	KEMENDAG
D Perindustrian	-	-	-	-	-	-
E Pariwisata	4.500.000.000	-	-	-	-	-
a Rekonst OW. Kahyangan, Desa Dlepih, Tirtomoyo	2.500.000.000	-	-	2.500.000.000	-	KEMENPAR
b Rehab OW. Museum Kars, Pracimantoro	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	-	KEMENPAR
6 Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-
5 LINTAS SEKTOR	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-
A Pemerintahan	-	-	-	-	-	-
B Keamanan dan Ketertiban (TNI/POLRI)	-	-	-	-	-	-
C Keuangan dan Perbankan	-	-	-	-	-	-
D Lingkungan Hidup	100.000.000	-	-	100.000.000	-	KEMEN LHK
TOTAL	60.597.496.620	11.915.791.000	100.000.000	48.131.705.620	450.000.000	-
PROSENTASE	100,00%	19,66%	0,17%	79,43%	0,74%	-

BUPATI WONOGIRI

JOKO SUTOKO